



REKAM JEJAK CAPRES-CAWAPRES

**Penelusuran Profil, Kerja, Sikap, Kebijakan,
Visi - Misi para Capres dan Cawapres**

**&
Agenda Penegakan HAM 2014 - 2019**



2014

DAFTAR ISI

Latar Belakang	1
Kerangka Teoritik	3
Rekam Jejak Capres Cawapres 2014	8
1. Indikator.....	8
2. Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014.....	10
3. Profil Partai dalam Koalisi.....	13
4. Profil dan Rekam Jejak Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014.....	16
Konsistensi Visi Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden Dan Rekam Jejak Calon Presiden dan Wakil Presiden di Bidang Penegakan Hukum dan HAM	78
a. Visi Misi Cawapres.....	78
b. Perbandingan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Rekam Jejak Calon.....	79
Catatan Kritis Program Kerja Calon Presiden dan Wakil Presiden dikaitkan dengan rekam jejak	87
1. Prabowo-Hatta	
- Program Bidang Penegakan Hukum dan Pelanggaran HAM Masa Lalu..	87
- Program Bidang Hak atas Fair Trial.....	93
- Program Bidang Pemberantasan Korupsi.....	95
- Program Bidang Hak atas Perburuhan.....	98
- Program Bidang Hak atas Pendidikan.....	102
- Program Bidang Hak atas Kebebasan Beragama.....	103
- Program Bidang Hak atas Kesehatan.....	105
- Program Untuk Mendukung Hak Perumahan.....	106
2. Jokowi-Jusuf Kalla	
- Program Bidang Hak atas Perburuhan.....	106
- Program Bidang Hak atas Fair Trial.....	108

- Program Bidang Pemberantasan Korupsi..... 109
- Program Bidang Penegakan Hukum dan Pelanggaran HAM Masa Lalu 110
- Program Bidang Hak atas Kesehatan.....112
- Program Bidang Hak atas Pendidikan..... 113
- Program Bidang Hak atas Kebebasan Beragama..... 114
- Program Untuk Mendukung Hak Perumahan..... 116

A. Latar Belakang

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu umum yang regular dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah prinsip utama. Pemilu diyakini sebagai sarana menentukan kepemimpinan dan masa depan bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia¹, tahun 2014 ini akan menyelenggarakan pemilu langsung yang ke tiga pasca reformasi yang mengantarkan Indonesia ke era demokratisasi.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa pemilu 2014 adalah pemilu yang menentukan transisi demokrasi di Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan menentukan perjalanan Indonesia untuk dapat melalui masa transisi demokrasi. Hal ini tak lepas dari sistem presidensialisme yang kita anut. Dimana presiden ditempatkan sebagai nahkoda yang berpengaruh besar terhadap maju mundurnya negara.

Pada Pemilu 2014 ini kita melakukan pemilihan terhadap DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR, DPD dan eksekutif, Presiden serta Wakil Presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden akan diselenggarakan pada 9 Juli 2014. Mendekati hari tersebut, situasi politik memperlihatkan geliat kontestasi yang semakin meninggi dari partai politik maupun para capres – cawapres. Mayoritas media masa akan mengiklankan atau mempromosikan capres-cawapres yang menjadi pilihan, sehingga cenderung memberikan informasi yang tidak berimbang atas kedua capres-cawapres. Kondisi tersebut sungguh tidak menguntungkan bagi banyak masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut maka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi fokus perhatian dalam penyusunan Rekam Jejak Capres-Jawapres kali ini.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan salah satu indikator dari sebuah Negara demokrasi, yang kita kenal dengan demokrasi prosedural. Sedangkan di sisi lain, demokrasi substansial pun harus terus dibangun dan diupayakan. Demokrasi substansial menuntut adanya kesetaraan. Tidak hanya dalam hal politik dan hukum, namun juga informasi dan pengetahuan. Hal ini lah yang kami rasa masih menjadi persoalan di Indonesia, demokrasi substansial masih jauh panggang dari api. Hal ini dapat dinilai dari kondisi kesetaraan informasi dan pengetahuan di tengah masyarakat. Tidak dipungkiri informasi jauh lebih dekat dengan masyarakat pasca era internet. Namun, berkembangnya media sosial dan internet tidak serta merta membuat masyarakat dapat mengakses seluruh informasi dengan akurat. Belum lagi masih ada permasalahan ketidakmerataan pembangunan, dimana belum seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati perkembangan teknologi, informasi dan pengetahuan secara merata.

Terlebih dalam hal politik. Perlu kemampuan literasi untuk memperoleh informasi yang terpercaya dan bertanggung jawab. Mengingat saat ini, iklan politik tidak ada bedanya dengan iklan komersial, yang di dalamnya terdapat disparitas yang menganga antara gemerlap citra-citra yang ditampilkan dengan realitas politik. Ada perbedaan lahir dan batin. Citra-citra tentang pemimpin pembaharu, penjaga pancasila dan UUD 1945, ‘cinta rakyat kecil’, ‘pemimpin tegas’,

¹ Indonesia adalah negara terbesar setelah India dan Amerika yang berhasil melaksanakan demokrasi Hal tersebut pernah disampaikan Presiden federal Jerman, Christian Wulff saat menyampaikan kuliah umum di Auditorium Terapung Perpustakaan UI Depok, Kamis 1 Desember 2011. <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/02/173369489/Indonesia-Negara-Demokrasi-Terbesar-Ketiga-Dunia>

peduli orang miskin’, ‘sahabat petani’, ‘peduli pendidikan’, atau pembela bangsa tak lebih dari citra-citra indah dan menyilaukan yang berputar-putar di dalam ruang tanda dan citra, tetapi tak jelas mampu meyentuh realitas.

Persoalan lain, budaya lupa masyarakat Indonesia terhadap sejarah., khususnya dalam soal memilih pemimpin nampaknya masih akan menjadi tantangan tersendiri. Jangan sampai rakyat lupa bahwa KKN, militerisme (militer merasuk ke dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat), praktik represi pernah menjadi petaka bagi negeri. Jangan sampai rakyat tertipu ketika ada sosok ‘penjahat’ tiba-tiba berubah tampilan menjadi pahlawan. Jangan sampai rakyat salah langkah mempercayakan suara kepada calon yang tidak memiliki rekam jejak yang baik. Guna mengikis dan meminimalisir hal tersebut dan guna memberikan informasi yang berimbang dan sedapat mungkin objektif, sehingga masyarakat dapat menjadi PEMILIH CERDAS, maka diperlukan usaha menyuarkan ingatan kolektif untuk saling mengingatkan dan menambah pengetahuan bersama.

Berkenaan dengan hal tersebut, LBH Jakarta merasa penting untuk menyusun sebuah Rekam Jejak Capres – Cawapres, berisi profil, kerja-kerja yang dilakukan, sikap, kebijakan dan dilengkapi dengan visi-misi yang diusung. Harapan kami, melalui sajian Rekam Jejak Capres – Cawapres 2014 ini: (1) masyarakat dapat memperoleh informasi dan penjelasan mengenai rekam jejak dan integritas setiap kandidat capres dan cawapres ditilik dari indikator penegakan hukum dan HAM ; (2) masyarakat memperoleh informasi dan penjelasan mengenai konsistensi rekam Jejak Capres dan Wapres dengan visi misi yang diusung; (3) berkontribusi dalam proses pembentukan demokrasi substansial, dimana tersedia informasi berkualitas yang memperlengkapi masyarakat menjadi **PEMILIH CERDAS**.

Pengumpulan data dalam Rekam Jejak Capres – Cawapres 2014 ini dilakukan dengan penelusuran dokumen baik cetak maupun elektronik mengenai profil, kerja, dan kehidupan serta aliansi dan sikap politik setiap capres- cawapres. Penyusunan Rekam Jejak Capres- Cawapres ini dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yakni Maret sampai Juni 2014. Sumber data lain yang dipergunakan ialah referensi buku, jurnal, majalah, laporan lembaga, pemberitaan media baik cetak maupun elektronik yang relevan untuk menjawab persoalan penelitian. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis dengan metode kualitatif

Pada akhirnya masyarakat lah yang tetap akan memutuskan apakah visi-misi yang diusung pasangan capres – cawapres 2014 ini adalah sekedar janji-janji manis atau merupakan cita-cita bersama yang akan diwujudkan dengan kerja keras. Keseluruhan proses tersebut ada baiknya dilakukan dengan pengamatan secara komprehensif dan objektif, dan hal ini lah yang kami upayakan dalam menyusun rekam jejak capres- cawapres ini.

Semoga sajian Rekam Jejak Capres – Cawapres 2014 yang sederhana ini dapat bermanfaat dalam proses pembentukan demokrasi substansial di Indonesia, dimana ada banyak PEMILIH CERDAS yang mendasarkan pilihannya berdasarkan informasi dan pengetahuan yang cukup atas para calon pemimpin negeri ini, dna akhirnya tidak berhenti pada menjadi **PEMILIH CERDAS**, melainkan **WARGA CERDAS** yang konsisten mengawal pemerintahan terpilih kedepan, bagi **Indonesia yang cerdas dan sejahtera**.

Salam Perubahan,
Tim Penyusun

B. Kerangka Teoritik

1. Pemilu

Pengertian pemilu dalam perspektif hak asasi manusia hakekatnya merupakan pelaksanaan hak dasar politik rakyat yaitu, hak untuk ikut serta menentukan arah dan masa depan kehidupan bersama dalam suatu masyarakat bernegara. Begitu penting dan besarnya pengaruh pemerintah terhadap kehidupan rakyat sehari-hari memberikan justifikasi yang kuat bagi rakyat untuk memilih hak politik yaitu memilih dan mengontrol pemerintah.²

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden juga kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Khusus mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 1 ayat 1 UU No. 42 tahun 2008 menjelaskan pengertian Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau disingkat dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 2 UU *aquo* diatur asas penyelenggaraan pemilu yang menegaskan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3 ayat (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. (2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.

3. Capres dan Cawapres

Untuk memahami pengertian presiden dan wakil presiden penting untuk merujuk kepada UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. UU *aquo* menjelaskan yang dimaksud dengan calon presiden dan wakil presiden dalam kerangka prosedural. Sebelum menjelaskan apa yang dimaksud dengan calon presiden dan wakil presiden, UU tersebut menjelaskan pengertian Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (yang dalam bahasa undang-undang disebut dengan Pasangan Calon) adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden diatur tergas dalam pasal 5 UU No. 42 Tahun 2008, diantaranya adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. terdaftar sebagai Pemilih;
- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Secara normatif undang-Undang mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika, dan moral serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam UU itu diatur beberapa substansi penting yang signifikan, antara lain mengenai persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib memiliki visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dalam konteks penyelenggaraan sistem

pemerintahan presidensiil, pejabat negara yang akan dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri pada saat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.³

Ketentuan itu harapannya dapat meneguhkan posisi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang nantinya terpilih adalah sebagai pemimpin bangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu. Untuk itu, dalam rangka membangun etika pemerintahan yang sehat terdapat semangat bahwa Presiden atau Wakil Presiden terpilih tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara maupun sebagai pimpinan partai politik yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing parpol.

Meskipun demikian, menurut beberapa sarjana, syarat di atas tidaklah cukup karena hanya bersifat formil, terdapat berbagai persyaratan lain yang seharusnya dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. seperti memiliki rekam jejak yang baik, jujur dan tidak KKN juga bukan bagian dari pelaku pelanggaran HAM.

Dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden disebutkan syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden atau yang diistilahkan dengan *presidential threshold* yang berarti ambang batas minimal bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.⁴

Ketentuan ambang batas minimal pencalonan presiden ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI yang menegaskan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi **paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR** atau **memperoleh 25 persen dari suara sah nasional** dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

UU *aquo* juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan *presidential threshold* dalam regulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UU ini nampaknya dimaksudkan untuk menguatkan sistem presidensiil yang kuat dan efektif. Presiden dan Wakil Presiden terpilih harapannya tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, tetapi juga memiliki basis dukungan dari DPR dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan. Proses pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui kesepakatan tertulis partai politik atau gabungan partai politik dalam pengusulan pasangan

³ UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mewajibkan kepada Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengundurkan diri apabila dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Pengunduran diri para pejabat negara tersebut dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan. Berbeda dengan Kewajiban Pejabat Negara, untuk menjaga etika penyelenggaraan pemerintahan, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau wali kota/wakil wali kota hanya perlu meminta izin kepada presiden pada saat dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden. Lihat dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/11/1225208/Mendagri.Kalau.Nyapres.Jokowi.Tak.Perlu.Mundur.sebagai.Gubernur>, diakses 18 Juni 2014

⁴ Ketentuan tersebut saat ini telah dijudicial review oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor: 14/PUU-XI/2014.

calon yang memiliki nuansa terwujudnya koalisi permanen guna mendukung terciptanya efektivitas pemerintahan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah diterapkan sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009. Hasilnya, dari 44 partai politik peserta Pemilu 2009, hanya Partai Demokrat yang meraih lebih dari 20 persen dari 560 jumlah kursi di DPR RI. Partai Demokrat meraih 150 kursi atau 20,85 persen dari 560 kursi. Sementara partai lainnya yang meraih kursi di DPR RI adalah Partai Golkar meraih 107 kursi atau 14,45 persen dari 560 kursi. PDI Perjuangan 95 kursi atau 14,03 persen, PKS 57 kursi atau 7,88 persen, PAN 43 kursi atau 6,01 persen, PPP 37 kursi atau 5,32 persen, PKB 27 kursi atau 4,94 persen, Gerindra 26 kursi atau 4,46 persen, dan Partai Hanura mendapat 18 kursi atau 3,77 persen dari 560 kursi yang ada di DPR RI, sedangkan 35 partai politik lainnya gagal meraih satu kursi pun di DPR. Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 terdapat tiga pasang calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PKB, dan PPP serta 19 partai politik lain yang tidak memperoleh kursi di DPR; Megawati Soekarnoputri dan Prabowo diusung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra serta lima partai politik lain yang tidak memperoleh kursi di DPR; serta pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto dijagokan oleh Partai Golkar, Hanura, dan sejumlah partai politik lain yang tidak memperoleh kursi di DPR.⁵

4. Rekam Jejak

Istilah rekam jejak telah populer belakangan ini. Namun belum ada istilah baku yang muncul untuk menjelaskan istilah tersebut. Dalam praktiknya, Rekam jejak biasanya berkaitan dengan aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat sipil atau NGO untuk kepentingan pemilihan atau pengisian jabatan tertentu. Selama ini rekam jejak digunakan tidak hanya untuk kepentingan pemilihan atau pengisian jabatan politis namun juga dikenal untuk seleksi jabatan publik seperti Kepala POLRI, Kepala TNI dan Jaksa Agung, Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi atau komisioner komisi negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Komisi Yudisial (KY) dan seleksi jabatan lembaga publik lainnya.

Rekam jejak bagi seorang pejabat publik atau politik sangat diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana latar belakang, jejak atau kesan terhadap tingkah laku perbuatan yang bersangkutan pada masa yang lampau untuk dapat dilacak dan dikritisi. Adakah cacat hukum, moral dan sosial sehingga yang bersangkutan menjadi patut dan layak untuk dicalonkan menduduki sebuah jabatan publik.⁶

Di dalam dunia hukum baik Perdata maupun Pidana memang tidak dikenal istilah rekam jejak secara langsung. Namun hal itu bukan berarti tidak ada sama sekali pembahasan didalamnya, karena kalau dilacak dalam Aturan Perundangan baik HIR, R.Bg atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), maka akan ditemukan bukan hanya secara eksplisit bahkan secara implisit diatur

⁵ <http://www.antarasultra.com/print/267833/seputar-ambang-batas-pencalonan-presiden>, diakses 18 Mei 2014

⁶ Muntasir Sukri. 2013. Menggali Kebenaran Melacak Rekam Jejak. Lihat dalam https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbLUpZchRCWjBSYUK/edit?pli=1, 19 Februari 2014

ketika membahas pembuktian dengan saksi. Pasal 172 HIR,309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata. Dalam Pasal Perundangan-Undangan tersebut memberikan tugas kepada Hakim untuk memahami atau mengetahui latar belakang kehidupan seorang saksi, cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi menjadi dasar landasan menentukan kepercayaan (reliability) saksi sehingga layak dipercaya keterangannya. Melacak latar belakang kehidupan, kesusilaan, kedudukan dan martabat seorang saksi sehingga hakim dapat menilai keterangan kesaksian seseorang didalam persidangan – inilah yang disebut dengan rekam jejak dalam pembuktian saksi.⁷

Secara teoritik, Pemeriksaan ‘rekam jejak’ saksi oleh hakim tersebut dapat digunakan untuk memahami istilah rekam jejak yang ditujukan untuk pengisian atau pemilihan pejabat publik. Seperti halnya untuk saksi, rekam jejak untuk pemilihan atau pengisian pejabat publik juga penting dilakukan untuk mengukur apakah calon pejabat public memiliki latar belakang kehidupan, cara hidup, kesusilaan dan kedudukan yang baik yang dapat menjadi dasar untuk menentukan kepercayaan (reliability) kepada calon tersebut sehingga layak dipercaya untuk dipilih mengisi jabatan public

5. Integritas

Menurut kamus bahasa Indonesia integritas adalah **mutu, sifat, atau keadaan** yg menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan **kewibawaan dan kejujuran**. Menurut Barbara Killinger, *Integrity* atau integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah *hypocrisy* (hipokrit atau munafik). Seorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya.⁸ Integritas adalah gambaran keseluruhan pribadi seseorang Dengan kata lain, integritas adalah “satunya kata dengan perbuatan”. Seorang yang berintegritas dapat mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam posisi dan situasi yang sulit.

Secara sederhana, integritas dapat diterjemahkan menjadi tiga komponen besar yaitu: kejujuran (*honesty*), konsistensi (*consistency*), dan komitmen (*commitment*). Ketiga hal tersebut dipakai sebagai basis dalam melihat integritas seseorang. Integritas menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan dari yang dipimpinya. Pimpinan yang berintegritas akan dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga akan menjadi tindakannya. Integritas sebagai salah satu nilai vital bagi seorang pemimpin negara yang bertanggung jawab besar terhadap masa depan sebuah bangsa. Integritas merupakan hal yang tidak mudah diukur karena melibatkan variabel yang cukup banyak. Ada beberapa cara

⁷ Ibid.

⁸ Killinger, Barbara (2010). *Integrity: Doing the Right Thing for the Right Reason*. McGill-Queen's University Press.

p. 12. ISBN 9780773582804. Retrieved 2013-10-15. "Integrity is a personal choice, an uncompromising and predictably consistent commitment to honour moral, ethical, spiritual and artistic values and principles."

yang dapat digunakan sebagai alat ukur, seperti: referensi, Muti rater survey⁹, assessment centre¹⁰ dan wawancara.

C. REKAM JEJAK CAPRES CAWAPRES 2014

1. Indikator Rekam Jejak dan Integritas Capres Cawapres

Rekam jejak dapat digunakan untuk memetakan dan meneropong level integritas seorang pemimpin. Untuk mengukur Rekam Jejak Capres dan Cawapres secara obyektif, penting untuk menentukan indikator yang akan digunakan. Selanjutnya, yang harus dilakukan adalah dengan mendefinisikan standar perilaku integritas yang menjadi acuan dalam proses pencarian data untuk rekam jejak. Referensi merupakan salah satu cara yang cukup komprehensif untuk mengukur integritas karena saat seleksi melalui proses *checking* terlebih dahulu. Untuk kandidat yang akan mengisi posisi pejabat publik sangat penting untuk dilakukan *cross check* terhadap *track record* tokoh baik di tempat bekerja /kedudukan/ jabatan sebelumnya.¹¹

Dalam penelitian ini digunakan beberapa indikator untuk mengukur rekam jejak dan integritas calon presiden dan wakil presiden diantaranya adalah mengenai latar belakang tokoh, pengalaman dan kompetensi kepemimpinan, independensi, selanjutnya diukur menggunakan indikator terhadap penegakan hukum dan HAM yang bertitik tolak dari pendekatan hak sipol dan ekosob yang terangkum dalam beberapa indikator kunci diantaranya: (1). Keterlibatan dalam suatu kasus hukum, kode etik atau pelanggaran HAM, (2). Sikap dan pandangan tokoh terhadap keberagaman dan minoritas, (3). Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan perumahan, (4). Sikap dan pandangan terhadap penegakan hukum dan Pelanggaran HAM Masa lalu, Sikap dan pandangan terhadap pemberantasan korupsi. Selanjutnya indikator tersebut digunakan untuk mengukur integritas calon dengan melacak rekam jejak mereka.

Tabel I
Mengukur Integritas dari Rekam Jejak
Calon Presiden dan Wakil Presiden

Indikator	Cara mengukur
Latar Belakang dan Kepribadian Calon	Latar belakang pendidikan Lingkungan Keluarga Kebiasaan dan Gaya hidup calon

⁹ Muti rater survey atau penilaian multi sumber, adalah umpan balik yang berasal dari anggota langsung lingkaran kerja. Paling sering, umpan balik 360 derajat akan mencakup umpan balik langsung dari bawahan, rekan (rekan kerja), dan pengawas, serta evaluasi diri. Hal ini juga dapat mencakup, dalam beberapa kasus, umpan balik dari sumber eksternal, seperti pemasok atau pemangku kepentingan lainnya, lihat dalam http://en.wikipedia.org/wiki/360-degree_feedback, diakses 12 Mei 2014

¹⁰ *Assessment Center*, adalah suatu metoda untuk mengidentifikasi dan menajaring pegawai, yang dinilai memiliki potensi dari sisi manajerial (managerial skill) untuk menduduki suatu jabatan tertentu di kemudian hari (future responsibility). Lihat dalam <http://training.ppsdm.com/index.php/archives/452>, diakses 12 Mei 2014

¹¹ <http://www.portalhr.com/people-management/resourcing/mengukur-integritas-bukan-lagi-mission-impossible/>

Pengalaman dan Kompetensi memimpin dalam organisasi atau pemerintahan	Jejak Karir Pengalaman Organisasi Pengalaman dalam pemerintahan Aktifitas tokoh dalam kegiatan kenegaraan Penghargaan yang pernah diterima terkait kegiatan kenegaraan
Independensi ¹²	Affiliasi kelompok/organisasi Keterkaitan dengan tokoh atau partai politik Keterkaitan dengan negara asing Keterkaitan dengan pemiliki modal/ investor asing
Keterlibatan dalam suatu kasus hukum, kode etik atau pelanggaran HAM	Diduga atau diisukan terlibat dalam kasus hukum Diduga atau diisukan terlibat dalam pelanggaran etik Diduga atau diisukan terlibat dalam pelanggaran pelanggaran HAM
Pandangan Terhadap Keberagaman dan Masyarakat Minoritas	Bisa diterima dan mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan Sikap terhadap Keberagaman dan masyarakat minoritas
Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan	Pandangan dan Sikap terhadap Jaminan hak-hak dasar buruh, upah, jamsostek, keselamatan kerja Jaminan kebebasan hak berserikat Tingkat pengangguran
Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Perumahan	Pandangan dan sikap terhadap masalah penyediaan rumah yang layak bagi rakyat dan penggusuran paksa
Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan	Pandangan dan Sikap mengenai ketersediaan, keterjangkauan, kebersesuaian, keberterimaan, kualitas pendidikan
Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Kesehatan	Pandangan dan Sikap terkait ketersediaan layanan kesehatan dalam jumlah yang sesuai bagi seluruh penduduk, Aksesibilitas atas layanan kesehatan baik secara keuangan geografis dan budaya Kualitas layanan kesehatan yang harus sesuai dengan standar yang ditentukan Kesetaraan dalam layanan kesehatan

¹² Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihakmanapun. Artinya keberadaan kita adalah mandiri. tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Contoh independensi dapat kita lihat pada organisasi-organisasi tertentu dimana keberadaannya adalah merdeka tanpa diboncengi kepentingan tertentu. Dalam konteks lain, independensi juga merupakan hak kita sebagai manusia, yang memiliki hak bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh orang lain. Tentu saja dalam pelaksanaannya yang disebut independen juga ada batasan-batasannya. Karena suatu lembaga atau organisasi juga tidak dapat eksis tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Lihat dalam https://www.academia.edu/4575304/Apa_itu_independensi, diakses 8 Juni 2014

Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Hidup	Pandangan dan sikap terkait penggunaan sanksi hukuman mati Penghapusan hukuman mati
Pandangan dan Sikap terhadap Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Jujur dan Adil (Fair Trial)	Persamaan dimuka hukum Sikap terhadap pembaharuan KUHP-KUHAP Hak Atas Bantuan Hukum Sikap terhadap korupsi peradilan
Pandangan dan Sikap terhadap penegakan Hukum dan Pelanggaran HAM Masa lalu	Sikap dan pandangan terhadap penegakan hukum Sikap dan pandangan terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu
Pandangan dan Sikap terhadap Pemberantasan KKN	Tidak melakukan atau diopinikan melakukan kkn atau suap Komitmen dan gagasan pemberantasan korupsi Komitmen dan gagasan pencegahan korupsi

2. Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014

Sesuai dengan ketentuan UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, untuk dapat mencalonkan diri menjadi kandidat calon presiden dan wakil presiden, tidak hanya cukup dengan popularitas dan dukungan rakyat secara individu, namun juga harus memiliki dukungan dari partai politik dan/ atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat ambang batas presidential treshold. Tokoh yang populer tanpa dukungan dari partai politik dan/atau gabungan partai politik yang lolos ambang batas presidential treshold tidak akan dapat maju sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden.

Hasil Pemilihan Umum Legislatif menunjukkan bahwa tidak satupun partai yang dapat mencalonkan sendiri tokoh/ kadernya untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Tidak adanya partai yang memenuhi syarat presidential treshold dalam pemilihan legislative menjadi penyebabnya. Berikut ini hasil lengkap pemilihan umum legislative 9 April 2014 yang lalu:

Tabel II
Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014¹³

Partai	Perolehan suara dan persentase nasional
PDIP	23.681.471 suara (18,95%)
Golkar	18.432.312 suara (14,75%)
Gerindra	14.760.371 suara (11,81%)
Partai Demokrat	12.728.913 suara (10,9%)
PKB	11.298.950 suara (9,04%)
PAN	9.481.621 suara (7,59%)

PKS	8.480.204 suara (6,79%)
Nasdem	8.402.812 suara (6,72%)
PPP	8.157.488 suara (6,53%)
Hanura	6.579.498 suara (5,26%)
PBB	1.825.750 suara (1,46%)
PKPI	1.143.094 suara (0,91%)

Menurut ketentuan *presidential trashold* dalam UU pemilu presiden dan wakil presiden, partai yang berpeluang mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah partai atau gabungan partai politik yang dapat mencapai suara 20% dalam pemilihan umum legislatif, jika tidak mencapai presentase minimal tersebut partai harus dapat menggandeng partai lain atau berkoalisi untuk mencapai persyaratan presentase perolehan suara.

Merujuk pada hasil pemilu legislative 2009 diatas, nampak jelas bahwa tidak adanya partai yang memenuhi syarat, 'memaksa' partai-partai untuk menggabungkan diri atau berkoalisi. Perolehan suara yang didapatkan dari masing-masing partai yang berkoalisi digabung dan harus dapat mencapai syarat minimal perolehan suara 20%. Merujuk ketentuan tersebut, saat ini telah terbentuk dua poros koalisi gabungan partai politik yang mencalonkan presiden dan wakil presiden, yakni.

1. Koalisi PDIP, Nasdem, PKB, PKPI
2. Koalisi Gerindra, PPP, PKS, PBB, Golkar

Sementara itu, salah satu kontestan pemilu 2014, partai democrat memilih tidak bergabung dengan poros koalisi partai yang ada dan memilih sikap 'ambigu', tidak menjalin koalisi dengan partai manapun namun bukan golongan putih (golput).¹⁴

Terbentuknya dua poros gabungan partai politik menunjukkan terpolarisasinya kepentingan partai-partai yang berlainan halauan kedalam gerbong koalisi demi untuk memenuhi ketentuan undang-undang untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berikut ini adalah Dua poros gabungan partai politik yang terbentuk pasca pemilihan legislatif.

Pasca terbentuknya koalisi partai-partai peserta pemilu legislatif, perkembangan terakhir bursa capres dan cawapres hanya memunculkan dua pasangan calon yang didukung oleh dua gabungan partai politik yang ada, yakni:

1. Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla yang didukung oleh partai PDIP, PKB, HANURA dan PKPI
2. Pasangan Prabowo-Hatta Rajasa yang didukung oleh Partai GERINDRA, PPP, PAN, PKS, PBB, GOLKAR

Dari bursa calon kandidat capres-cawapres, akhirnya pada Sabtu, 31 Mei 2014 KPU mengumumkan

¹⁴

<http://kabar7.com/kabar7-sby-demokrat-tidak-berpihak-dan-tidak-golput.html>, https://id.berita.yahoo.com/sby-demokrat-tidak-ke-jokowi-maupun-prabowo-135711522.html?utm_content=bufferb47f6&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer, diakses 27 Mei 2014

bahwa nama-nama di bawah ini lah capres-cawapres yang berpeluang meraih dukungan dan kepercayaan masyarakat memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Tabel II
Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019

No.	Nama	Usia	Latar Belakang	Pendidikan Terakhir	Keterangan
1.	Prabowo Subianto Djojohadikusumo	Jakarta, <u>17 Oktober</u> 1951 (63 tahun)	Militer	Akabri Darat Magelang (1970-1974)	Diduga terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur. Pada tahun 1995 Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Golkar Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra
2.	Jusuf Kalla	Sulawesi Utara, Jumat, 15 Mei 1942) (72 Tahun)	Pengusaha	Fakultas Ekonomi <u>Universitas Hasanuddin</u> (1967)	Mantan Wakil Presiden periode 2004-2009
3.	Joko Widodo	Surakarta, 21 Juni 1961 (52 Tahun)	Pengusaha	Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta lulusan 1985	Mantan Walikota Surakarta Gubernur DKI Jakarta
4.	Hatta Rajasa	<u>Palembang, Sumatera Selatan, 18 Desember 1953</u> ; (61 Tahun)	Politisi	Insinyur Teknik Perminyakan angkatan 1973 <u>Institut Teknologi Bandung</u> (ITB)	Ketua Umum PAN Menteri Koordinator Perekonomian

3. Profil Partai Dalam Koalisi

1. Gabungan Partai Pendukung Jokowi-Jusuf Kalla

Partai Pendukung	Platform Partai	Profil Partai ¹⁵
Nasdem	Nasionalis	<p>Partai NasDem diresmikan pada tanggal 26 Juli 2011 di Jakarta oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi Nasional Demokrat. Dalam perjalanannya, Partai Nasdem sukses masuk ke dalam 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang ditetapkan oleh KPU pada bulan Januari 2013 dan menjadikan Partai Nasdem berhak untuk maju sebagai peserta PEMILU 2014 dengan nomor urut 1.</p> <p>Ketua: Surya Paloh Sekretaris Jenderal: Patrice Rio Capella Didirikan: 26 Juli 2011 Kantor pusat: Jl. R.P. Soeroso No. 44, Jakarta</p>
PDIP	Nasionalis	<p>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDIP dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Hasil dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, namun setelah peristiwa inilah, namanya dikenal diseluruh Indonesia.</p> <p>Ketua: Megawati Soekarnoputri (sejak 1999) Sekretaris Jenderal: Tjahjo Kumolo Didirikan: 1999 Kantor pusat: Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan</p>
PKB	Islam	<p>Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah) yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi).</p> <p>Ketua: Muhaimin Iskandar Sekretaris Jenderal: Imam Nachrawi Didirikan: 23 Juli 1998 Kantor pusat: Jl. Raden Saleh 1 No. 9, Jakarta Pusat</p>

HANURA	Nasionalis	Partai Hanura adalah sebuah partai politik di Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta. Pendirian Partai HANURA dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006. Ketua: H. Wiranto, SH Sekretaris Jenderal: Dossy Iskandar Prasetyo Didirikan: 14 November 2006 Kantor Pusat: Menteng, Jakarta
PKPI	Nasionalis	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dahulu bernama Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), adalah sebuah partai politik di Indonesia yang dideklarasikan di Jakarta tanggal 15 Januari 1999. PKPI lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan visi dan misi yang jelas, dan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. PKPI adalah wadah untuk melanjutkan cita-cita perjuangan Kemerdekaan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketua: Sutiyoso Sekretaris Jenderal: Lukman F. Mokoginta Didirikan: 15 Januari 1999 (sebagai PKP), 9 September 2002 (sebagai PKPI)

2. Gabungan Partai Pendukung Prabowo-Hatta

Partai Pendukung	Platform Partai	Profil Partai ¹⁶
GERINDRA	Nasionalis	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir Suhardi M.Sc. Partai GERINDRA berdiri pada tanggal 6 Februari 2008. Partai GERINDRA mendapatkan 26 kursi (4.64%) di DPR RI hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009, setelah berhasil meraih 4.646.406 suara (4,5%). Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina sebagai calon presiden. Ketua: Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc Sekretaris Jenderal: H. Ahmad Muzani, S.Sos

		Berdiri: 6 Februari 2008 Kantor Pusat: Jl. RM. Harsono No. 54, Jakarta Selatan
PPP	Islam	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973. PPP merupakan hasil penggabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Tujuan bergabungnya keempat partai keagamaan tersebut adalah menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia ketika menyambut Pemilihan Umum pertama pada tahun 1973. Ketua: Suryadharma Ali Sekretaris Jenderal: Irgan Chairul Mahfidz Didirikan: 5 Januari 1973 Kantor Pusat: Jl. Diponegoro No.60, Jakarta
PAN	Nasionalis	Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998. Ketua Umum PAN saat ini adalah Hatta Rajasa dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai dijabat oleh Amien Rais. PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Ketua: Hatta Rajasa Sekretaris jenderal: Taufik Kurniawan Didirikan: 23 Agustus 1998 Kantor pusat: Jakarta
PKS	Islam	Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998. Ketua: Anis Matta Sekretaris Jenderal: Taufik Ridho Didirikan: 20 April 2002 Kantor pusat: DKI Jakarta
PBB	Islam	Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik

		Indonesia yang berasaskan Islam dan didirikan pada 17 Juli 1998. PBB telah mengikuti pemilu sebanyak tiga kali yaitu pada Pemilu 1999, 2004 dan Pemilu tahun 2009. Partai ini kemudian diloloskan KPU sebagai peserta pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14. Ketua: M.S. Kaban Sekretaris Jenderal: BM Wibowo Hardiwardoyo Didirikan: 17 Juli 1998 Kantor pusat: Pasar Minggu, Jakarta Selatan
GOLKAR	Nasionalis	Partai Golongan Karya (Partai Golkar) adalah sebuah partai politik yang ada di Indonesia, pertama kali berdiri pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno dengan nama Sekber GOLKAR, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber GOLKAR berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu. Ketua: Ir. Aburizal Bakrie (sejak 2009) Sekretaris Jenderal: Idrus Marham Didirikan: 20 Oktober 1964 Kantor pusat: DKI Jakarta

4. PROFIL DAN REKAM JEJAK CAPRES DAN CAWAPRES INDONESIA 2014

1. Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Indikator	Cara mengukur	Data Rekam Jejak
Profil, Latar Belakang dan Kepribadian Calon	Tempat Tanggal Lahir	Jakarta, <u>17 Oktober 1951</u> (63 tahun)
	Agama	Islam
	Nama Istri dan Anak	Cerai, Herdianto Ragowo Hediprasetyo
	Latar Belakang Pendidikan	SD Victoria Institution, Kuala Lumpur (1960-1963) SMP international School, Zurich (1963-1964) SMA : American School in London U.K (1969) Akabri Darat Magelang (1970-1974) Sekolah Staf dan Komando TNI-AD Kursus Pelatihan : Kursus Dasar Kecabangan Infanteri (1974)

		<p>Kursus Para Komando (1975) Jump Master (1977) Kursus Perwira Penyelidik (1977) Free Fall (1981) Counter Terrorist Course Gsg-9 Germany (1981) Special Forces Officer Course, Ft. Benning U.S.A (1981)¹⁷</p> <p>Prabowo merupakan perwira termuda yang meraih pangkat jenderal saat diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat berusia dengan usia 47</p>
	<p>Lingkungan Keluarga</p>	<p>Prabowo Subianto Djojohadikusumo lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. ia adalah putra pertama dari Sumitro Djojohadikusumo, seorang pakar ekonomi pada era Soekarno dan Soeharto . Ia juga merupakan cucu dari <u>Raden Mas Margono Djojohadikusumo</u>, anggota <u>BPUPKI</u>, pendiri <u>Bank Negara Indonesia</u> dan <u>Ketua DPA</u> pertama. Prabowo Subianto dinamai menurut <u>Soebianto Djojohadikoesoemo</u>, pamannya yang gugur dalam <u>Pertempuran Lengkong</u>. Ia memiliki dua kakak perempuan, <u>Biantiningsih Miderawati</u> dan <u>Maryani Ekowati</u>, dan satu orang adik, <u>Hashim Djojohadikusumo</u>. Hasyim Djojohadikusumo, adik Prabowo adalah termasuk salah satu pengusaha terkaya versi Forbes.¹⁸</p> <p>Masa kecilnya banyak dihabiskan di luar negeri. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dalam waktu 3 tahun di <u>Victoria Institution</u>, Kuala Lumpur, Sekolah Menengah di <u>Zurich International School</u>, Zurich, pada tahun 1963-1964, SMA di <u>American School</u>, London pada kurun waktu 1964-1967. Pada tahun 1970, barulah ia masuk ke <u>Akademi Militer Nasional</u>, Magelang.</p> <p>Prabowo subianto menikah dengan putri dari mantan Presiden RI Suharto yang bernama Titiek</p>

¹⁷

<http://partaigerindra.or.id/profil-prabowo-subianto-ketua-dewan-pembina-partai-gerindra>

¹⁸

<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/22/090531631/Topang-Prabowo-Kekayaan-Hashim-Terus-Melorot>, diakses 18 Juni

		<p>Mei 1983 dan berpisah 1998 tidak lama setelah presiden Soeharto lengser.¹⁹ dari pernikahannya dikarunia seorang putra bernama Ragowo Hediprasetyo atau yang dikenal dengan Didiet Prabowo.²⁰ Didiet tumbuh besar di <u>Boston</u>, AS dan sekarang tinggal di <u>Paris, Perancis</u> sebagai seorang desainer.²¹</p> <p>Prabowo lahir dalam keluarga yang menganut agama yang berbeda-beda. Ayahnya seorang muslim yang menikah dengan ibunya Dora Marie Sigar yang beragama Kristen protestan, adiknya Hasyim Djojohadikusumo beragama Kristen protestan, Sedangkan kakak dan keponakannya beragama katolik.²² Saat ini Adik Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo adalah ketua Dewan Pembina Organisasi sayap Gerindra, Kristen Indonesia Raya.²³</p>
	<p>Gaya hidup calon</p>	<p>Gaya hidup Prabowo boleh terbilang cukup mewah, selain itu Prabowo juga tercatat memiliki sejumlah perusahaan. Hal ini dilihat dari:</p> <p>Prabowo memiliki kelompok perusahaan bernama Nusantara Group yang menguasai 27 perusahaan didalam dan luar negeri. Usaha tersebut bergerak dibidang perkebunan, tambang, kelapa sawit dan batubara.²⁴ Prabowo juga memiliki saham di luar negeri, di antaranya Argentina dan Prancis.²⁵</p> <p>Berdasarkan laporan tertanggal 18 Mei 2009 harta kekayaan Prabowo bernilai 1.579.376.223.359 dan 7.572 US\$, bagian terbesar bersumber dari surat berharga yang nilainya 1.519.216.000.000. total kekayaannya ini meningkat 150 kali lipat dari harta kekayaannya pada tahun 2003.²⁶ Prabowo memiliki</p>

¹⁹ <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/10/078520725/Soal-Calon-First-Lady-Prabowo-Tunggu-Saja>, diakses 6 Mei 2014

²⁰ <http://profil.merdeka.com/indonesia/s/siti-hediati-hariyadi/>, diakses 18 Juni 2014

²¹ <http://www.thejakartapost.com/news/2011/02/06/didit-meets-parisian-haute-couture%E2%80%99s-challenge.html>, diakses 7 Mei

2014

²² <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/11/kata-adik-ibunda-prabowo-subianto-lahir-dan-meninggal-sebagai-kristen-protestan>,

<http://www.tolaklupa.com/silsilah-keluarga-prabowo/>

²³ <http://www.kiragerindra.org/index.php/content/page/11>, [http://www.tempo.co/read/news/2012/12/02/078445400/Adik-](http://www.tempo.co/read/news/2012/12/02/078445400/Adik-Prabowo-Jadi-Pembina-Kristen-Gerindra-)

Prabowo-Jadi-Pembina-Kristen-Gerindra-

²⁴ <http://economy.okezone.com/read/2012/11/02/22/713025/grup-nusantara-biduk-usaha-andalan-prabowo/large>, diakses 18 Juni

2014

²⁵ <http://www.merdeka.com/pemilu-2014/5-jejak-kepemimpinan-prabowo-dari-kopassus-hingga-pedagang/bisnis-sampai-punya-27-perusahaan-dan-punya-kekayaan-16-t.html>, diakses 18 Juni 2014

²⁶ <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/30/078525863/Kekayaan-Prabowo-Lebih-dari-Rp-16-Triliun>, diakses 20 Juni 2014

		<p>84 kuda sebagaimana juga dilaporkan sebagai harta kekayaan ke KPK. Binatang peliharaan ini pun didaftarkan sebagai harta kekayaan kepada KPK. Sebanyak tiga ekor di antaranya adalah kuda istimewa, kuda berjenis lusiano yang diimpor dari Argentina, disebut seharga Rp 3 miliar per ekor. Sebuah kuda istimewa juga dimilikinya. Kuda itu lebih berharga daripada sedan-sedan mewah, seperti Mercedes-Benz atau BMW edisi terbaru.²⁷ Binatang peliharaan ini pun didaftarkan sebagai harta kekayaan kepada KPK. Sebanyak tiga ekor di antaranya adalah kuda istimewa, kuda berjenis lusiano yang diimpor dari Argentina, disebut seharga Rp 3 miliar per ekor. Prabowo memiliki rumah seluas 24 hektar beserta pegawai sejumlah 65 orang.²⁸</p> <p>Prabowo Subianto selama ini dikenal sebagai pencinta kuda. Kuda-kuda miliknya dirawat dengan baik di Nusantara Polo Club (NPC) yang berada di Jagorawi Golf and Country Club, Bogor. Terdapat dua kandang kuda di lahan seluas lebih kurang lima hektar itu. Total ada 134 kuda.²⁹</p> <p><u>Prabowo Subianto</u> - Hashim Djojohadikusomo. Memiliki pesawat pribadi untuk beraktifitas melalui penerbangan udara di jalur domestik maupun ke mancanegara. Saat dibeli pada tahun 2008, <u>pesawat</u> buatan Brasil, jenis Jet Embraer EMB - 135BJ Legacy 600 tersebut harganya sekitar 25,4 juta dolar AS atau sekitar Rp 250 miliar.³⁰ Selain jet pribadi, prabowo juga memiliki helicopter.³¹</p>
--	--	---

²⁷ <http://nasional.kompas.com/read/2009/05/20/05390534/prabowo.tunggang.kuda.4.kali.dalam.seminggu>, diakses 20 Juni 2014

²⁸ <http://www.tempo.co/read/flashgrafis/2013/10/30/574/Benteng-Sang-Jenderal>, diakses 4 Mei 2014

²⁹ <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/25/2142430/Di.Antara.Seratusan.Kuda.Kesayangan.Prabowo>, diakses 27 Mei 2014

³⁰ <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/15/mengintip-garuda-yaksa-milik-prabowo-subianto>, diakses 10 Juni

2014

³¹ <http://news.detik.com/read/2014/04/12/073737/2553019/10/melihat-luasnya-rumah-prabowo-di-hambalang-jabar>, diakses 13

Mei 2014

Pengalaman dan Kompetensi memimpin negara dan pemerintahan	Jejak karier	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1974 Lulus Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 2. Komandan Pleton Para Komando Grup I Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) dan ditugaskan sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur (1976). 3. Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha (1977) Prabowo memimpin pasukan Den 28 Kopassus yang ditugaskan untuk membunuh pendiri dan Wakil Ketua Fretilin, Nicolau dos Reis Lobato(1978) 4. Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teroris (Gultor) (1983-1985) 5. Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (1985-1987) 6. Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad (1987-1991) 7. Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17/Kujang I/Kostrad (1991-1993) 8. Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (1993-1995) 9. Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus (1994) 10. Komandan Komando Pasukan Khusus (1995-1996) 11. Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996-1998) 12. Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (1998) 13. Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI (1998)³² 14. Politikus Partai Golkar (2004). 15. Mendirikan Partai Gerindra bersama Muchdi Purwoprandjono (2008). 16. Mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden. Berkoalisi dengan PDI Perjuangan berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri (2009)
--	--------------	---

		<p>Terkait dengan jejak karier Prabowo, Jun Honna seorang peneliti dari merujuk "Buku Petunjuk Dasar tentang Prajurit ABRI (Kep/06/X/1991), Mabes ABRI, 1991, Hal. 81 dan 86 untuk menjelaskan betapa karir Prabowo sangat mulus dan cenderung melampaui standar normal jenjang karir.³³ Pernyataan tentang cepatnya kenaikan pangkat Prabowo di militer juga disuarakan tempo dalam wawancara khusus dengan Agum Gumelar pada edisi 26/03-29/Agustus/1998.³⁴</p> <p>Meskipun memiliki karir cemerlang di ABRI, namun kemudian, karir Prabowo akhirnya harus terhenti. Dia direkomendasikan untuk diberhentikan dari ABRI oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor Sekp/533/P/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998. Karena dituding menjadi dalang kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktivis. Dalam empat lembar surat keputusan DKP itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo.³⁵ Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. Dewan Kehormatan Perwira mengambil keputusan ini, Dewan Kehormatan Perwira telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 Agustus 1998 dengan memeriksa Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto sebagai Danjen Kopassus. Berdasarkan pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira, Prabowo telah memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati, melalui Kolonel Inf Chairawan (Dan Grup-4) dan Mayor Inf Bambang Kristiono untuk melakukan pengungkapan, penangkapan, dan penahanan aktivis yang mengakibatkan Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugiyanto, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Rahardjo</p>
--	--	---

³³ <http://www.merdeka.com/politik/5-jejak-kepemimpinan-prabowo-dari-kopassus-hingga-pedagang/militer-pasukan-tempur-danjen-kopassus-sampai-pangkostrad.html>, diakses 27 Mei 2014

³⁴ <http://politik.rmol.co/read/2014/06/14/159428/Agum-Gumelar-Terlalu-Membesarkan-Pangkat-Prabowo->
<http://tempo.co.id/ang/min/03/26/nas1.htm>, diakses 18 Juni 2014

³⁵ Dalam surat rekomendasi pemecatan Prabowo yang beredar tersebut tertulis "Perwira Terperiksa atas nama Letnan Jenderal [Prabowo Subianto](#) disarankan dijatuhkan hukum administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan." Dokumen tersebut juga menyebut Prabowo telah memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati, melalui Kolonel Inf Chairawan (Komandan Grup-4 Kopassus) dan Mayor Inf Bambang Kristiono untuk melakukan pengungkapan, penangkapan, dan penahanan aktivis yang mengakibatkan Andi Arief, Aan Rusdianto, Mugiyanto, Nezar Patria, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyojati, Faisal Reza, Pius Lustrilanang, dan Desmond Junaidi Mahesa menjadi korban penculikan. <http://www.merdeka.com/politik/ketika-disidang-prabowo-berdiri-gebrak-meja-hingga-patah.html>, diakses 10 Juni 2014 ; <http://www.merdeka.com/politik/ketika-disidang-prabowo-berdiri-gebrak-meja-hingga-patah.html>,
<http://www.tolaklupa.com/inilah-surat-pemberhentian-prabowo-dari-tni/>

		<p>Waluyojadi, Faisal Reza, Pius Lustrilanang, dan Desmond Junaidi Mahesa menjadi korban penculikan.</p> <p>Prabowo dinilai tidak mencerminkan profesionalisme dalam pengambilan keputusan, juga tidak mencerminkan tanggung jawab komandan terhadap tugas dan prajurit. Prabowo juga dinilai mengabaikan etika perwira, sumpah prajurit, dan Sapta Marga. Kesimpulannya, Dewan Kehormatan Perwira menyebut Prabowo melanggar pidana yakni: ketidakpatuhan (Pasal 103 KUHPM), dan memerintah Dan Grup 4/Sandha Kopassus dan anggota Satgas Merpati serta Satgas Mawar untuk melakukan perampasan kemerdekaan orang lain (Pasal 55 (1) ke 2 j Pasal 333 KUHP) dan penculikan Pasal 55 (1) ke 2 jo Pasal 328 KUHP).³⁶</p> <p>Rekomendasi DKP tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Nomor 62/ABRI/1998 yang ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie (waktu itu) pada 20 November 1998 mengenai pemberhentian dengan hormat Letjen TNI (waktu itu) Prabowo Subianto dari dinas keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan hak pensiun perwira tinggi (PATI).³⁷</p>
--	--	--

³⁶

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/16/soal-bocoran-dokumen-dkp-franz-magnis-kritik-tni>, diakses 18 juni 2014

³⁷

<http://www.setkab.go.id/berita-13243-jubir-presiden-jelaskan-keppres-pemberhentian-prabowo-yang-bocor.html>, diakses 18 juni

	Pengalaman Organisasi	<p>Pengalaman Organisasi Prabowo:³⁸</p> <p>Ketua Yayasan Pendidikan bangsa (2001- Sekarang)</p> <p>Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) (2004-Sekarang). (Pencantuman pengalaman organisasi ini saat ini bermasalah).³⁹</p> <p>Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) (2004-Sekarang)</p> <p>Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) (2008-Sekarang)</p> <p>Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) (2008-Sekarang)</p>
	Pengalaman dalam pemerintahan	Prabowo belum memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan, Prabowo hanya memiliki pengalaman memimpin di militer. ⁴⁰
	Aktifitas tokoh dalam kegiatan kenegaraan	<p>Dari data yang ada terlihat bahwa Prabowo tidak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. Disamping itu, meskipun Prabowo terlibat dalam beberapa organisasi kemasyarakatan, dapat dilihat bahwa kepemimpinan Prabowo di beberapa organisasi tersebut juga tidak dimulai dari jenjang keanggotaan. Berikut hasil rekam jejaknya:</p> <p>Setelah diberhentikan dari militer, Prabowo meniti karir politik dari partai Golkar. Prabowo Subianto telah ikut serta dalam pemilu sejak tahun 2004. Pada</p>

³⁸ http://www.kpu.go.id/koleksigambar/daftar_rwyt_hdp_prabowo.pdf, diakses 10 Juni 2014

³⁹ Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) menyatakan capres Prabowo Subianto diduga telah melakukan pelanggaran hukum dan pembohongan publik karena mengaku-aku sebagai Ketua Umum HKTI Pusat. Sejak 2004 hingga 2009, Prabowo Subianto memang menjabat sebagai Ketua Umum HKTI. Namun setelah 2009, Oesman Sapta lah yang menjadi Ketua Umum, bukan Prabowo Subianto. Menurut Sekjen DPN HKTI Benny Pasaribu hanya ada satu organisasi HKTI yang diakui dan disahkan pemerintah berdasarkan SK Kemenkumham dan putusan kasasi MA tahun 2013, yakni HKTI yang ketua umumnya Oesman Sapta dan Sekjen Benny Pasaribu. Adapun Prabowo memang pernah mengajukan dua kali gugatan, namun kalah di tingkat kasasi. Namun, menurut Fadli Zon, Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto kembali terpilih sebagai Ketua Umum periode 2010-2015 secara aklamasi. Sebanyak 32 dari 33 Dewan Pimpinan Daerah menerima laporan pertanggungjawaban Prabowo dan meminta agar Prabowo kembali memimpin HKTI. Saat ini Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) versi Oesman Sapta mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Balai Kartini, Senin, 16 Juni 2014. Dikarenakan masalah ini calon presiden Prabowo Subianto dilaporkan Sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik (Tarik) ke Badan Pengawas Pemilu dan Markas Besar Polri atas dugaan penipuan. Prabowo diduga melakukan kebohongan publik dengan mengaku sebagai [Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia](#) (HKTI) pada formulir isian yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum... Lihat dalam <http://www.beritasatu.com/nasional/190462-hkti-sebut-prabowo-lakukan-kebohongan-publik.html>, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/513051-fadli-zon--dukung-joko-widodo-ik--itu-hkti-ilegal>, <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/16/269585415/Dipimpin-Prabowo-Kenapa-HKTI-Ini-Dukung-Jokowj>, diakses 18 Juni 2014

⁴⁰ Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada (UGM) Purwo Santoso menilai, kandidat presiden [Prabowo Subianto](#) sama sekali tidak memiliki pengalaman untuk menjadi pemimpin yang demokratis. Prabowo hanya memiliki pengalaman militer. Saat aktif di militer pun model pemerintahannya otoriter, lihat dalam <http://m.merdeka.com/pemilu-2014/prabowo-tidak-berpengalaman-jadi-pemimpin-demokratis.html>, diakses 20 Juni 2014

		<p>pemilu tahun 2004 Prabowo Subianto merupakan salah satu kandidat partai Golkar untuk menjadi calon Presiden, namun kalah diputaran akhir oleh Jenderal Wiranto.</p> <p>Tenggelam dalam partai berlambang pohon beringin ini, Prabowo memilih keluar dari Golkar. Posisi terakhirnya sebagai Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar.</p> <p>Prabowo kembali aktif di politik dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Lewat 'kendaraan politiknya' itu, Prabowo mencalonkan diri sebagai wapres mendampingi Capres Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009. Namun tak sesuai yang diharapkan, pasangan ini tak berhasil menang di Pilpres 2009, Kalah dari SBY-Budiono. Pada Pilpres 2014 ini, Prabowo kembali maju dan berpasangan dengan Hatta Rajasa.⁴¹</p>
	<p>Penghargaan dalam hal kenegaraan dan pemerintahan yang pernah diterima</p>	<p>Dari penelusuran rekam jejak, Prabowo hanya pernah menerima penghargaan di bidang militer, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bintang Kartika Eka Paksi Nararya⁴² Hingga saat ini belum diketahui informasi atas jasa apa Prabowo menerima penghargaan ini dan kapan Prabowo menerima penghargaan ini. 2. Satya Lencana Seroja Ulangan-III Satya Lencana Seroja adalah penghargaan yang dianugerahkan bagi anggota TNI/Polri pada periode 1975-1999 yang menanggulangi masalah batas negara di wilayah Nusa Tenggara Timur.⁴³ Tidak diketahui apakah Prabowo menerima penghargaan ini pada saat penempatan di Timor Timur, namun menurut hasil penelusuran

⁴¹ <http://pemilu.sindonews.com/read/871813/113/jejak-karier-militer-dan-politik-sang-jenderal>, diakses 19 Juni 2014

⁴² http://www.setneg.go.id/images/stories/image-news/kontributor/setmil/bintang_kartika_eka_pakci.pdf, diakses 9 Juni 2014

⁴³ http://id.wikipedia.org/wiki/Satyalencana_Seroja, diakses 9 Juni 2014

		<p>diketahui bahwa Prabowo pernah memimpin Den 28 untuk melakukan pembunuhan atas tokoh fretlin Nicolau Lobato.⁴⁴</p> <p>3. The First Class The Padin Medal Ops Honor dari Pemerintah Kamboja Hingga saat ini, tidak ada informasi yang jelas sehubungan dengan alasan pemberian penghargaan yang diterima Prabowo oleh otoritas Kamboja.</p> <p>4. Bintang Yudha Dharma Nararya Bintang Yudha Dharma Nararya merupakan bintang yang dianugerahkan kepada mereka yang mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan pengembangan serta menghasilkan karya yang dirasakan oleh pemerintah dan NKRI⁴⁵</p>
Independensi	afiliasi kelompok/ organisasi	<p>Prabowo adalah ketua dewan Pembina partai yang didirikannya Gerakan Indonesia Raya. Prabowo ditengarai memiliki kedekatan dengan kelompok 'preman' dan radikal. Ini dapat dilihat dari afiliasi kelompok yang mendukung. Prabowo didukung oleh Organisasi underbow Gerindra Gerakan Rakyat Indonesia Baru yang dipimpin oleh Hercules.⁴⁶ Selain itu, prabowo juga didukung oleh Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM) yang dipimpin oleh Umar Key.⁴⁷</p> <p>Selain itu, Organisasi-organisasi yang identik dengan perilaku kekerasan⁴⁸, seperti Forum Betawi Rempug (FBR), Front Pembela Islam (FPI), maupun Pemuda</p>

⁴⁴ <http://capres2014.org/profil/profil-capres-2014-prabowo-subianto/>, diakses 9 Juni 2014

⁴⁵ http://www.setneg.go.id/images/stories/image-news/kontributor/setmil/bintang_yudha_dharma.pdf, diakses 9 Juni 2014

⁴⁶ <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/16/064467394/Kisah-Hercules-Bos-Preman-dari-Tanah-Abang>, diakses 27 Mei 2014

⁴⁷ <http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/26/145438/2592522/1562/didukung-umar-key-cs-prabowo-darah-saya-setengah-indonesia-timur?991104topnews>, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2012/03/27/cerita-umar-kei-tentang-preman-maluku>, diakses 27 Mei 2014

⁴⁸ <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/01/269581584/FPI-dan-FBR-Dukung-Prabowo-Mahfud-Mereka-Bisa-Lunak>, diakses 10 Juni 2014; lihat juga <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/08/31/132533-kapolri-fpi-dan-fbr-dominasi-107-aksi-kekerasan-oleh-ormas-sejak-2007>, diakses 11 Juni 2014; dan http://www.portalkbr.com/nusantara/jakarta/3002832_4260.html, diakses 11 Juni 2014; <http://regional.kompas.com/read/2014/06/08/2139431/Ketua.FPI.Jateng-DIY.Saya.Sekuat.Tenaga.Dukung.Prabowo-Hatta>, diakses 11 Juni 2014

		<p>Pancasila (PP), juga menjadi pendukung pasangan Prabowo Hatta.⁴⁹ Dukungan FPI diberikan dengan syarat diantaranya adalah meneruskan perjuangan melawan maksiat dengan memperbanyak peraturan daerah syariah.⁵⁰</p> <p>Prabowo tercatat sebagai Dewan Kehormatan dari ormas GIBAS Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi),⁵¹ Ormas yang cenderung melakukan aksi kekerasan di sejumlah daerah.⁵²</p>
	<p>Keterkaitan dengan tokoh, tokoh politik atau partai politik</p>	<p>Prabowo Subianto dan Gerindra memiliki kedekatan dengan partai Aceh (dulu partai Gerakan Aceh Merdeka) yang dipimpin oleh Muzakir Manaf, wakil Gubernur Aceh saat ini. Muzakir Manaf menegaskan dukungannya kepada Prabowo karena Prabowo telah berkomitmen untuk membangun pabrik terbesar di Meulaboh, dan beberapa kilang pagi.⁵³</p> <p>Ketika mencalonkan diri menjadi presiden Prabowo didukung oleh beberapa partai diantaranya Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan PBB.Golkar. Beberapa partai seperti PKS dan PPP saat ini sedang tersandung persoalan korupsi.⁵⁴ Sementara Golkar adalah partai yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie, pemilik perusahaan Lapindo Brantas yang menenggelamkan Sidoarjo.⁵⁵</p> <p>Pasangan Prabowo Hatta mendapatkan dukungan dari Purnawirawan diantaranya Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) George Toisutta ,</p>

⁴⁹ <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/01/269581584/FPI-dan-FBR-Dukung-Prabowo-Mahfud-Mereka-Bisa-Lunak>,
<http://regional.kompas.com/read/2014/06/08/2139431/Ketua.FPI.Jateng-DIY.Saya.Sekuat.Tenaga.Dukung.Prabowo-Hatta>

⁵⁰ Dukungan FPI ini disertai syarat. Ketiga Partai Islam yang ada dalam koalisi pendukung Poros Prabowo harus memastikan Prabowo-Hatta meneruskan perjuangan mereka melawan kemaksiatan, membebaskan Indonesia dari paham impor seperti imperialisme dan liberalisme. Kelak jika terpilih, Pemerintahan Prabowo-Hatta juga tidak akan menolak pembentukan berbagai peraturan daerah (perda) syariah. Ia menegaskan, perda syariah harus diperbanyak, terutama yang memberangsang kemaksiatan.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/06/05/1126420/Syarat.FPI.Dukung.Prabowo.Perda.Syariah.Harus.Diperbanyak>

⁵¹ <http://gibas.groupsite.com/main/summary>, diakses 9 Juni 2014

⁵² <http://www.inilahkoran.com/read/detail/1927362/warga-3-desa-di-cikampek-bentrok-dengan-gibas>, diakses 9 Juni 2014 ;
<http://www.pikiran-rakyat.com/node/228444>, diakses 9 Juni 2014

⁵³ <http://wartaaaceh.com/muzakir-manaf-kita-dukung-prabowo-haram-dukung-pdi/>

⁵⁴ <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/30/063458015/LHI-Tersangka-Suap-Impor-Daging-ltu-Presiden-PKS>,

<http://www.jawapos.com/baca/artikel/1462/Menag-SDA-Jadi-Tersangka-Korupsi-Haji>, diakses 19 Juni 2014

⁵⁵ <http://politik.rmol.co/read/2014/06/09/158754/Prabowo-Disarankan-Tidak-Ajak-ARB-Lagi->

<http://www.tempo.co/read/news/2014/03/27/063565959/Aburizal-Bakrie-Berkukuh-Lapindo-Tidak-Bersalah>,

<http://regional.kompas.com/read/2014/05/28/1345541/Trauma.dengan.lcal.Korban.Lapindo.Ogah.Teken.Kontrak.dengan.Prabowo> diakses 19 Juni 2014

		<p>Letjen (Purn) Yunus Yosfiah, Laksamana (Purn) Widodo Adi Sutjipto, Letjen (Purn) Cornel Simbolon, Nachrowi Ramli.⁵⁶</p> <p>Terdapat beberapa nama pemilik modal/pengusaha pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta, diantaranya:⁵⁷</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hashim Djojohadikusumo, Altet, dan pengusaha internasional Hashim menjadi Ketua Dewan Pembina Gerbang dan juga Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia. Dia seorang wiraswasta dan pemilik perusahaan Arsari Group yang bergerak dalam bidang pertambangan, program bioetanol, perkebunan karet, dan lainnya. Dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Hashim menjadi anggota Dewan Penasihat. Dia memiliki kekayaan senilai US\$ 700 juta. Dia juga punya jaringan ke pengusaha internasional. 2. Hary Tanoesoedibjo dan MNC Group Dia adalah bos media di Indonesia lewat MNC Group miliknya. Ia bergabung dengan tim sukses Prabowo-Hatta setelah menyatakan diri keluar dari Partai Hati Nurani Rakyat pimpinan Wiranto. Dengan kekayaan US\$ 1,2 miliar, Hary menjadi orang terkaya ke-17 di Indonesia. Dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Hary duduk sebagai anggota Dewan Pakar. 3. Sandiaga Uno dan Hipmi Dia menjadi salah satu juru bicara dalam tim sukses Prabowo-Hatta. Pengusaha muda ini pernah tercatat memiliki kekayaan sebesar US\$ 460 juta. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang beranggotakan lebih dari 30 ribu pengusaha ini juga aktif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia sempat menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Bidang Uaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Kadin Indonesia.
--	--	--

56

<http://www.merdeka.com/politik/barisan-jenderal-di-belakang-prabowo-hatta.html>

57

<http://www.tempo.co/read/fokus/2014/06/04/2952/Adu-Kuat-Taipan-di-Belakang-Prabowo-dan-Jokowi>, diakses 20 Juni 2014

	Koneksi dengan negara asing	<p>Prabowo memiliki kedekatan khusus dengan Raja Yordania, Abdullah II. keduanya adalah kawan lama dan mereka berdua sama-sama alumni Fort Banning (Lembaga Militer Amerika yang mencetak pasukan khusus)⁵⁸. Prabowo banyak memperoleh bantuan dari raja Yordania saat ia berdiam di Yordania selama kurang lebih dua tahun selepas ia diberhentikan dari dinas militer.⁵⁹</p> <p>Prabowo dikabarkan memiliki kewarganegaraan ganda. Pada 1998, Prabowo mendapatkan anugerah dari Raja Yodrania Hussein melalui dekrit raja yang isinya pemberian status kewarganegaraan kepada seorang warga negara Indonesia bernama Prabowo Subianto Kusumo. Akhir Desember 1998. Prabowo sendiri, dalam suratnya yang dimuat berbagai media di Jakarta, mengaku "tak bisa menerima" kewarganegaraan Yordania itu.⁶⁰ KPU tidak mempersoalkan masalah kewarganegaraan ini, karena prabowo telah memenuhi syarat yakni keterangan dari kemenkumham tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas permintaan sendiri.⁶¹</p> <p>Khalayak internasional mempersepsikan Prabowo Subianto jika terpilih akan menghadapi permasalahan dalam politik internasional dikarenakan masih banyak pertanyaan apakah dia bisa masuk ke semua negara karena latar belakangnya yang terkait dengan hak asasi manusia?⁶² New York Times memberitakan soal penolakan AS terhadap <u>Prabowo Subianto</u> apabila menjadi presiden. Amerika Serikat sangat keberatan</p>
--	-----------------------------	---

58 <http://news.liputan6.com/read/836648/bertemu-prabowo-subianto-dan-raja-yordania-hormat-ala-militer>

59 <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/26/078557629/Sebelum-ke-SBY-Raja-Yordania-Reuni-dengan-Prabowo>

60 <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/22/269579548/KPU-Akan-Cek-Status-Kewarganegaraan-Prabowo>,

<http://nasional.kompas.com/read/2009/06/15/21123830/fadli.bantah.prabowo.berkewarganegaraan.ganda>,

<http://news.metrotvnews.com/read/2014/04/30/236820/5-alasan-aktivis-98-tolak-pencapresan-prabowo>, diakses 25 Mei 2014

61 <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/25/269580200/KPU-Tak-Persoalkan-Kewarganegaraan-Prabowo>,

<http://www.pemilu.com/berita/2014/05/ini-jawaban-kpu-soal-kewarganegaraan-ganda-prabowo-2/>, diakses 25 Mei 2014

62 http://www.portalkbr.com/berita/luarnegeri/3260315_4213.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter, diakses 27 Mei

2014

		apabila Prabowo nantinya menjadi orang nomor satu di Indonesia. ⁶³
	Koneksi dengan pemiliki modal/ investor asing	<p>Hasyim Djojohadikusumo, Adik Prabowo adalah pengusaha tambang yang masuk dalam jajaran 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2012 dengan kekayaan sebesar 750 juta dolar AS.⁶⁴</p> <p>Prabowo dan adiknya Hasyim memiliki kedekatan dengan investor asing Nat Rothschild.⁶⁵ Rothschild adalah salah satu orang terkaya di dunia. Indikasi kedekatan mereka dapat dilihat dari kisruh di Perusahaan Bumi Plc antara Rothschild dengan Bakrie.⁶⁶ Rotschild memproyeksikan adik Prabowo sebagai salah satu direksi di Bumi Plc.⁶⁷</p> <p>Terkait dengan kasus BLBI, Hasyim juga pernah ditahan atas dugaan kasus pelanggaran BMPK Bank Industri sebesar Rp 4 miliar. Seharusnya BLBI itu diberikan kepada pihak ketiga, namun dana tersebut diberikan kepada grup perusahaanya.⁶⁸</p>
keterlibatan dalam kasus hukum, pelanggaran etik atau pelanggaran HAM	Diduga atau diisukan terlibat dalam kasus hukum diduga atau diisukan terlibat dalam kasus pelanggaran HAM diduga atau terkait dengan pelanggaran Kode etik	<p>Pada tahun 1990-an, Prabowo diduga terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur. Pada tahun 1995, ia diduga menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil^[7]. Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem <u>Timor Timur</u> saat itu, Kolonel Inf <u>Kiki Syahnakri</u>, di kantor Pangdam IX Udayana. Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan^[8]</p> <p>Pada tahun <u>1997</u>, Prabowo diduga mendalangi <u>penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi</u>^[10]. Setidaknya 13 orang, termasuk seniman 'Teater</p>

⁶³ <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/01/hubungan-baik-indonesia-as-terancam-memburuk-jika-prabowo-jadi-presiden>

⁶⁴ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/12/02/meedux-inilah-daftar-orang-terkaya-indonesia-versi-forbes-2012>
<http://biografi-pengusaha.blogspot.com/2013/10/hashim-djojohadikusumo-orang-terkaya-di.html>

⁶⁵ <http://profil.merdeka.com/mananegara/n/nathaniel-philip-rothschild/>, diakses 20 Juni 2014

⁶⁶ <http://economy.okezone.com/read/2012/11/03/278/713187/rothschild-prabowo-sudah-bertemu-bahas-konsorsium>, diakses 20 Juni 2014

⁶⁷ <http://economy.okezone.com/read/2013/02/19/278/764126/cerita-perkenalan-nat-rothschild-dan-hashim-djojohadikusumo>, diakses 20 Juni 2014

⁶⁸ <http://news.liputan6.com/read/31509/hashim-djojohadikusumo-meninggalkan-rutan-salemba>, diakses 18 Juni 2014

	<p>Rakyat' <u>Widji Thukul</u>, aktivis <u>Herman Hendrawan</u>, dan <u>Petrus Bima</u> hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Mereka diyakini sudah meninggal.^[11] Prabowo sendiri mengakui memerintahkan <u>Tim Mawar</u> untuk melakukan penculikan kepada sembilan orang aktivis, diantaranya <u>Haryanto Taslam</u>, <u>Desmond J Mahesa</u> dan <u>Pius Lustrilanang</u>.^[12] Prabowo dicopot dari jabatannya oleh Presiden <u>Habibie</u> melalui mantan Pangab <u>Wiranto</u> karena keterlibatan oknum Kopassus dalam kasus penculikan sejumlah aktivis LSM dan pelanggaran HAM.</p> <p>Ketika bertugas sebagai prajurit tempur di Timor-Timur, Prabowo dan pasukannya menembak Presiden Fretilin Nicolao Lobato dalam sebuah operasi khusus di Timor Timur pada 1976- 1978.⁶⁹</p> <p>Prabowo Dengan mengambilalih konsesi Kiani Group seluas 53 ribu ha dari Bob Hasan, Prabowo ikut melanggengkan penghancuran hutan Kaltim.</p> <p>Di Aceh, Prabowo & adiknya, Hasyim Djojohadikusumo menguasai hutan seluas 97 ribu ha di Aceh Tengah melalui PT Tusam Hutan Lestari, sumber bahan baku pabrik kertas PT Kertas Kraft Aceh (KKA). Padahal pinus sangat tidak ramah lingkungan.</p> <p>Di Kaltim, kakak beradik Prabowo & Hashim menguasai lebih dari satu juta hektar konsesi hutan dan tambang batubara, dan masih berencana membuka 700 ribu ha kebun aren (Warta Ekonomi, 9-22 Maret 2009, Laporan Khusus tentang Duet Bisnis & Politik, Hashim Djojohadikusumo & Prabowo Subianto).</p> <p>Di Papua, Hashim, mengeksplorasi gas dari Blok Rombobai seluas 11.5900 km2 di Kabupaten Yapen , yang diperkirakan memiliki kandungan gas lebih dari</p>
--	---

69

<http://www.kabarnews.com/printFriendly.cfm?articleID=32949>. diakses senin, 08 juni 2014.

		<p>15 trilyun kaki kubik (idem), dan dapat berdampak negatif bagi nelayan di Teluk Sairera.⁷⁰</p> <p>Masih di Papua, Hashim berencana membuka perkebunan padi (rice estate) seluas 585 ribu ha dan perkebunan aren seluas 800.000 ha di Kabupaten Merauke (idem). Berarti, bersama adiknya, Hashim Djojohadikusumo, Prabowo Subianto sudah menguasai lebih dari tiga juta hektar perkebunan, konsesi hutan, tambang batubara dan ladang migas dari Aceh sampai ke Papua, dan masih berencana membuka 1,5 juta hektar lagi di Kaltim dan Merauke.⁷¹</p> <p>Prabowo dicopot dari jabatannya oleh Presiden <u>Habibie</u> melalui mantan Pangab <u>Wiranto</u> karena keterlibatan oknum Kopassus dalam kasus penculikan sejumlah aktivis LSM dan pelanggaran HAM. Ketika bertugas sebagai prajurit tempur di Timor-Timur, Prabowo dan pasukannya menembak Presiden Fretilin Nicolao Lobato dalam sebuah operasi khusus di Timor Timur pada 1976- 1978.⁷²</p> <p>Salah satu peristiwa penting yang diakui sendiri oleh Prabowo adalah terkait pemecatan dirinya saat menjabat sebagai Komandan Pasukan Khusus dari dinas militer bersama dengan Muchdi PR, dan Kolonel Chairawan karena dianggap bertanggung jawab atas penghilangan paksa sejumlah aktivis mahasiswa.. Prabowo mengakui ia menculik sembilan orang aktivis dan sudah dilepaskan, namun ia mengatakan tidak bertanggungjawab atas hilangnya aktivis lain.⁷³ Sejak saat itu, ia pergi ke Yordania selama kurang lebih dua tahun⁷⁴. Kepergiannya ke Yordania ditengarai sebagai upaya lari dari tanggung jawab.</p> <p>Selain itu, masih seputar kasus penculikan aktivis,</p>
--	--	--

⁷⁰ Warta Ekonomi, 9-22 Maret 2009, Laporan Khusus tentang Duet Bisnis & Politik, Hashim Djojohadikusumo & Prabowo

Subianto

⁷¹ Rekam Jejak Capres-cawapres di bidang lingkungan, GJ. Aditjontro

⁷² <http://www.kabarnews.com/printFriendly.cfm?articleID=32949>, diakses senin, 08 juni 2014.

⁷³ Tempo 3 November halaman 35

⁷⁴ Tempo 3 November halaman 29

		<p>pengadilan militer telah menjatuhkan hukuman penjara kepada 11 orang anggota tim mawar yang berasal dari kesatuan elit kopassus yang dipimpin oleh Prabowo, akan tetapi Prabowo bersama Muchdi PR hanya dipecat dari dinas militer tanpa pernah diadili.⁷⁵</p> <p>Masih terkait dengan kasus penculikan, prabowo mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugas pada saat melakukan penculikan. Selanjutnya, ayah prabowo Sumitro Djojohadikusumo sempat mengatakan kepada tempo sebelum wafat bahwa soeharto yang memerintahkan penculikan itu untuk meredakan kian luasnya desakan mundur kepada soeharto⁷⁶. Dari keterangan ayah prabowo, terlihat bahwa sebagai Pangkostrad pada saat itu prabowo memilih untuk melaksanakan perintah presiden soeharto untuk melakukan penculikan</p> <p>Saat menjabat sebagai panglima komando cadangan strategis angkatan darat pada 21 Mei 1998 Prabowo diduga menggerakkan pasukan sebanyak 11 ribu personel untuk merangsek ibukota termasuk rumah BJ Habibie tanpa kordinasi dengan Panglima ABRI⁷⁷</p> <p>Dalam buku detik-detik yang menentukan, mantan presiden BJ Habibie mengutarakan bahwa ia menerima laporan dari Pangab (Jenderal Wiranto) terkait adanya gerakan kostrad kearah jakarta dan hal tersebut terjadi diluar pengetahuan Pangab. Seketika itu, BJ Habibie memerintahkan wiranto untuk mengganti pangkostrad (Prabowo) dan memerintahkan penggantinya yang baru untuk menarik pasukannya.⁷⁸Tindakan prabowo ini dianggap oleh Habibie sebagai bentuk pelanggaran atas “saptamarga” dan sumpah prajurit.⁷⁹</p> <p>Prabowo dianggap tidak layak menjadi presiden</p>
--	--	--

75 Tempo 3 November halaman 44
76 Tempo 3 november 44
77 Tempo 3 November 45
78 BJ Habibie detik-detik yang menentukan hlm. 99
79 Bj Habibie 116

		<p>karena pernah dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat dari TNI.⁸⁰ Menurut Wiranto, Prabowo dipecat secara tidak hormat oleh Dewan Kehormatan karena penculikan aktifis⁸¹.</p> <p>Pada pertengahan tahun 2005 mencuat kasus kredit macet sebesar 1.8 Triliun yang diduga merugikan keuangan negara dengan kreditur Bank Mandiri. Kredit sebesar 1.8 Triliun tersebut diantaranya diduga diberikan kepada PT Kiani Kertas yang dipimpin oleh Prabowo Subianto⁸²</p> <p>Prabowo sempat dipanggil oleh kejakung sebagai saksi dan diperiksa terkait kasus tersebut.⁸³ pada tahun 2011 Kejaksaan mengeluarkan SP3 atas kasus tersebut karena tidak cukup bukti⁸⁴</p> <p>Ditolak oleh kalangan masyarakat maupun aktifis hak asasi manusia karena dinilai terlibat sebagai pelaku pelanggaran HAM masa lalu⁸⁵</p>
Sikap terhadap Keberagaman dan masyarakat minoritas	Apakah bisa diterima oleh semua golongan dan Mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan	Dalam suatu wawancara dengan stasiun TV, Prabowo berkomentar terkait pertanyaan konflik berkeyakinan dan Ahmadiyah. Prabowo mengatakan bahwa kuncinya adalah pendidikan, karena apabila pendidikan nasional baik maka pemikiran-pemikiran yang sesat bisa dicegah ⁸⁶
	Sikap terhadap Keberagaman dan masyarakat minoritas?	Prabowo menolak hasil sidang dewan jabatan dan karier di Mabes TNI terkait pengalihan Jabatan sebagai Danjen Kopassus yang diusulkan akan dioper dari Prabowo kepada Brigadir Jendral Suwisma karena alasan beragama berbeda dengan mayoritas prajurit koppersus. Akhirnya Suwisma dicoret dan digantikan dengan Muchdi Purworanjono. ⁸⁷

80

<http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/24/269579973/Luhut-TNI-yang-Dipecat-Masak-Mau-Jadi-Presiden>,

<http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/26/269580382/Pernah-Dipecat-Pengamat-Prabowo-Tak-Layak-Capres> , diakses 26 Mei 2014

81

<http://www.merdeka.com/politik/buka-bukaan-wiranto-soal-pemecatan-prabowo-dan-penculikan/prabowo-diberhentikan-karena-penculikan.html>, diakses 20 Juni 2014

82

<http://www.tempo.co/read/news/2005/07/05/05563444/Prabowo-Mengaku-Inginkan-Selamatkan-Kiani-Kertas>

83

<http://news.detik.com/read/2005/06/27/133415/390602/10/kejakung-segera-periksa-prabowo?nd771104bcj>

84

<http://www.tempo.co/read/news/2011/07/06/063345231/Kejakung-Hentikan-Penyidikan-Korupsi-PT-Kiani>

85

<http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/26/269573351/Koalisi-Masyarakat-Sipil-Tolak-Prabowo-Nyapres>,

86

http://video.tvonenews.tv/arsip/view/82960/2014/04/26/koalisi_masyarakat_sipil_tolak_capres_pelanggar_ham.tvOne,

87

<http://www.youtube.com/watch?v=02uQvy0TddU> Wawancara Prabowo Subianto dalam Acara TOKOH di TV One

87

<https://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/dituding-ganjil-prabowo-lewat-dkp-ini-jawaban-wiranto-031848102.html>,

diakses 18 juni 2014

		<p>Pada saat Prabowo Subianto dicopot sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat oleh Presiden Habibie, Wiranto selaku Panglima ABRI menunjuk Jhonny Lumintang sebagai penggantinya, namun prabowo menolaknya dengan tegas karena alasan agama.⁸⁸</p> <p>Partainya Gerindra memiliki manifesto yang menegaskan, perlunya memurnikan ajaran agama.⁸⁹</p> <p>Jika terpilih menjadi Presiden RI, Prabowo Subianto berjanji akan menertibkan kelompok Syiah dan Ahmadiyah, karena dinilai dapat menciptakan instabilitas bangsa.⁹⁰ Sementara dalam kesempatan yang lain, adik calon presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa Prabowo berkomitmen untuk melindungi minoritas seperti Ahmadiyah, Muslim Syiah dan Kristen di Indonesia, dalam upaya untuk mempertahankan pluralisme dan Pancasila.⁹¹</p> <p>Saat ini Prabowo didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki catatan diskriminatif di Kementerian Pertanian. Berdasarkan video yang diunggah di YouTube oleh akun GerindraTV pada 14 Oktober 2013, dikatakan oleh Adik Prabowo bahwa Hashim menyebut bahwa sikap PKS yang memecat 73 karyawan Kristen di Kementerian Pertanian selama sembilan tahun sebagai tindak diskriminasi.⁹²</p> <p>Dalam kasus penolakan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli. Prabowo berpendapat, penolakan yang berdasarkan agama merupakan permasalahan serius. Prabowo mengajak masyarakat kembali memahami dan meresapi makna kebinekaan kemudian konsekuen melaksanakannya. Menurut</p>
--	--	---

⁸⁸ Tempo edisi 28 Oktober - 3 November 2013. Hal 45

⁸⁹ Manifesto Gerindra Hal.40, lihat juga <http://www.merdeka.com/peristiwa/pemurnian-agama-dalam-manifesto-gerindra-menuai-kritik.html>, diakses 18 Juni 2014

⁹⁰ http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/05/25/22103/ganggu-stabilitas-bangsa-prabowo-akan-tertibkan-syiah-dan-ahmadiyah.html#.U4P8FHJ_vlk, diakses 27 Mei 2014

⁹¹ Beberapa pengamat politik seperti Yunarto Wijaya dari Charta Politika dan Arbi Sanit dari Universitas Indonesia tidak yakin, Komentar Hasyim tersebut benar-benar mencerminkan pandangan Prabowo dan malah menunjukkan inkonsistensi Prabowo.

<http://www.jurnalislam.com/nasional/read/88/adik-prabowo-prabowo-akan-bela-ahmadiyah-dan-syi-ah.html>,

<http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/09/janji-prabowo-lindungi-syiah-dan-ahmadiyah-diapresiasi-sekaligus-ditagih>, diakses 9 Juni 2014

⁹² <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/02/269581854/>, diakses 18 Juni 2014

		dia, semboyan ini sejak dulu telah mengikat suku, ras, dan etnis di Indonesia menjadi satu. ⁹³
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan hak-hak dasar buruh, upah, jamsostek, keselamatan kerja 2. Jaminan kebebasan hak berserikat 3. Kebijakan upah Tingkat pengangguran 	<p>Sebagai seorang pengusaha, Prabowo Subianto sangat dekat kaitannya dengan hak atas pekerjaan. Terkait upah Buruh, Prabowo pernah menyindir para buruh Indonesia yang meminta kenaikan upah yang sangat tinggi, Prabowo beranggapan buruh seharusnya bisa mengerti kondisi perusahaan dan ekonomi Indonesia saat ini. Menurut Prabowo jika memaksakan, ujung-ujungnya buruh juga yang dirugikan karena menganggur sebagai akibat pengusaha menutup perusahaannya dan pindah keluar negeri.⁹⁴</p> <p>Rupanya pernyataan sikap Prabowo diatas sejalan dengan tindakannya dalam mengelola perusahaan. sekitar 600 buruh perusahaan PT Kertas Nusantara menuntut Prabowo selaku pemegang saham mayoritas untuk membayarkan upah mereka yang belum terbayar selama 5 bulan sampai dengan 9 bulan.⁹⁵</p> <p>LBH menerima laporan dari 13 orang pekerja dari PT Kiani Lestari, perusahaan kayu Prabowo yang beroperasi di Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pada Maret 2012, mereka mengadakan upaya perusahaan milik Prabowo tersebut yang memaksa karyawannya untuk mengundurkan diri dengan janji akan membayar tunggakan gaji sejak Agustus 2011-Januari 2012. "Namun setelah mereka mundur ternyata janji tersebut tidak dipenuhi."⁹⁶</p> <p>Tidak hanya masalah upah, Prabowo juga banyak berkomentar terkait sistem Outsourcing. Prabowo mengatakan bahwa outsourcing harus dihapus</p>

⁹³ <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/29/078517486/Prabowo-Komentari-Demo-Lurah-Susan>, diakses 18 Juni 2014

⁹⁴ <http://finance.detik.com/read/2012/12/18/142130/2121436/4/1/prabowo-sentil-buruh-jangan-minta-gaji-naik-terlalu-tinggi>, diakses 18 Juni 2014

⁹⁵ <http://www.tempo.co/read/news/2014/01/20/058546632/5-Bulan-Tak-Digaji-Karyawan-Prabowo-Subianto-Mogok>,

<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/476108-telat-bayar-gaji-karyawan--direktur-pt-kertas-nusantara-minta-maaf> diakses 18 Juni 2014

⁹⁶ <http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/inilah-dosa-prabowo-terhadap-buruh/>, diakses 21 Mei 2014

		karena lebih banyak merugikan pekerja. Prabowo juga menyalahkan pemerintah yang mengatakan bahwa permasalahan ini timbul karena pemerintah yang terlalu menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Lebih lanjut juga prabowo mengatakan bahwa outsourcing tidak pancasilais dan tidak manusiawi. Prabowo menyatakan dirinya calon presiden yang satu-satunya menolak sistem kerja alih daya (outsourcing). ⁹⁷
Sikap Terhadap Hak Atas Perumahan	Pandangan dan sikap terhadap masalah penyediaan rumah yang layak bagi rakyat dan penggusuran paksa	Sepanjang penelusuran kami, Prabowo tidak memiliki rekam jejak maupun pernyataan dalam isu ini.
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas Pendidikan	Pandangan tokoh terkait Ketersediaan, Keterjangkauan, kesesuaian, dan Kualitas pendidikan	<p>Sebelum mencalonkan diri sebagai Presiden, tidak ditemukan informasi mengenai pandangan dan sikap prabowo terhadap pemenuhan hak atas pendidikan masyarakat. Meskipun demikian, sebagai ketua dewan Pembina partai, Manifesto Gerindra dapat menjadi rujukan bagaimana prabowo akan bersikap mengenai hak atas pendidikan. Dalam manifesto perjuangan partai Gerindra dibahas permasalahan pendidikan. Gerindra mengatakan bahwa pendidikan tingkat menengah harus lebih dijuruskan pada pendidikan kejuruan terutama teknik dan ekonomi yang bisa langsung terserap dunia kerja. Partai Gerindra mengusung konsep pendidikan siap pakai di tingkat sekolah lanjutan yang dapat menciptakan lulusan siap kerja.</p> <p>Partai Gerindra juga mengatakan bahwa untuk mampu bersaing dalam persaingan global pendidikan harus mengutamakan kualitas, sehingga wajib belajar 12 tahun hingga sampai ke pendidikan tingkat atas akan menjadi prioritas partai Gerindra dalam mencerdaskan bangsa.</p> <p>Gerindra juga mengatakan akan memperjuangkan pembangunan sistem pendidikan yang humanis, bukan pendidikan yang dapat menjadikan pendidikan sebagai awal dari stratifikasi sosial.</p>

		<p>Pendidikan merupakan hak dasar masyarakat dan bukanlah komoditas perdagangan yang diperjualbelikan namun merupakan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan rakyatnya.</p> <p>Saat maju menjadi calon wakil presiden pada tahun 2009 bersama Megawati, Prabowo juga berkomitmen untuk menghapuskan ujian nasional.</p>
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan layanan kesehatan dalam jumlah bagi seluruh penduduk 2. Aksesibilitas atas layanan kesehatan baik secara keuangan geografis dan budaya 3. Kualitas layanan kesehatan yang harus sesuai dengan standar yang ditentukan 4. Kesetaraan dalam layanan kesehatan 	<p>Terkait dengan kesehatan, sepanjang penelusuran kami, Prabowo tidak memiliki rekam jejak maupun pernyataan di bidang ini.</p>
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan hukuman mati 2. Pandangan terkait penggunaan hukuman mati 	<p>Isu hukuman mati belakangan menjadi salah satu isu diperhatikan oleh Prabowo Subianto, terkait hukuman mati yang mengancam tenaga kerja Indonesia, Wilfrida Soik. Prabowo diberitakan ikut mendukung upaya mebebaskan wilfrida dari ancaman hukuman mati.</p> <p>Namun, keterlibatan dalam advokasi yang dilakukan prabowo untuk membebaskan wilfrida dari hukuman mati dianggap klaim dan sudah terlambat karena telah berjalan kurang lebih selama 4 tahun dan selama waktu itu banyak pihak yang telah lebih dahulu mengadvokasi wilfrida.⁹⁸</p>

⁹⁸

Calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai tak memiliki visi-misi tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Namun, Prabowo mengklaim pembebasan Wilfrida Soik, seorang TKI dari hukuman gantung di Negeri Jiran, berkat jasanya. Padahal, kata dia, yang mengadvokasi dan menginvestigasi kasus itu sejak 2010 adalah Migrant Care, <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/30/269581145/Migrant-Care-Prabowo-Menculik-Kasus-Wilfrida>, <http://www.tempo.co/read/news/2014/04/08/173568767/Migrant-Care-Wilfrida-Bebas-Prabowo-Baru-Belakangan-Ikut-Bantu>, http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3201457_4202.html#diakses, 26 Mei 2014.

<p>Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan dimuka hukum 2. Sikap terhadap pembaharuan KUHP-KUHAP 3. Hak Atas Bantuan Hukum 4. Sikap terhadap korupsi peradilan 	<p>Prabowo Subianto dinilai telah melakukan pembangkangan hukum karena tidak datang untuk diperiksa oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM pernah memanggil Prabowo untuk diperiksa terkait kasus penculikan aktivis oleh Kopassus. "Tapi, Prabowo tidak datang."⁹⁹</p>
<p>Sikap terhadap penegakan Hukum dan Pelanggaran HAM masa lalu</p>	<p>Bagaimana sikap dan pandangan calon kepada penegakan hukum?</p>	<p>Sikap prabowo terhadap penegakan hukum yang jujur dan adil sangat diwarnai nuansa conflict of interest. Prabowo kerap disebut-sebut bertanggung jawab atas penculikan aktifis, kerusuhan may bahkan upaya kudeta terhadap presiden BJ Habibie.</p> <p>Yang paling terlihat jelas adalah terkait pencopotannya dari dinas militer, dimana ia dan tim mawar mengakui penculikan, namun tim mawar diproses di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara sedangkan ia hanya dikenakan sanksi administratif.</p> <p>Dalam wawancara dengan tempo (saat ditanyakan terkait pengusutan kasus munir), prabowo mengatakan akan memperbaiki sistem hukum dan menyerahkan permasalahan kepada sistem hukum¹⁰⁰.</p> <p>Sebagai ketua dewan pembina partai Gerindra, Prabowo Subianto menegaskan akan memecat kader-kadernya yang melanggar hukum dan terbukti bersalah.¹⁰¹ Salah satu contohnya adalah pemecatan kader partai Gerindra anggota DPRD Sulawesi Selatan yang diduga melakukan pemukulan terhadap seorang perempuan¹⁰².</p> <p>Menarik pula untuk disimak manifesto perjuangan</p>

⁹⁹ http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=326457:prabowo-tak-penuhi-panggilan-komnas-ham&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91, diakses 18 Juni 2014

¹⁰⁰ Tempo halaman 50

¹⁰¹ <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/20/prabowo-ancam-pecat-kader-gerindra-yang-melanggar-hukum>

¹⁰² <http://www.celebesnews.com/2013/09/20/rudiyanto-pecat-chalik-suang-dari-gerindra/>

		partai gerindra yang mengatakan bahwa pengadilan HAM adalah sesuatu yang berlebihan karena hukum dan kemanusiaan tidak boleh dipandang sebagai dua substansi yang terpisah, yaitu negara menghormati hak warga negara dan bagian dari organisasi negara harus menghormati hak negara. ¹⁰³
	Sikap terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu	Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Prabowo terlibat dalam kasus pelanggaran HAM seperti penculikan aktivis 98. ¹⁰⁴ Terkait dengan sikap Prabowo, berdasarkan hasil penelusuran kami, Prabowo menyatakan bahwa Pengadilan HAM ad hoc tidak penting karena pengadilan militer sudah menjerat pelaku pelanggaran HAM. ¹⁰⁵ Prabowo di hadapan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI dan Polri (FKPPI) menjanjikan akan memberikan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto jika dirinya terpilih sebagai presiden. ¹⁰⁶
Sikap terhadap Pemberantasan KKN	Tidak melakukan atau diopinikan melakukan KKN atau suap	Sepanjang hasil penelusuran kami, Prabowo tidak pernah disukan ataupun diopinikan terlibat dalam kasus KKN ataupun suap. Namun pada masa orde baru seperti yang telah dijelaskan di atas, jenjang karier militer Prabowo terbilang cukup sukses dan pesat. Diduga hal ini dikarenakan Prabowo ketika itu menikahi putri Soeharto yaitu Titiek. ¹⁰⁷
	Komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Terkait komitmen dalam pemberantasan korupsi, Prabowo mengatakan akan dengan tegas memecat kader gerindra yang terlibat korupsi. Komitmen prabowo dalam pemberantasan korupsi juga ia tunjukkan saat rapat dengan para kader Gerindra, Prabowo mengingatkan para kader yang menempati

¹⁰³ Manifesto gerindra

¹⁰⁴ Ibid, Hal. 27

¹⁰⁵ <http://www.tempo.co/read/news/2013/07/02/078493032/Pelanggaran-HAM-Wiranto-dan-Prabowo-Berbeda-Sikap>, diakses 18

Juni 2014

¹⁰⁶ Menurut Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, janji Prabowo jika menjadi presiden akan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional itu berat untuk dilaksanakan. Sebab, orang yang menentang masih agresif. "Prabowo blunder. Hal itu dibuat oleh Prabowo pribadi bukan tim kampanyenya. Harusnya Prabowo tidak membuat janji," jelasnya. "Menurut saya, Soeharto itu mempunyai jasa yang besar, namun mempunyai masalah untuk dijadikan pahlawan, yakni persoalan korupsi dan HAM berat yang belum tuntas," tandasnya.

¹⁰⁷ <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/06/06/263610/Kontroversi-Gelar-Sang-Jenderal-Besar->, diakses 18 Juni 2014

Lihat hal 21

		<p>posisi penting (DPR) untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh rakyat.¹⁰⁸ Gerindra juga mendapatkan penghargaan dari TII (Transparency International Indonesia dan ICW sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik</p> <p>Prabowo dalam wawancara bersama Tempo juga mengatakan bahwa korupsi adalah penyakit yang bisa meruntuhkan negara, prabowo berpendapat salah satu cara perbaikannya adalah dengan memperbaiki kualitas hidup 50-60ribu pejabat di Indonesia</p> <p>Prabowo dikritik tidak serius dengan program pemberantasan korupsi yang mereka usung karena memojokkan KPK dan membela Ketua Umum PPP, anggota koalisi yang juga Menteri Agama Suryadharma Ali yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013.¹⁰⁹</p> <p>Menurut Prabowo Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan cara menambah penyidik KPK (Lihat Manifesto)</p> <p>Selain itu, partai-partai pengusung prabowo didominasi oleh partai yang tokoh didalamnya banyak tersandung masalah korupsi.¹¹⁰</p> <p>Prabowo di hadapan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI dan Polri (FKPPI) menjanjikan akan memberikan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto jika dirinya terpilih sebagai presiden.¹¹¹</p>
--	--	--

¹⁰⁸ <http://news.okezone.com/read/2012/02/06/339/570674/prabowo-kader-gerindra-jangan-terlibat-korupsi>

¹⁰⁹ <http://www.tempo.co/read/news/2014/05/26/078580315/Pertahankan-Tersangka-Korupsi-Prabowo-Dikritik>,

<http://www.merdeka.com/peristiwa/icw-kritik-prabowo-karena-bela-suryadharma-soal-korupsi-haji.html> diakses 26 Mei 2014

¹¹⁰ <http://www.koran-jakarta.com/?14162-prabowo%20dinilai%20tersandera%20kasus%20korupsi%20para%20pendukungnya>, diakses

18 Juni 2014

¹¹¹ Menurut Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, janji Prabowo jika menjadi presiden akan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional itu berat untuk dilaksanakan. Sebab, orang yang menentang masih agresif. "Prabowo blunder. Hal itu dibuat oleh Prabowo pribadi bukan tim kampanyenya. Harusnya Prabowo tidak membuat janji," jelasnya. "Menurut saya, Soeharto itu mempunyai jasa yang besar, namun mempunyai masalah untuk dijadikan pahlawan, yakni persoalan korupsi dan HAM berat yang belum tuntas," tandasnya.

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/06/06/263610/Kontroversi-Gelar-Sang-Jenderal-Besar>, diakses 18 Juni 2014

2. Hatta Rajasa

Indikator Integritas	Cara mengukur	Data rekam jejak
Profil , Latar Belakang dan Kepribadian Calon	Tempat Tanggal Lahir	lahir pada tanggal 18 Desember 1953.
	Alamat	Gd Utama, Lt III Dep. Keuangan, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta ¹¹²
	Nama Istri dan Anak	Istrinya bernama Oktiniwati Ulfa Dariah, dari pernikahannya Hatta dikaruniai 4 orang anak, Reza, Aliya, Azimah dan Rasyid
	Latar belakang pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA Negeri 4 Palembang 2. Insinyur Teknik Perminyakan angkatan 1973 <u>Institut Teknologi Bandung (ITB)</u> 3. Studi Pembangunan <u>Institut Teknologi Bandung (ITB)</u> selama setahun, akan tetapi tidak dilanjutkan karena sibuk di <u>partai politik</u> dan menjadi Menristek
	Lingkungan Keluarga	Hatta adalah anak kedua dari 12 bersaudara. Ayahnya seorang pamong bernama H. Muhammad Tohir dan ibunya bernama Pangeran Raksawiguna. Ayahnya pada mulanya seorang tentara yang berjuang di Jawa, namun sesudah menikah berhenti menjadi tentara dan beralih menjadi pegawai negeri sipil dan berkali-kali mengemban tugas sebagai camat di berbagai wilayah di Sumatera Selatan. ¹¹³
	Gaya hidup calon	<p>Hatta Rajasa tercatat memiliki kekayaan dengan total 13.8 Milyar Rupiah berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 27 Juli 2012. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah tidak adanya daftar kekayaan Hatta Rajasa berupa BMW X5 yang dipakai oleh putra bungsungnya Rasyid¹¹⁴.</p> <p>Selain itu, Hatta Rajasa juga sempat mendapat sorotan akibat penyelenggaraan pernikahan putrinya dengan putra Presiden RI Susilo Bambang</p>

¹¹² Buku Daftar Alamat dan Pejabat BPN RI 2010, lihat <http://www.ndaru.net/wp-content/uploads/buku-alamat-bpn-2010-biasa.pdf>, diakses 18 Juni 2014

¹¹³ <http://pan.or.id/profil-tokoh/ir-m-hatta-rajasa/>

¹¹⁴ <http://www.beritasatu.com/hukum/90440-tak-ada-bmw-x5-di-lhkpn-hatta-rajasa.html>

		<p>Yudhoyono yang ditaksir menelan biaya 20 Milyar rupiah¹¹⁵</p> <p>Hatta Rajasa memiliki jet pribadi khusus untuk menjalankan aktifitasnya.¹¹⁶</p>
Pengalaman dan Kompetensi memimpin negara dan pemerintahan	Jejak Karir	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2010-sekarang: Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional 2. 2009-sekarang: <u>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II</u> 3. 2007-2009: <u>Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu</u> 4. 2004-2007: <u>Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu</u> 5. 2001-2004: <u>Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Gotong Royong</u> 6. 2000-2005: <u>Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (DPP-PAN)</u> 7. 1999-2000: <u>Ketua Fraksi Partai Reformasi DPR-RI.</u> 8. 1982-2000: <u>Presiden Direktur Arthindo</u> 9. 1980-1983: <u>Wakil Manager teknis PT. Meta Epsi</u> 10. 1977-1978: <u>Teknisi Lapangan PT. Bina Patra Jaya</u> <p>Hatta rajasa banyak mendapat sorotan saat kenaikan BBM pada tahun lalu. Hatta yang saat itu menjabat sebagai Menko Perekonomian mengatakan bahwa menaikkan BBM adalah pilihan alternatif terakhir yang diambil oleh pemerintah¹¹⁷ ..</p> <p>Hatta Rajasa telah memegang posisi Menteri di pemerintahan sejak tahun 2001. Posisi menteri yang ia tempati beragam, mulai dari Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Kordinator Perekonomian.</p> <p>Kurang lebih 13 tahun menduduki posisi menteri</p>

¹¹⁵ <http://www.tempo.co/read/news/2011/11/28/078368778/Mau-Tahu-Biaya-Nikah-Ibas-Aliya>

¹¹⁶ <http://m.liputan6.com/news/read/2028050/hatta-rajas-a-datangi-nelayan-rumput-laut-maluku>,
http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=228508:jet-pribadi-hatta-gagal-medarat-di-bandara-silangit-sumut&catid=95:nusantara&Itemid=146, diakses 17 juni 2014

¹¹⁷ <http://www.merdeka.com/uang/hatta-rajas-a-kenaikan-bbm-opsi-terakhir-pemerintah.html>

		tentu pengalaman hatta rajasa dibidang eksekutif cukup banyak
	Pengalaman Organisasi	Kader Partai Amanat Nasional dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PAN ¹¹⁸
	Pengalaman dalam pemerintahan	Dalam pemerintahan , Hatta Rajasa pernah menjadi Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara dan Menko Perekonomian pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ¹¹⁹
	Aktifitas tokoh dalam kegiatan kenegaraan	Dalam partisipasinya dalam kegiatan kenegaraan, Hatta Rajasa pernah duduk sebagai Ketua Fraksi Partai Reformasi di DPR-RI. Dari gedung DPR-RI, Hatta Rajasa juga dipercaya menjadi Menteri pada dua era presiden yang berbeda yaitu era Megawati dan era SBY. Secara berturut-turut, Hatta Rajasa menduduki jabatan menteri di berbagai pos yakni, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perhubungan, Sekretariat Negara, dan terakhir sebagai Menko Perekonomian ¹²⁰
	Penghargaan yang pernah diterima terkait kegiatan kenegaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bintang Mahaputera Adipradana – Pemerintah Republik Indonesia Bintang Mahaputera Adipradana merupakan penghargaan tertinggi setelah tanda kehormatan bintang.¹²¹ Presiden SBY memberikan penghargaan ini kepada Hatta Rajasa ketika menjabat sebagai Menko Perekonomian pada tanggal 13 Agustus 2013.¹²² 2. Economic Booster of the Year – Indonesia Property & Bank (2013) Penghargaan ini diberikan oleh majalah Indonesia Property & Bank kepada Hatta Rajasa atas jasanya mendorong percepatan ekonomi di Indonesia.¹²³ 3. The Rising Stars Men Obsessio’s 9 Young Leader

118 Lihat Kolom Jejak Karier, hal 37

119 Ibid

120 Ibid

121 http://www.setneg.go.id/images/stories/image-news/kontributor/setmil/bintang_mahaputra.pdf, diakses 9 Juni 2014

122 <http://news.okezone.com/read/2013/08/13/337/849115/sby-beri-penghargaan-bintang-mahaputra-adipradana-kepada-hatta>, diakses 9 Juni 2014

123 <http://hatta-rajaso.info/read/1842/hatta-dapat-penghargaan-economic-booster-of-the-years>, diakses 18 Juni 2014

		<p>2013-2014</p> <p>Majalah Men Obsessions menganugerahkan penghargaan ini kepada Hatta Rajasa atas jasanya sebagai konseptor dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).¹²⁴</p> <p>4. Gwanghwa Medal – The first rank of the order of diplomatic service merit oleh Republik Korea Selatan Gwanghwa Medal merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang diplomatic yang diberikan oleh pemerintah Korea Selatan kepada negara mitra yang telah memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan hubungan kerjasama dan persahabatan antara Korea Selatan dengan negara mitranya (Sumber Dari mana)</p> <p>Penghargaan ini diberikan kepada Hatta Rajasa atas jasanya dalam kerjasama di bidang investasi, sumber daya alam, kehutanan, infrastruktur, pertanian, perikanan, industri pertahanan dan lingkungan hidup.¹²⁵</p> <p>5. Public Policy Award – Asia Society (2011)</p> <p>Public Policy Award ialah penghargaan yang diberikan oleh Asia Society di San Fransisco, Amerika Serikat. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang bergengsi bagi orang yang berpengaruh di Asia dan di dunia.¹²⁶ Hatta Rajasa mendapatkan penghargaan ini atas jasanya yang dianggap memperkuat demokrasi di Indonesia dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.¹²⁷</p> <p>6. Ganesha Prajamanggala Bakti Adiutama – ITB (2009)</p> <p>Penghargaan ini diberikan oleh ITB dalam Dies Emas ITB kepada Wakil Presiden RI pada saat</p>
--	--	--

¹²⁴ <http://www.merdeka.com/foto/uang/hatta-rajasa-terima-penghargaan-men039s-obsession.html>, diakses 18 Juni 2014

¹²⁵ <http://www.rmol.co/read/2012/12/14/89975/Hatta-Rajasa-akan-Terima-Penghargaan-Gwangha-Medal-dari-Korsel-Malam-Ini->, diakses 9 Juni 2014

¹²⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2011/11/08/15311836/Hatta.Rajasa.Raih.Public.Policy.Award>, diakses 9 Juni 2014

¹²⁷ Ibid., Lihat juga, <http://www.infobanknews.com/2011/11/hatta-rajasa-terima-public-policy-award/>, diakses 9 Juni 2014

		itu, yakni Jusuf Kalla bersama sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid I. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang dianggap turut berjasa. Di antara penerima penghargaan, Hatta Rajasa merupakan salah satu menteri yang menerima penghargaan dari ITB. (Sumber dari mana)
Independensi ¹²⁸	<p>Affiliasi kelompok/organisasi</p> <p>Keterkaitan dengan tokoh atau partai politik</p> <p>Koneksi dengan negara asing?</p> <p>Koneksi dengan pemilik modal/investor asing?</p>	<p>Dalam kaitannya dengan tokoh politik, Hatta Rajasa membangun berbesan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Hubungan keluarga ini terbangun, ketika Hatta Rajasa menikahkan putrinya, yakni Siti Rubiah Alya Rajasa dengan putra kedua SBY, Eddie Bhaskoro Yudhoyono (Ibas).¹²⁹</p> <p>Terkait dengan kedekatan Hatta Rajasa dengan pihak pemodal, sepanjang penelusuran kami Hatta Rajasa tidak berafiliasi dengan pengusaha tertentu baik asing maupun domestik. Namun, dari kebijakan ekonomi semasa menjabat sebagai Menko Perekonomian, Hatta Rajasa mengeluarkan kebijakan yang dinilai kepada pro kepada investor asing.¹³⁰</p> <p>Hatta maju sebagai calon presiden mendampingi Prabowo didukung oleh Partai Gerindra sebagai poros utama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Koalisi ini dinamakan Koalisi Merah Putih.¹³¹</p> <p>Pasangan prabowo hatta mendapatkan dukungan dari Purnawirawan diantaranya Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) George Toisutta , Letjen (Purn) Yunus Yosfiah, Laksamana (Purn)</p>

¹²⁸ Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihakmanapun. Artinya keberadaan kita adalah mandiri. tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Contoh independensi dapat kita lihat pada organisasi-organisasi tertentu dimana keberadaannya adalah merdeka tanpa diboncengi kepentingan tertentu. Dalam konteks lain, independensi juga merupakan hak kita sebagai manusia, yang memiliki hak bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh orang lain. Tentu saja dalam pelaksanaannya yang disebut independen juga ada batasan-batasannya. Karena suatu lembaga atau organisasi juga tidak dapat eksis tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Lihat dalam https://www.academia.edu/4575304/Apa_itu_independensi, diakses 8 Juni 2014

¹²⁹ <http://nasional.kompas.com/read/2011/11/24/10581813/SBY.Sukses.Tidak.Datang.dari.Langit>, diakses 18 Juni 2014

¹³⁰ <http://m.bisnis.com/finansial/read/20131111/9/185699/hatta-radajasa-bantah-pemerintah-pro-asing-soal-dni>, diakses 18 Juni 2014

¹³¹ <http://m.merdeka.com/pemilu-2014/prabowo-hatta-sebut-dirinya-didukung-koalisi-merah-putih.html>

	<p>Widodo Adi Sutjipto, Letjen (Purn) Cornel Simbolon, Nachrowi Ramli.¹³²</p> <p>Terdapat beberapa nama pemilik modal/pengusaha pendukung pasangan capres-cawapres prabowo-hatta, diantaranya:¹³³</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hashim Djojohadikusumo, altet, dan pengusaha internasional Hashim menjadi Ketua Dewan Pembina Gerbang dan juga Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia. Dia seorang wiraswasta dan pemilik perusahaan Arsari Group yang bergerak dalam bidang pertambangan, program bioetanol, perkebunan karet, dan lainnya. Dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Hashim menjadi anggota Dewan Penasihat. Dia memiliki kekayaan senilai US\$ 700 juta. Dia juga punya jaringan ke pengusaha internasional. 2. Hary Tanoesoedibjo dan MNC Group Dia adalah bos media di Indonesia lewat MNC Group miliknya. Ia bergabung dengan tim sukses Prabowo-Hatta setelah menyatakan diri keluar dari Partai Hati Nurani Rakyat pimpinan Wiranto. Dengan kekayaan US\$ 1,2 miliar, Hary menjadi orang terkaya ke-17 di Indonesia. Dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Hary duduk sebagai anggota Dewan Pakar. 3. Sandiaga Uno dan Hipmi Dia menjadi salah satu juru bicara dalam tim sukses Prabowo-Hatta. Pengusaha muda ini pernah tercatat memiliki kekayaan sebesar US\$ 460 juta. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang beranggotakan lebih dari 30 ribu pengusaha ini juga aktif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia sempat menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Bidang Uaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Kadin Indonesia.
--	--

132

<http://www.merdeka.com/politik/barisan-jenderal-di-belakang-prabowo-hatta.html>

133

<http://www.tempo.co/read/fokus/2014/06/04/2952/Adu-Kuat-Taipan-di-Belakang-Prabowo-dan-Jokowi>, diakses 20 Juni 2014

Keterlibatan dalam suatu kasus hukum atau pelanggaran HAM	Diduga atau diisukan terlibat dalam kasus hukum atau pelanggaran HAM	Anak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa mendadak terkenal setelah menabrak dua orang dalam sebuah kecelakaan mobil hingga tewas. Ia pun dijerat Pasal 283, Pasal 287 serta Pasal 310 UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Hanya saja begitu sampai pengadilan, Rasyid hanya dikenakan pasal 310 tentang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia. Sejak kecelakaan terjadi sampai persidangan di mulai, anak Calon Presiden dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak ditahan dengan alasan depresi. Begitu juga sidangnya berlangsung cepat. ¹³⁴ Majelis Hakim mengganjar terdakwa kecelakaan maut di Tol Jagorawi itu dengan hukuman percobaan selama enam bulan. Rasyid bebas dan tidak dipenjara. Putusan itu diambil Majelis hakim dengan pertimbangan bahwa terdakwa sudah menyatakan akan bertanggung jawab, lalu keluarga terdakwa sudah menyantuni korban, dan keinginan terdakwa untuk segera melanjutkan kuliah. ¹³⁵
Pandangan Terhadap Keberagaman dan masyarakat minoritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa diterima dan mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan 2. Sikap terhadap Keberagaman dan masyarakat minoritas 	<p>Kecaman keras ditujukan Hatta Rajasa kepada ormas-ormas yang melakukan penyerangan terhadap umat beragama. Menurutnya, penyelesaian masalah ini harus mengedepankan dialog.¹³⁶</p> <p>Terkait SKB tiga menteri terkait Ahmadiyah, Hatta mengatakan bahwa substansi SKB harus menyejukkan semua pihak dan bisa meredam gejolak¹³⁷</p>
Pandangan dan	1. Jaminan hak-	Isu terkait hak atas pekerjaan cukup sering

¹³⁴ http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/2465601_4215.html, diakses 20 Juni 2014

¹³⁵ Perlakuan hukum ini tentu sangat berbeda dengan kasus Afriyani Susanti yang juga membunuh orang dalam sebuah kecelakaan. Saat itu Afriyani menjadi bulan-bulanan media massa, dan media sosial. Dia juga langsung dijabarkan kepenjara. Dan akhirnya di vonis 15 tahun penjara. Terkait kasus ini muncul berbagai petisi dari masyarakat sipil termasuk artis. Lihat dalam <http://www.change.org/id/petisi/perlakukan-periksa-dan-adili-rasyid-rajasa-sesuai-rasa-keadilan-masyarakat>, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/03/25/mk7l9o-rasyid-rajasa-bebas>, diakses 20 Juni 2014

¹³⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/02/2105444/Prabowo-Hatta.Kecam.Tindakan.Kekerasan.di.Yogyakarta>, diakses 18 Juni

2014
¹³⁷ <http://news.detik.com/read/2008/06/04/183410/950554/10/mensesneg-skb-3-menteri-soal-ahmadiyah-keluar-bulan-ini>, diakses 18 Juni 2014

sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan	<p>hak dasar buruh, upah, jamsostek, keselamatan kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jaminan kebebasan hak berserikat 3. Kebijakan upah Tingkat pengangguran 	<p>disinggung oleh Hatta Rajasa. Isu pertama adalah terkait kenaikan upah buruh. Atas tuntutan ini, Hatta Rajasa mengatakan bahwa permintaan buruh tidak realistis dan membuka kemungkinan terjadinya kebangkrutan . Untuk penyelesaiannya, pemerintah, buruh dan pengusaha harus duduk bersama membahas upah buruh.</p> <p>Lebih lanjut hatta menekankan bahwa dalam situasi ekonomi indonesia sekarang penting untuk menjaga agar perusahaan tetap jalan, dan faktor-faktor seperti banyaknya demo membuat industri menjadi tidak kuat.¹³⁸</p> <p>Kemudian terkait isu Outsourcing, Hatta menegaskan bahwa sistem itu seharusnya tidak ada dan Hatta berkomitmen untuk menghapuskan Outsourcing .¹³⁹</p>
Pandangan dan Sikap terhadap Hak Atas Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Hak atas Perumahan 2. Pandangan dan sikap terkait penggusuran paksa 	<p>Pada saat Hatta Rajasa masih menjabat sebagai Menko Perekonomian, Hatta Rajasa bersama-sama dengan Menpera menginisiasi RUU Tabungan Perumahan Nasional untuk menyediakan tabungan rumah murah bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai BUMN. Hingga saat ini, RUU Tapenas masih dalam tahap pembahasan.¹⁴⁰</p> <p>Dalam isu penggusuran rumah tinggal secara paksa, Hatta Rajasa tidak mempunyai rekam jejak maupun mengeluarkan pernyataan atas isu ini.</p>
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas Pendidikan	<p>Pandangan tokoh terkait Ketersediaan, Keterjangkauan, kesesuaian, dan</p>	<p>Pada isu pendidikan, sepanjang penelusuran kami, Hatta Rajasa tidak memiliki rekam jejak maupun pernah mengeluarkan pernyataan terkait dengan isu ini</p>

¹³⁸ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/11/0919177/Hatta.Tuntutan.Kenaikan.Upah.Buruh.Tidak.Realistik>, diakses 18 Juni 2014

¹³⁹ <http://www.hattanomics.com/mediaindonesia-com-hatta-outsourcing-tidak-boleh-ada/>, diakses 18 Juni 2014

¹⁴⁰ <http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/06/05/10-menteri-bahas-tabungan-perumahan-rakyat>, diakses 18 Juni 2014; lihat juga <http://dev.kemenpera.go.id/project/cms/index.php/baca/berita/2/kemenpera-siapkan-draft-ruu-tabungan-perumahan>, diakses 18 Juni 2014, dan <http://www.bumn.go.id/perumnas/berita/599/Pemerintah.dan.DPR.Belum.Satu.Suara.Soal.Tabungan.Perumahan>, diakses 18 Juni 2014

	Kualitas pendidikan	
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan layanan kesehatan dalam jumlah bagi seluruh penduduk 2. Aksesibilitas atas layanan kesehatan baik secara keuangan geografis dan budaya 3. Kualitas layanan kesehatan yang harus sesuai dengan standar yang ditentukan 4. Kesetaraan dalam layanan kesehatan 	Pada isu kesehatan, Hatta Rajasa tidak pernah mengeluarkan pernyataan maupun rekam jejak di bidang kesehatan
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas hidup	<p>Penghapusan hukuman mati</p> <p>Pandangan terkait penggunaan hukuman mati</p>	Pada isu hukuman mati, menurut hasil penelusuran kami, Hatta Rajasa tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait dengan bidang ini.
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan Hak atas peradilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan dimuka hukum 2. Sikap terhadap pembaharuan KUHP-KUHAP 	Hatta memberikan pandangan partainya terkait dengan gejolak yang terjadi dalam pembahasan RUU KUHAP. Hatta mengatakan bahwa PAN berkomitmen memperkuat KPK dan membuatnya lebih efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi. ¹⁴¹

141

<http://politik.rmol.co/read/2014/02/23/144913/Hatta-Rajasa:-Revisi-RUU-KUHAP-dan-KUHP-Jangan-Lemahkan-KPK->, diakses 18 Juni 2014

yang adil dan tidak memihak	<ol style="list-style-type: none"> 3. Hak Atas Bantuan Hukum 4. Sikap terhadap korupsi peradilan 	
Pandangan dan Sikap terhadap penegakan Hukum dan Pelanggaran HAM Masa lalu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap terhadap penegakan hukum 2. Sikap terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu 	<p>Hatta memberikan pandangan partainya terkait dengan gejolak yang terjadi dalam pembahasan RUU KUHP. Hatta mengatakan bahwa PAN berkomitmen memperkuat KPK dan membuatnya lebih efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi</p> <p>Pada isu ini, Hatta menyatakan komitmennya untuk memperkuat KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi¹⁴²</p>
Pandangan dan Sikap terhadap Pemberantasan KKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan atau diopiniikan melakukan KKN atau suap 2. Komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan Korupsi 	<p>Adanya penyebutan nama Hatta Rajasa dalam kasus korupsi Impor Daging Sapi yang dilakukan oleh Lutfi Hasan Ishaq dan PT. Indoguna. Nama Hatta muncul dalam nota pembelaan salah satu tersangka kasus ini, yaitu Direktur PT Indoguna Utama Juard Effendi. Sementara Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia Elda Deviane Adiningrat, sebagai kolega dari PT Indoguna Utama, mencantumkan nama Hatta Rajasa untuk mengurus penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.¹⁴³</p> <p>Hatta Radjasa, yang sebelum menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengangkutan Kereta Rel Listrik (KRL) hibah dari Jepang tahun 2006-2007. Hatta dan adiknya dikaitkan dengan kasus korupsi hibah kereta api dari Jepang yang menyeret Mantan Direktur Jenderal Perkereta Apian dalam perkara pengadaan 60 kereta listrik bekas dari Jepang, karena pada saat itu Hatta menjadi Menteri Perhubungan.¹⁴⁴</p> <p>Hatta menekankan pentingnya pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan penghambat ekonomi yang membuat ongkos usaha</p>

¹⁴²

Ibid.

¹⁴³

<http://nasional.kompas.com/read/2013/07/04/0911342/PAN.Bakal.Perkarakan.Penyebutan.Nama.Hatta.Rajasa.dalam.Kasus.Sapi>,

diakses 20 Juni 2014

¹⁴⁴

Lihat Tempo edisi 19-24 April 2011, Tergilas Kereta Bekas. Halaman 28-23

		menjadi mahal. Hatta mengatakan akan memperkuat KPK dan kepolisian untuk memberantas korupsi untuk mencegah pungli dan korupsi ¹⁴⁵ Sebagai ketua umum Partai Amanat Nasional, Hatta menegaskan bahwa partainya adalah partai anti korupsi. Hatta berkomitmen memecat kadernya yang terlibat korupsi. ¹⁴⁶ Komitmen hatta dibuktikan dengan dipecatnya kader PAN yang menduduki kursi DPRD kota kendari atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsiHatta melakukan pakta integritas dengan semua caleg partai pan untuk memerangi korupsi ¹⁴⁷
--	--	---

3. Joko Widodo

Indikator Integritas	Cara mengukur	Rekam Jejak
Latar Belakang dan Kepribadian Calon	Latar belakang pendidikan	SDN 111 Tirtoyoso SMPN 1 Solo SMAN 6 Solo Fakultas Kehutanan UGM lulusan 1985
	Lingkungan Keluarga	Jokowi lahir pada tanggal 21 tahun 1961. Ayahnyabekerja sebagai penjual Kayu. Selepas kuliah ia meneruskan pekerjaan ayahnya dan berhasil menjadi pengusaha furniture.Jokowi memiliki satu orang istri yang bernama Iriana dan tiga orang anak bernama Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep.
	Gaya hidup calon	Jokowi dibesarkan dilingkungan keluarga sederhana. Pada waktu Jokowi masih kecil, ia dan keluarganya sempat menjadi korban penggusuran sebanyak 3 kali.. Pada tahun 2012 jokowi melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁴⁵ <http://finance.detik.com/read/2012/10/04/141929/2054563/4/buruh-demo-soal-outsourcing-hatta-rajasa-sentil-cak-imin>

¹⁴⁶ <http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/03/20/185808/2532179/1562/hatta-rajasa-pan-anti-korupsi-kader-terbukti-korupsi-dipecat>

¹⁴⁷ <http://lampung.tribunnews.com/2014/03/26/pan-akan-pecat-seluruh-caleg-atau-kader-korupsi>

		<p>sebesar 27,26 Milyar dan uang sejumlah 9.876 Dolar Amerika¹⁴⁸. Kekayaan jokowi tersebut berbentuk tanah dan bangunan atau harta tak bergerak yang mencapai 23,77 Milyar.</p> <p>Jokowi dikenal dengan kejujuran¹⁴⁹ dan kesederhanaannya.¹⁵⁰ Pada saat menjadi walikota atau Gubernur Jokowi memilih menggunakan mobil dinas yang ada. Tidak mengambil uang gaji selama menjabat sebagai walikota, ketika berpergian menggunakan pesawat lebih memilih kelas ekonomi, Namun dalam pilpres ini, PDIP menyediakan Jet Pribadi untuk aktifitasnya sebagai calon presiden RI.¹⁵¹</p>
Pengalaman dan Kompetensi memimpin negara dan pemerintahan	Jejak karier	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusaha meubel dan furniture; 2. Walikota Periode I (2005 –2010) 3. Walikota Periode II (2010-2012) 4. Gubernur DKI Jakarta , 2012-2017.¹⁵²
	Pengalaman Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendiri Koperasi Pengembangan Industri Kecil Solo (1990) 2. Ketua Bidang Pertambangan & Energi Kamar Dagang dan Industri Surakarta (1992-1996) 3. Ketua Asosiasi Permebelan dan Industri Kerajinan Indonesia Surakarta (2002-2007)
	Pengalaman dalam pemerintahan	Selama menjadi walikota Solo selama dua periode jokowi banyak melakukan hal-hal penting terkait pembenahan kota solo. Diantaranya adalah pembenahan pedagang kaki lima ¹⁵³ , pembenahan transportasi umum, menyelenggarakan hari bebas kendaraan bermotor, perbaikan dibidang pendidikan dan kesehatan serta ia turut berperan dalam

¹⁴⁸ <https://id.berita.yahoo.com/jokowi-nyapres-ini-hartanya-092009093.html>, diakses 10 Juni 2014

¹⁴⁹ <http://m.merdeka.com/pemilu-2014/survei-jokowi-jujur-dan-pembawa-perubahan-prabowo-tegas.html>, <http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2064982/serikat-buruh-dukung-jokowi-jk-karena-jujur>, <http://www.youtube.com/watch?v=5RmDBp39jL0>, diakses 18 juni 2014.

¹⁵⁰ <http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/24/023925/2591348/1562/jokowi-dinilai-sosok-sederhana-dan-dekat-dengan-rakyat>, diakses 18 juni 2014

¹⁵¹ Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Olly Dondokambey, menjelaskan bahwa partainya harus merogoh kocek US\$ 7.500 per jam untuk biaya sewa dua pesawat jet pribadi yang digunakan calon presiden Joko Widodo. Lihat dalam <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/24/269572925/Sewa-Jet-untuk-Jokowi-US-7500-per-Jam>, diakses 18 Juni 2014

¹⁵² <http://www.pemilu.com/profil/jokowi/>, diakses 10 Juni 2014

¹⁵³ <http://jakarta.okezone.com/read/2012/04/02/505/604084/jokowi-klaim-sukses-benahi-pasar-tradisional-di-solo>

		mendamaikan kisruh internal keraton surakarta. ¹⁵⁴ Kemudian, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta Jokowi fokus dalam pembenahan transportasi umum,
	Aktivitas tokoh dalam kegiatan kenegaraan	Dalam kegiatan kenegaraan, Jokowi menduduki jabatan sebagai Walikota Surakarta semenjak tahun 2005 hingga 2012. Kemudian di tahun 2012, Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017, dan sekarang Jokowi menjadi capres di Pemilu 2014. ¹⁵⁵
	Penghargaan yang pernah diterima ?	<p>1. Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008" Tempo</p> <p>Majalah Tempo memberikan penghargaan sebagai salah satu 10 Tokoh 2008 versi majalah Tempo. Tempo menilai bahwa Jokowi adalah tokoh yang dapat memberikan inspirasi. Adapun yang menjadi kriteria pemilihan sebagai salah satu tokoh yang menginspirasi adalah melakukan terobosan, humanis, bersih dan anti korupsi. Sebagai catatan, sepanjang Jokowi menjadi Walikota Surakarta, Jokowi seringkali melakukan terobosan seperti menolak mengambil gaji Walikota Surakarta dan melakukan pendekatan yang humanis pada saat merelokasi pedagang kaki lima dengan cara mengajak para pedagang kaki lima makan siang bersama. Cara ini dianggap sebagai cara yang humanis dalam menyelesaikan masalah penggusuran pedagang kaki lima di Surakarta.¹⁵⁶</p> <p>Selain itu, sepanjang penelusuran kami, Jokowi belum pernah terlibat dalam kasus korupsi selama menjabat sebagai Walikota Surakarta.</p> <p>2. Menjadi Walikota Terbaik Tahun 2012 Tanggal 8 Januari 2013, The City Mayor</p>

¹⁵⁴ <http://hot.detik.com/celeb-personal/read/2013/09/02/135751/2346920/10/jokowi-pernah-mendamaikan-keraton-solo-bersama-jero-wacik>

¹⁵⁵ <http://www.pemilu.com/profil/jokowi/>, diakses 10 Juni 2014

¹⁵⁶ <http://www.tempo.co/read/news/2009/01/08/058154351/Panelis-Tokoh-Versi-Tempo-Bisa-Menjadi-Inspirasi>, diakses 10 Juni

2014; lihat juga <http://www.voaindonesia.com/content/jokowi-raih-penghargaan-walikota-terbaik-ketiga-dunia/1579686.html>, diakses 10 Juni 2014

		<p>Foundation menunjuk Jokowi sebagai walikota terbaik ketiga di dunia.</p> <p>Dilansir pada laman VoA, alasan Jokowi terpilih sebagai walikota terbaik ketiga di dunia, dikarenakan prestasinya membangun kota Surakarta, ketika membangun kota Surakarta, mengapanyekan gerakan anti korupsi dan membeli mobil SUV Esemka senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).¹⁵⁷</p> <p>3. Penghargaan Bintang Jasa Utama, penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah yang mengabdikan dirinya kepada rakyat, Joko Widodo menerima penghargaan ini pada tanggal 12 Agustus 2011.¹⁵⁸</p> <p>4. Pak Joko Widodo jg meraih penghargaan Bung Hatta Award, atas kepemimpinan dan kinerja beliau selama membangun dan memimpin kota Solo.</p> <p>Pada tanggal 28 Oktober 2010, Jokowi mendapatkan Bung Hatta Award di Graha Niaga dari Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award.</p> <p>Alasan Jokowi mendapatkan penghargaan ini adalah ketika menjabat sebagai walikota Surakarta, Jokowi dianggap berhasil dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat kota Surakarta, selain itu Kota Surakarta dianggap mengalami kemajuan yang pesat saat kepemimpinan Jokowi.¹⁵⁹</p> <p>5. Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Award,</p> <p>Di tahun 2011,UNS menganugerahkan penghargaan Dharma Bakti Praja kepada Joko</p>
--	--	---

¹⁵⁷ <http://www.voaindonesia.com/content/jokowi-raih-penghargaan-walikota-terbaik-ketiga-dunia/1579686.html>, diakses 10 Juni 2014

¹⁵⁸ <http://capres2014.org/profil/profil-capres-2014-joko-widodo-jokowi/>, diakses pada 9 Juni 2014

¹⁵⁹ http://baru.bhaca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=142:jokowi-raih-bung-hatta-award&catid=14:liputan-media&Itemid=36, diakses 10 Juni 2014

		<p>Widodo atas jasanya dalam mengelola Surakarta selaku walikota Solo.¹⁶⁰</p> <p>Joko Widodo menerima penghargaan ini bersama-sama dengan Muryati Sudibyo, yang menerima penghargaan dalam bidang kebudayaan oleh UNS¹⁶¹</p>
Independensi	<p>afiliasi kelompok/organisasi</p>	<p>Di Pemilu Presiden 2014, Jokowi dan JK didukung lima partai politik. Partai politik tersebut ialah PDIP, Nasdem, PKB dan Partai Hanura,¹⁶² disusul dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.¹⁶³</p> <p>Maju sebagai Calon Presiden wakil presiden, Jokowi dan JK didukung Jenderal dan mantan Kapolri yang mendukung Jokowi-JK. Mereka antara lain Jenderal, antan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono Hendropriyono, (Purn) Fachrurrozy, mantan Kepala Bais Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin, mantan Kepala Staf TNI AL Laksamana (Purn) Soeparno, mantan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI (Purn) Sutria Tubagus, mantan Kepala Staf TNI AL Laksamana (Purn) Tedjo, serta dua mantan Kapolri Surojo Bimantoro dan Da'i Bachtiar.¹⁶⁴</p>
	<p>Keterkaitan dengan tokoh, tokoh politik atau partai politik</p>	<p>Menjadi calon presiden PDIP, diisukan sebagai calon presiden boneka dari megawati soekarno putri.</p> <p>Joko Widodo sudah santer dikabarkan akan maju menjadi calon presiden sejak tahun 2013 lalu. Akan tetapi, pada tahun 2013 lalu Jokowi selalu menolak apabila dikaitkan dengan pemilihan umum 2014 dan kemungkinannya maju sebagai calon presiden. Jokowi mengatakan bahwa ia fokus mau mengurus permasalahan banjir, macet dan lain sebagainya di DKI Jakarta¹⁶⁵, akan tetapi pada 14 Maret 2014 kemarin, Joko Widodo mengejutkan publik dengan menerima dicapreskan oleh partainya PDI Perjuangan.</p>

¹⁶⁰ <http://www.tempo.co/read/news/2011/03/11/177319297/Moorwati-Soedibyo-dan-Joko-Widodo-Raih-UNS-Award>, diakses 9 Juni 2014

¹⁶¹

ibid.

¹⁶² <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/20/n5v9oa-pdip-minta-partai-koalisi-bersatu>, diakses 25 Mei 2014

¹⁶³ <http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/05/22/1617547/PKPI.Dukung.Jokowi-JK.Tanpa.Syarat>, diakses 25 Mei 2014

¹⁶⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/22/2132310/Belasan.Jenderal.TNI.dan.Polri.di.Belakang.Jokowi-JK>, diakses 25 Mei 2014

¹⁶⁵ <https://id.berita.yahoo.com/jokowi-saya-mau-ngurus-banjir-bukan-jadi-capres-150500807.html>

	Koneksi dengan negara asing?	Tidak ditemukan data terkait afiliasi dengan pemerintah negara asing
	Koneksi dengan pemiliki modal/ investor asing?	<p>Beberapa Pemodal yang mendukung Jokowi dan JK sebagai pasangan capres dan cawapres.¹⁶⁶</p> <p>1. Sofjan Wanandi dan Apindo Sofjan sudah sejak lama melobi Megawati untuk memasang Jusuf Kalla dengan Jokowi. Sejak 2013, di berbagai kesempatan, Sofjan menyatakan bakal mengeluarkan Rp 2 triliun bila Kalla dipasangkan dengan Jokowi. Sofjan kini memimpin Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang membawahi ribuan pengusaha Indonesia. Jaringan di Apindo untuk Jokowi-Kalla semakin kuat karena Ketua Apindo, Franky Sibarani, menjadi anggota tim penggalangan dana pasangan ini.</p> <p>2. Rusdi Kirana dan karyawan Lion Air Rusdi Kirana bersama kakaknya, Kusnan Kirana, tercatat sebagai orang terkaya ke-29 di Indonesia menurut majalah <i>Forbes</i> pada November 2013. Keduanya sukses mendirikan maskapai penerbangan Lion Air. Dengan kekayaan mencapai US\$ 1 miliar, Rusdi bergabung dengan Tim Kampanye Jokowi-JK sebagai anggota Dewan Pengarah. Rusdi terkenal disegani anak buahnya. Setiap langkah dan kebijakannya selalu diikuti karyawannya, termasuk soal pilihan calon presiden.</p> <p>3. Sutrisno Bachir dan PAN Meskipun pernah menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Tris, sapaan Sutrisno, tidak mengikuti pilihan politik PAN mendukung Prabowo-Hatta. Pengusaha asal Pekalongan ini juga pernah masuk daftar <i>Forbes</i> sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia pada 2008. Saat ini Tris menjabat anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Jokowi-JK. Sebagai bekas Ketua Umum PAN, Sutrisno masih punya jaringan dan pendukung di PAN.</p> <p>4. Jacob Soetoyo, CSIS, dan jaringan internasional Direktur PT Gesit Sarana Perkasa ini mempunyai</p>

		<p>jaringan yang kuat untuk lobi-lobi internasional. Jacob, yang juga menjadi anggota Dewan Pengawas Center of Strategic and International Studies (CSIS), menyediakan rumahnya di Permata Hijau sebagai lokasi pertemuan Jokowi dengan perwakilan asing di Jakarta, antara lain Duta Besar Amerika Serikat (AS) Robert O' Blacke, Jr., Duta Besar Myanmar, Meksiko, Turki, Norwegia, dan Vatikan. Sebelumnya Jacob juga sudah memfasilitasi pertemuan antara Jokowi dan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.</p>
<p>Keterlibatan dalam suatu kasus hukum atau pelanggaran HAM</p>	<p>Diduga atau diisukan terlibat dalam kasus hukum atau pelanggaran HAM</p>	<p>Berdasarkan temuan dari komnas HAM, ditemukan adanya <i>indikasi</i> pelanggaran hak warga dalam proyek normalisasi waduk pluit di Muara Baru. Empat pelanggaran hak warga dalam proyek tersebut diantaranya: Ada intimidasi terhadap masyarakat yang digusur. Tidak ada kejelasan terkait tujuan dari proyek normalisasi.</p>
<p>Sikap terhadap Keberagaman dan masyarakat minoritas</p>	<p>Apakah bisa diterima oleh semua golongan? Mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan</p>	<p>Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai sebagai tokoh politik yang paling pluralis, kebijakannya yang membela kaum-kaum minoritas seperti Lurah Susan menjadi bukti nyata.¹⁶⁷</p> <p>Terkait kasus penyegelan pendirian gereja, Wakil Jemaat GKI Taman Yasmin, Bona Sigalingging meminta Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono belajar dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam menegakkan konstitusi. Seharusnya SBY mau belajar dari Gubernur DKI Jakarta atas kasus Lurah Lenteng Agung. Beliau (Jokowi) mengesampingkan sentimen-sentimen intoleran.¹⁶⁸</p> <p>Survei Nasional Charta Politika Indonesia menunjukkan bahwa Tingkat elektabilitas <u>Joko Widodo</u> paling tinggi dibandingkan capres lainnya. Sosok <u>Jokowi</u> cenderung diterima di semua kalangan. Hal ini dapat dilihat dari jenis kelamin baik</p>

¹⁶⁷ <http://nasional.kompas.com/read/2013/11/10/1252246/LPI.Jokowi.dan.Surya.Paloh.Tokoh.Politik.Paling.Pluralis>, diakses 18 juni

2014

¹⁶⁸ <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/01/1617423/Jemaat.GKI.Taman.Yasmin.Minta.SBY.Belajar.kepada.Jokowi>, diakses

20 Juni 2014

		laki-laki dan perempuan. Di semua segmen usia, pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan serta geografi. ¹⁶⁹
	Sikap terhadap Keberagaman dan masyarakat minoritas?	<p>sikap Jokowi terhadap keberagaman dapat dilihat salah satunya saat desakan penggantian Lurah Susan Jasmine Zulkifli oleh sekelompok ormas karena permasalahan agama. Joko Widodo menolak untuk mengganti Lurah Susan karena menurutnya kerukunan dan toleransi umat beragama adalah sesuatu yang final dan dijamin oleh konstitusi. Jokowi Juga mengatakan bahwa kemajemukan dan kebhinekaan adalah suatu anugrah dan bukan untuk dipertentangkan¹⁷⁰.</p> <p>Dalam advokasi Gereja Damai Kristus Paroki Kampung Duri - Jakarta Barat, LBH Jakarta aktif melakukan pemantauan dan memberikan dukungan kepada jemaat. Dalam kasus ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, langsung turun tangan mengatasi, melakukan resolusi konflik dan melakukan musyawarah dengan kedua belah pihak. Setelah upaya cepat ini, intimidasi dan ancaman secara terbuka berkurang. Bahkan Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Surat Izin Prinsip Ibadah.¹⁷¹</p>
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan	Pandangan dan sikap terkait Jaminan hak-hak dasar buruh, upah, jamsostek, keselamatan kerja, Jaminan kebebasan hak berserikat, Kebijakan upah, Tingkat pengangguran	<p>Terkait permasalahan Outsourcing, Jokowi menegaskan bahwa outsourcing harus dilaksanakan sesuai undang-undang yaitu hanya dapat dipakai ditempat yang tidak berproduksi.¹⁷²</p> <p>Pada tahun 2013 dengan alasan tidak ada kenaikan UMP yang signifikan, Jokowi saat menjadi gubernur berani membuat kebijakan menaikkan UMP sampai 44 persen. Meski diprotes pengusaha.¹⁷³ Setahun berselang, tuntutan upah buruh sebesar 3.7 juta dinilai Jokowi terlalu berlebihan dan tidak masuk</p>

¹⁶⁹ <http://m.merdeka.com/politik/survei-charta-politika-jokowi-capres-nomor-satu.html>, diakses 18 Juni 2014

¹⁷⁰ <http://www.beritasatu.com/nasional/158041-jokowi-dianugerahi-tokoh-pluralisme.html>, diakses 16 Mei 2014

¹⁷¹ <http://news.metrotvnews.com/read/2013/04/12/146193/jokowi-jakarta-sudah-panas-jangan-dipanasi>, diakses 18 Mei 2014

¹⁷² Sistem *outsourcing* dianggap buruh merupakan kebijakan Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden RI. Megawati adalah Ketua Umum PDI-P, partai yang mencalonkan Jokowi sebagai presiden Indonesia mendatang.

¹⁷³ <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/01/1804164/Ini.Kata.Jokowi.soal.Buruh.Outsourcing>, diakses 18 Juni 2014

¹⁷³ <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/15/jokowi-klaim-jadi-gubernur-pertama-yang-naikkan-upah-buruh-sampai-44-persen>, diakses 17 Juni 2014

		<p>logika ditengah situasi ekonomi saat ini. Jokowi mengatakan, pihaknya akan mencoba melakukan survei kenaikan UMP yang disuarakan para buruh. Jokowi khawatir keputusan yang diambil pemerintah memenuhi keinginan buruh, malah jadi boomerang.¹⁷⁴</p> <p>Dalam menyuarkan aspirasinya, Jokowi mengingatkan buruh, yang penting jangan sampai anarkislah. Menyampaikan keinginan itu tidak ada masalah selama itu dianggapnya baik dan benar.¹⁷⁵ Dilain kesempatan, terkait hari buruh internasional, Jokowi mengatakan, itu sebaiknya ga usah demo, ya kan. Karena memacetkan lalu lintas, karena juga mengganggu masyarakat yang lain. Jokowi itu menambahkan masih banyak cara yang dilakukan untuk menyampaikan aspirasi selain melakukan aksi demo. Menyampaikan aspirasinya tdk harus lewat demo. Akibat demo banyak taman yang rusak dan sampah bertebaran.¹⁷⁶</p> <p>Dalam isu perburuhan, diantaranya penentuan penangguhan upah yang diajukan oleh beberapa perusahaan. Joko Widodo menyetujui permohonan penangguhan upah tersebut yang kemudian hari digugat oleh buruh dan dibatalkan oleh PTUN DKI Jakarta karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan¹⁷⁷.</p> <p>Terkait dengan pertanggungjawaban Jokowi atas kebijakan yang ia buat, salah satunya dapat dilihat dari dinyatakan tidak sahnya kebijakan penangguhan upah yang diberikan Jokowi terhadap beberapa perusahaan di DKI Jakarta oleh PTUN DKI Jakarta. Jokowi memilih untuk mematuhi putusan pengadilan dan meminta perusahaan untuk membayar upah pekerja sesuai putusan pengadilan.¹⁷⁸</p>
--	--	---

¹⁷⁴ <http://www.sayangi.com/megapolitan1/read/5368/jokowi-pakai-logika-masuk-akal-enggak-ump-rp-3-7-juta>, diakses 18 Juni 2014

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ http://web.inilah.com/read/detail/1984610/jokowi-demo-buruh-mengganggu-masyarakat#.U6OD5JR_vlk, diakses 19 Juni 2014

¹⁷⁷ <http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/42123-kalah-di-ptun,-jokowi-belum-pikirkan-banding%E2%80%8F.html>, diakses 18 Mei

2014

¹⁷⁸ <http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/42123-kalah-di-ptun,-jokowi-belum-pikirkan-banding%E2%80%8F.html>

<p>Pemenuhan Hak atas Perumahan</p>	<p>1. Pemenuhan Hak atas Perumahan ;</p> <p>2. Sikap dan pandangan atas penggusuran paksa</p>	<p>Pada saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berkomitmen untuk membangun hunian yang layak bagi warga kota Jakarta melalui pembangunan kampung deret. Proyek Pembangunan ini masih terus berjalan hingga saat ini.¹⁷⁹</p> <p>Dalam isu penggusuran paksa, Jokowi pada dasarnya menolak cara penggusuran yang dilakukan dengan cara kekerasan. Namun pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi melakukan penggusuran di sejumlah titik di wilayah Jakarta yang selalu menjadi langganan banjir seperti di Waduk Pluit , Muara Angke, Kampung Baru , dan Penjaringan. Jokowi pun akhirnya sepakat untuk tidak melakukan penggusuran paksa dalam penataan waduk pluit serta akan merelokasi warga.¹⁸⁰</p>
<p>Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas Pendidikan</p>	<p>Pandangan tokoh terkait Ketersediaan, Keterjangkauan, kesesuaian, dan Kualitas pendidikan</p>	<p>Terkait isu dibidang pendidikan, Jokowi selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta telah melaksanakan program Kartu Jakarta Pintar. Meski mendapat dukungan dan juga kritik atas program ini, Jokowi tetap berkomitmen melanjutkan dan memperbaiki program KJP yang diharapkan dapat membantu siswa untuk membeli buku, seragam dan makanan.</p> <p>Jokowi juga memperhatikan infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah yang sudah tidak layak. Ia melakukan tindakan berupa memanggil pejabat terkait dan meminta mereka untuk memperbaiki infrastruktur.</p> <p>Terakhir, terkait ujian nasional jokowi berpendapat bahwa UN tidak tepat apabila dijadikan patokan</p>

¹⁷⁹ <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/15/083513512/Jokowi-Pastikan-28-Proyek-Kampung-Deret-Dimulai>, diakses 18 Juni 2014

¹⁸⁰ <http://news.detik.com/read/2013/02/05/100245/2161237/10/tolak-penggusuran-50-warga-bantaran-waduk-pluit-temui-jokowi>; lihat juga <http://www.merdeka.com/jakarta/didatangi-korban-penggusuran-jokowi-janji-perhatikan.html>, diakses 18 Juni 2014; lihat juga <http://www.komnasham.go.id/informasi/images-portfolio-6/rekam-media/329-komnas-ham-empat-indikasi-pelanggaran-ham-di-waduk-pluit>, diakses 18 Juni 2014

		kelulusan karena belum meratanya kualitas pendidikan di Indonesia ¹⁸¹
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan layanan kesehatan dalam jumlah bagi seluruh penduduk 2. Aksesibilitas atas layanan kesehatan baik secara keuangan geografis dan budaya 3. Kualitas layanan kesehatan yang harus sesuai dengan standar yang ditentukan 4. Kesetaraan dalam layanan kesehatan 	Selain Kartu Jakarta Pintar, Jokowi juga menjalankan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Program ini juga banyak menuai Pro dan kontra seperti membludaknya pasien yang tidak diimbangi dengan penambahan tenaga medis, sampai mundurnya rumah sakit yang menjadi mitra kerja KJS. ¹⁸²
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas hidup	Penghapusan hukuman mati Pandangan terkait penggunaan hukuman mati	Terkait Hak Atas Hidup, khususnya Hukuman Mati Jokowi terlihat tidak terlalu memperhatikan. Indikasi ini terlihat dari komentarnya saat ditanyakan pendapatnya mengenai hukuman mati bagi Koruptor. Jokowi mengatakan terserah saja apakah Koruptor akan dihukum mati ditembak atau digantung. ¹⁸³
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan dimuka hukum 2. Sikap terhadap pembaharuan KUHP-KUHAP 3. Hak Atas Bantuan Hukum 4. Sikap terhadap korupsi peradilan 	Terkait dengan hak atas bantuan hukum , Jokowi pada dasarnya mendukung tentang bantuan hukum namun sayangnya bantuan hukum yang dimaksud Jokowi hanya terbatas bagi mereka yang miskin secara ekonomi. ¹⁸⁴

181 <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/18/15432969/Jokowi.Dari.Awal.Saya.Tak.Setuju.UN>

182 <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/18/083563345/Jokowi-Dicurhati-Pasien-Soal-KJS-di-RS-Pasar-Rebo>

183 <http://news.liputan6.com/read/719321/jokowi-koruptor-mau-digantung-ditembak-terserah>

184 <http://www.iokowi.id/berita/jokowi-gali-pandangan-hukum-advocat/>, diakses 10 Juni 2014

Sikap terhadap penegakan Hukum dan Pelanggaran HAM masa Lalu	Pandangan dan sikap calon kepada penegakan hukum	Terkait dengan penegakan hukum , khususnya dalam pelanggaran hukum yang bermotif SARA, Jokowi berpendapat akan mendorong penegakan hukum dengan tegas ¹⁸⁵ , dapat dikatakan pada dasarnya Jokowi menginginkan penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelanggaran hukum. Terkait dengan Gugatan Buruh terhadap Kebijakan penangguhan upah yang diberikan Jokowi terhadap beberapa perusahaan di DKI Jakarta oleh PTUN DKI Jakarta. ¹⁸⁶ Jokowi memilih untuk mematuhi putusan pengadilan dan meminta perusahaan untuk membayar upah pekerja sesuai putusan pengadilan.
	Pandangan dan sikap calon terhadap Pelanggaran HAM masa lalu	Dalam liputan wawancara di Metro Tv, tanggal 9 Juni 2014. Jokowi memiliki komitmen untuk mengusut tuntas Pelanggaran HAM di masa lalu.
Sikap terhadap Pemberantasan KKN	Tidak melakukan atau diopinionkan melakukan KKN atau suap	Jokowi sempat diopinionkan terlibat dalam kasus korupsi pengadaan bus transjakarta yang saat ini telah diproses oleh kejaksaan agung dengan dua PNS DKI Jakarta ditetapkan sebagai tersangka.Jokowi dan Basuki dianggap sengaja melakukan pembiaran dengan tidak melakukan pengawasan intensif sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi ¹⁸⁷
	Komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Dalam suatu kesempatan Jokowi sempat menyinggung terkait pemberantasan Korupsi. Jokowi mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi sebaiknya dimulai dari hal-hal kecil. Pemberantasan korupsi menurut Jokowi harus dirasakan oleh masyarakat, seperti penghapusan pungutan-pungutan liar seperti dalam proses pembuatan KTP. Jokowi juga memiliki wacana untuk memperbaiki sistem birokrasi karena ia menganggap terjadinya penyelewengan karena sistem birokrasi yang tidak efisien. ¹⁸⁸

185

Ibid

186

<http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/42123-kalah-di-ptun,-jokowi-belum-pikirkan-banding%E2%80%8F.html>

187

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/31/jokowi-ahok-berperan-terkait-kasus-korupsi-bus-trans-j>

188

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/11/27/me5ohv-jokowi-berantas-korupsi-dari-hal-kecil-dulu>

4. Jusuf Kalla

Indikator	Cara mengukur	
Latar Belakang dan Kepribadian Calon	Latar belakang pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Ekonomi <u>Universitas Hasanuddin</u> (1967) 2. <i>The European Institute of Business Administration</i>, <u>Perancis</u> (1977)
	Lingkungan Keluarga	Jusuf Kalla lahir pada tanggal 15 Mei 1942 di Watampone, Sulawesi Selatan. total kekayaan Jusuf Kalla adalah senilai Rp. 314.530.794.307 pada 2004, istri JK bernama Mufidah Miad Saad. JK adalah putra dari pasangan Haji Kalla dan Athirah yang merupakan pengusaha keturunan Bugis. Saat ini JK sudah dikaruniai seorang putra, empat orang putri dan sembilan orang cucu.
	Gaya hidup calon	<p>Jusuf Kalla semenjak mahasiswa sudah aktif dengan berbagai kegiatan organisasi pemuda. Pada tahun 1968 ia menjadi CEO NV Haji Kalla. Dibawah kepemimpinannya NV Haji Kalla berkembang kian pesat dan maluas ke bidang perhotelan, konstruksi penjualan kendaraan, kelapa sawit, perkapalan, real estate, transportasi dan peternakan¹⁸⁹.</p> <p>JK malang melintang dibidang eksekutif dengan menjadi Menkokesra dan Menteri perindustrian dan perdagangan. Kemudian JK menjadi wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2009 namun kalah oleh pasangan SBY-BUDIONO.</p> <p>Jusuf Kalla memiliki pesawat pribadi jenis jet BAe 146 – 200 bernama Athirah (nama ibunya) untuk beraktiftas.¹⁹⁰</p>

¹⁸⁹ <http://profil.merdeka.com/indonesia/m/muhammad-jusuf-kalla/>

¹⁹⁰ <https://id.berita.yahoo.com/jusuf-kalla-sematkan-nama-ibunda-di-pesawat-pribadinya-041456900.html>

Pengalaman dan Kompetensi memimpin negara dan pemerintahan	Jejak Karir	<ul style="list-style-type: none"> a. 1968 - 2001 :Direktur Utama NV. Hadji Kalla b. 1969 - 2001 : Direktur Utama PT. Bumi Karsa c. 1988 - 2001 : Komisaris Utama PT. Bukaka Teknik Utama d. 1988 - 2001 : Direktur Utama PT. Bumi Sarana Utama e. 1993 - 2001 : Direktur Utama PT. Kalla Inti Karsa f. 1995 - 2001 : Komisaris Utama PT. Bukaka Singtel International
	Pengalaman Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. 2000 - sekarang: Anggota Dewan Penasehat ISEI Pusat b. 1985 - 1998 : Ketua Umum KADIN Sulawesi Selatan c. 1994 - sekarang : Ketua Harian Yayasan Islamic Center Al-Markaz d. 1992 - sekarang : Ketua IKA-UNHAS e. 2004-2009: Ketua Umum DPP Partai Golkar f. 2009-sekarang: Ketua Palang Merah Indonesia (“PMI”)
	Pengalaman dalam pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. 2004-2009 :Wakil Presiden RI pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I b. 2001 - 2004 : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat c. 1999 - 2000 : Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI d. 1988 - 2001 : Anggota MPR-RI
	Aktifitas tokoh dalam kegiatan kenegaraan	<p>Dalam kegiatan kenegaraan, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (“Menkokesra”) di era Presiden Megawati Soekarno Putri dan menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.</p>
	Penghargaan yang pernah diterima?	<ul style="list-style-type: none"> 1. Doktor Ekonomi (HC) – Universiti Malaya <p>Universiti Malaya memberikan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ekonomi kepada Jusuf Kalla pada tanggal 21 Juli 2007. Alasan Universiti Malaya memberikan penghargaan ini kepada Jusuf Kalla karena Jusuf Kalla mampu mengangkat perekonomian</p>

		<p>Indonesia dengan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).¹⁹¹</p> <p>2. Doktor (HC) di bidang penanganan konflik oleh Soka University, Jepang Soka University menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Jusuf Kalla dalam bidang penanganan konflik pada tanggal 2 Februari 2009. Soka University menganggap bahwa Jusuf Kalla berhasil dalam menangani berbagai konflik di Indonesia seperti konflik Poso, Aceh, dan Ambon.¹⁹²</p> <p>3. Doktor dibidang perekonomian dan politik (HC) dari Universitas Hasanuddin Pada tanggal 10 September 2011, Universitas Hasanuddin, Makassar memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Jusuf Kalla dalam bidang perekonomian dan politik. Menurut Professor Basri Hasanuddin, mantan rektor Universitas Hasanuddin ada 3 (tiga) alasan utama kenapa Jusuf Kalla layak menerima gelar kehormatan ini, yakni : 1. Pandangan masyarakat tentang penokohan Jusuf Kalla; 2. Pandangan Jusuf Kalla tentang ekonomi yang cukup signifikan dalam berbagai komentar dan kebijakan ketika menjabat sebagai wakil presiden; dan 3. Jusuf Kalla, saat menjabat sebagai wakil presiden, dinilai telah menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan DPR. Hal ini ditandai dengan terpilihnya Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum partai Golkar.¹⁹³</p> <p>4. Doktor dibidang perdamaian (HC) – Unsyiah Universitas Syiah Kuala, Aceh menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Jusuf Kalla pada tanggal 12 September 2011. Alasan Universitas Syiah Kuala menganugerahkan gelar kehormatan</p>
--	--	---

¹⁹¹ <http://new.uai.ac.id/enterprise/2012/01/12/jusuf-kalla-enam-gelar-doktor-honoris-causa/>, diakses 10 Juni 2014

¹⁹² Ibid

¹⁹³ Ibid

		<p>ini kepada Jusuf Kalla, karena Jusuf Kalla dianggap telah mempelopori perdamaian di Aceh yang ditandai dengan penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Selain itu, Jusuf Kalla juga berjasa dalam menangani konflik horizontal di berbagai daerah seperti Poso dan Ambon.¹⁹⁴</p> <p>5. Doktor Honoris Causa di bidang pendidikan kewirausahaan oleh Universitas Pendidikan Indonesia</p> <p>Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, menganugerahkan gelar kehormatan Doktor Honoris Causa di bidang pendidikan kewirausahaan. Gelar kehormatan ini diberikan, karena Jusuf Kalla dianggap sebagai figur yang mumpuni dalam bidang kewirausahaan. Selain itu, Jusuf Kalla juga dianggap memiliki karakter yang disiplin, loyal, dan menunjukkan kepribadian yang selalu menghargai jati diri bangsa.¹⁹⁵ Doktor dibidang pemikiran ekonomi dan Bisnis – Universitas Brawijaya. Pada tanggal 8 Oktober 2011, Universitas Brawijaya memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Jusuf Kalla di bidang ekonomi. Universitas Brawijaya menganggap bahwa Jusuf Kalla memiliki visi dan misi yang sama dengan fakultas ekonomi dalam pengembangan ekonomi di Tanah Air. Selain itu Jusuf Kalla juga dinilai sebagai pelaku usaha yang sukses dan peduli kepada masyarakat.¹⁹⁶</p> <p>Sebagai catatan, sepanjang penelusuran tidak ditemukan adanya suatu informasi sehubungan dengan peran Jusuf Kalla, selaku pelaku usaha, dalam mengembangkan perekonomian masyarakat</p>
--	--	--

194

Ibid

195

Ibid

196

Ibid

		<p>kecil.</p> <p>6. Doktor dibidang kepemimpinan – UI UI memberikan gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada Jusuf Kalla di bidang kepemimpinan pada 9 Februari 2013.¹⁹⁷</p> <p>7. UI menilai bahwa Jusuf Kalla memiliki peran yang luar biasa di bidang kepemimpinan dalam pengabdianya kepada bangsa dan negara.¹⁹⁸ Sebagai catatan, dalam kepemimpinannya saat menjabat sebagai wakil presiden, Jusuf Kalla dikenal sebagai pribadi yang tegas dan cepat dalam mengambil keputusan.</p> <p>8. Penghargaan Tokoh Perdamaian – World Assembly of Youth World Assembly of Youth menganugerahkan Penghargaan Tokoh Perdamaian kepada Jusuf Kalla pada tanggal 1 Oktober 2011 di Ambon. Penghargaan diberikan oleh ketua World Assembly of Youth yang sekaligus ketua dari Komite Nasional Pemuda Indonesia, Ahmad Doly Kurnia. Menurut World Assembly of Youth, alasan diberikannya penghargaan ini kepada Jusuf Kalla, karena Jusuf Kalla dianggap telah berjasa dalam penanganan konflik di Aceh, Ambon, dan Poso.¹⁹⁹</p> <p>9. Dwidjosowojo Award – Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera menganugerahkan Dwidjosowojo Award kepada Jusuf Kalla pada tanggal 25 Januari 2012, di Depok, Jawa Barat. Penghargaan ini diberikan oleh Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, Dirman Pardosi. Alasan pemberian penghargaan ini kepada</p>
--	--	---

¹⁹⁷ <http://www.merdeka.com/peristiwa/ui-anugerahi-jusuf-kalla-gelar-doktor-hc.html>, diakses 10 Juni 2014

¹⁹⁸ <http://www.antaraneews.com/berita/357540/ui-nilai-jusuf-kalla-punya-prestasi-luar-biasa>, diakses 10 Juni 2014

¹⁹⁹ <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/01/1245207/JK.Tokoh.Perdamaian.Dunia>, diakses 10 Juni 2014

		<p>Jusuf Kalla, karena Jusuf Kalla dianggap berjasa telah mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa.²⁰⁰</p> <p>10. The Most Inspiring Person – Mens Obsession Majalah Mens Obsession menganugerahkan penghargaan The Most Inspiring Person kepada Jusuf Kalla pada tanggal 25 Januari 2012 di Teebox Café, Jakarta. Alasan Mens Obsession memilih Jusuf Kalla sebagai The Most Inspiring Person, karena Jusuf Kalla dianggap memberikan inspirasi dan motivasi kepada masyarakat luas untuk mendarmabaktikan diri kepada bangsa dan negara.²⁰¹</p>
Independensi	afiliasi kelompok/organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Partai Golongan Karya - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - Partai Kebangkitan Bangsa - Partai Nasional Demokrat - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
	Keterkaitan dengan tokoh, tokoh politik atau partai politik	Pada saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta di tahun 2012, Jusuf Kalla pernah merekomendasikan nama Jokowi kepada Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri untuk dicalonkan sebagai calon gubernur dari PDI-P.
	Koneksi dengan negara asing	
	Koneksi dengan pemilik modal/ investor asing	<p>Beberapa Pemodal yang mendukung Jokowi dan JK sebagai pasangan capres dan cawapres.²⁰²</p> <p>1. Sofjan Wanandi dan Apindo Sofjan sudah sejak lama melobi Megawati untuk memasang Jusuf Kalla dengan Jokowi. Sejak 2013, di berbagai kesempatan, Sofjan menyatakan bakal mengeluarkan Rp 2 triliun bila Kalla dipasangkan dengan Jokowi. Sofjan kini memimpin Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang membawahi ribuan pengusaha indonesia. Jaringan</p>

²⁰⁰

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/25/lyc48n-jk-terima-dwidjosowojo-award>, diakses 10 Juni 2014

²⁰¹

<http://www.satunews.com/read/16719/2012/01/30/jusuf-kalla-raih-penghargaan-the-most-inspiring-person-html>, diakses 10 Juni

2014

²⁰²

<http://www.tempo.co/read/fokus/2014/06/04/2952/Adu-Kuat-Taipan-di-Belakang-Prabowo-dan-Jokowi>, diakses 20 Juni 2014

di Apindo untuk Jokowi-Kalla semakin kuat karena Ketua Apindo, Franky Sibarani, menjadi anggota tim penggalangan dana pasangan ini.

2. Rusdi Kirana dan karyawan Lion Air
Rusdi Kirana bersama kakaknya, Kusnan Kirana, tercatat sebagai orang terkaya ke-29 di Indonesia menurut majalah *Forbes* pada November 2013. Keduanya sukses mendirikan maskapai penerbangan Lion Air. Dengan kekayaan mencapai US\$ 1 miliar, Rusdi bergabung dengan Tim Kampanye Jokowi-JK sebagai anggota Dewan Pengarah. Rusdi terkenal disegani anak buahnya. Setiap langkah dan kebijakannya selalu diikuti karyawannya, termasuk soal pilihan calon presiden.

3. Sutrisno Bachir dan PAN
Meskipun pernah menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Tris, sapaan Sutrisno, tidak mengikuti pilihan politik PAN mendukung Prabowo-Hatta. Pengusaha asal Pekalongan ini juga pernah masuk daftar *Forbes* sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia pada 2008. Saat ini Tris menjabat anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Jokowi-JK. Sebagai bekas Ketua Umum PAN, Sutrisno masih punya jaringan dan pendukung di PAN.

4. Jacob Soetoyo, CSIS, dan jaringan internasional
Direktur PT Gesit Sarana Perkasa ini mempunyai jaringan yang kuat untuk lobi-lobi internasional. Jacob, yang juga menjadi anggota Dewan Pengawas Center of Strategic and International Studies (CSIS), menyediakan rumahnya di Permata Hijau sebagai lokasi pertemuan Jokowi dengan perwakilan asing di Jakarta, antara lain Duta Besar Amerika Serikat (AS) Robert O' Blacke, Jr., Duta Besar Myanmar, Meksiko, Turki, Norwegia, dan Vatikan. Sebelumnya Jacob juga sudah memfasilitasi pertemuan antara Jokowi dan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Sikap terhadap Keberagaman dan Masyarakat Minoritas	Apakah bisa diterima oleh semua golongan? Mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan	
	Sikap terhadap Keberagaman dan masyarakat minoritas?	<p>JK dimasa mudanya bersama organisasi HMI pernah melakukan penyerangan terhadap sembilan gereja Protestan, empat gereja Katholik, sebuah biara, sebuah kampus teologi, sebuah asrama mahasiswa Katholik dan dua sekolah Katholik.²⁰³</p> <p>Tetapi semasa beliau menjadi wakil presiden, JK mengecam penyerangan ahmadiyah di Kuningan Jawa Barat.²⁰⁴</p> <p>Dimasa depan, isu kebebasan beragama adalah salah satu isu yang cukup diperhatikan oleh JK. Saat maju menjadi calon presiden bersama wiranto JK mengatakan sepaham dengan para ulama untuk meluruskan kelompok yang dianggap aliran sesat dan berharap agar pemerintah dan ulama dapat bekerjasama meluruskan ajaran kelompok tersebut²⁰⁵, pada kesempatan yang lain JK menegaskan bahwa ahmadiyah berhak untuk hidup tetapi harus dikembalikan ke ajaran yang benar sesuai rukun islam.²⁰⁶</p> <p>Pada saat menjadi wapres, JK mengecam penyerangan ahmadiyah di Kuningan Jawa Barat. Jusuf Kalla mengecam penyerangan yang</p>

²⁰³ Di Makassar pada 1 Oktober 1969, para pelajar Muslim dipimpin Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyerang sembilan gereja Protestan, empat gereja Katholik, sebuah biara, sebuah kampus teologi, sebuah asrama mahasiswa Katholik dan dua sekolah Katholik. HMI Makassar saat itu dipimpin ketua umum Jusuf Kalla yang kelak menjabat wakil presiden Indonesia pada 2004. Lihat Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order* (Amsterdam University Press, 2006) hal. 29-40. Lihat juga, Melissa Crouch, "Implementing the Regulation on Places of Worship in Indonesia: New Problems, Local Politics and Court Action," *Asian Studies Review* 34:4(2010), hal. 403-19.

²⁰⁴ <http://news.okezone.com/read/2007/12/20/1/69535/kalla-kecam-penyerangan-terhadap-ahmadiyah>, diakses 18 Juni 2014

²⁰⁵ <http://www.tempo.co/read/news/2009/05/13/146176113/Ditantang-Bubarkan-Ahmadiyah-Kalla-Wiranto-Siap-Bereskan>

²⁰⁶ <http://lipsus.kompas.com/oscar/read/2009/06/09/19530588/JK:.Ahmadiyah.Berhak.untuk.Hidup>

		<p>dilakukan sekelompok masyarakat terhadap jemaah Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat. Dia pun mendesak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap pelaku penyerangan. "Saya tadi berbicara ke polisi dan presiden, agar polisi menindak siapa saja yang menghalangi orang lain menjalankan keyakinannya. Termasuk siapa yang merusak Ahmadiyah. Polisi akan bertindak keras."²⁰⁷</p> <p>Mengenai SKB pelarangan ahmadiyah, JK berpendapat bahwa harusnya ahmadiyah mematuhi SKB ini agar tidak ada masalah yang muncul di masyarakat.²⁰⁸</p> <p>Kemudian terkait kasus GKI Yasmin, JK menghimbau untuk tidak bersikeras untuk tetap melakukan ibadah di gereja yang saat ini disegel oleh pemkot Bogor. JK mengatakan bahwa permasalahan ini bukan permasalahan toleransi melainkan masalah gedung²⁰⁹ Menurut JK, toleransi tidak harus selalu dari mayoritas, melainkan harus kedua belah pihak, minoritas juga harus memahami.</p> <p>Komentar JK bertentangan dengan kedudukan hukum jemaah GKI Yasmin yang telah memenangkan gugatan sampai Mahkamah Agung akan tetapi masih tidak dapat menggunakan gereja mereka untuk beribadah. Selain itu, JK juga berkomentar terkait rumah ibadah yang menjadi permasalahan GKI yasmin. Jusuf Kalla menambahkan, persoalan GKI Yasmin tidak akan pernah selesai apabila tidak ada pihak yang mengalah. Karena itu, JK menganjurkan jemaat GKI Yasmin menerima tawaran dari Pemkot Bogor untuk memindahkan lokasi gereja ke tempat yang sudah disediakan.²¹⁰.</p>
--	--	--

²⁰⁷ <http://news.okezone.com/read/2007/12/20/1/69535/kalla-kecam-penyerangan-terhadap-ahmadiyah>, diakses 18 Juni 2014

²⁰⁸ <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/17/164647-jusuf-kalla-bubarkan-ahmadiyah-jika-bersalah>,
²⁰⁹ <http://news.liputan6.com/read/189364/wapres-skb-untuk-cegah-bentrokan>

²⁰⁹ http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2663175_4202.html, diakses 20 Juni 2014

²¹⁰ Jemaat Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor, Jawa Barat, menegaskan tidak akan pernah menerima tawaran relokasi bangunan gereja dari pemerintah. GKI Yasmin mendesak agar pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi

		<p>Terkait dengan Kasus Lurah Lenteng Agung yang dituntut mundur karena beragama berbeda dari mayoritas warga, JK berpendapat bahwa selama prosedur penempatan dan kinerja seorang pejabat itu benar, maka tidak ada alasan untuk melakukan penolakan. Dalam kasus Lurah Susan, masyarakat seharusnya melihat bagaimana lurah itu dipilih dan di tempatkan di Lenteng Agung. Bukan malah menolak karena agama yang berbeda. "Jadi kalau dia cara pemilihnya benar, kapasitas bagus, ya harus didukung."²¹¹</p>
<p>Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan hak-hak dasar buruh, upah, jamsostek, keselamatan kerja 2. Jaminan kebebasan hak berserikat 3. Kebijakan upah Tingkat pengangguran 	<p>Isu hak atas pekerjaan pertama yang akan dibahas adalah terkait pandangan Jusuf Kalla terhadap sistem Outsourcing. Saat maju sebagai calon presiden pada tahun 2009 bersama dengan Wiranto, Jusuf Kalla berjanji untuk meniadakan sistem outsourcing dalam perekrutan tenaga kerja. JK mengatakan sangat tidak setuju dengan tenaga kerja outsourcing sehingga ia ingin menghapusnya apabila terpilih nanti.²¹² Akan tetapi pada tahun 2009 juga JK mengatakan hal sebaliknya yaitu tidak akan menghapus sistem Outsourcing, tetapi justru menekankan bahwa pekerja outsourcing harus diutamakan oleh perusahaan²¹³.</p> <p>Isu selanjutnya adalah terkait dengan upah buruh. JK mengatakan bahwa pengusaha tidak semestinya menekan upah buruh untuk menurunkan biaya produksi²¹⁴, JK pada kesempatan lain mengomentari demo buruh yang meminta kenaikan UMP DKI sebesar 2.7 juta, JK mengatakan bahwa pemerintah harus turun tangan dalam permasalahan penetapan UMP, jangan hanya menyerahkan pada pengusaha dan buruh²¹⁵. Pada tahun berikutnya, saat buruh meminta UMP sebesar 3.7 Juta, JK berpendapat</p>

Ombudsman RI yang menyatakan izin mendirikan bangun gereja legal dan jemaat diperbolehkan untuk melakukan ibadah di gereja itu, lihat dalam http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2663175_4202.html, diakses 20 Juni 2014

²¹¹ <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/30/064517680/Jusuf-Kalla-Dukung-Lurah-Susan>

²¹² Antara, 22 Juni 2009

²¹³ http://politik.tvonenews.tv/berita/view/16922/2009/06/28/jusuf_kalla_tak_akan_hapus_sistim_outsourcing.tvOne,
<http://nasional.kompas.com/read/2009/06/28/17463919/jk.tidak.akan.hapus.sistem.outsourcing>

²¹⁴ <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/284941-jusuf-kalla--jangan-tekan-upah-buruh>

²¹⁵ <https://id.berita.yahoo.com/jusuf-kalla-upah-buruh-bisa-naik-jika-sudah-085413909.html>

		<p>bahwa permintaan upah sebesar itu bisa merugikan perusahaan dan juga buruh itu sendiri.²¹⁶</p> <p>Kemudian terkait demo buruh, JK mengatakan demo buruh adalah akibat kurangnya komunikasi antara buruh, pengusaha dan pemda setempat²¹⁷, dilain kesempatan JK menyebut bahwa demo buruh adalah bagian dari demokrasi dan berterimakasih kepada buruh telah ikut menggerakkan perekonomian²¹⁸, tetapi, komentar JK ini justru bertentangan dengan komentarnya pada tahun 2007 saat masih menjabat sebagai Wakil Presiden yang mengatakan bahwa masalah utama bidang ketenagakerjaan di Indonesia adalah persepsi radikalisme yang dilakukan oleh para pekerja²¹⁹</p>
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas Pendidikan	Pandangan tokoh terkait Ketersediaan, Keterjangkauan, kesesuaian, dan Kualitas pendidikan	<p>Terkait ujian nasional, Jusuf Kalla berpendirian bahwa ujian nasional harus dipertahankan dan dilanjutkan karena Ujian Nasional berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi capaian pendidikan di setiap tingkatan, UN juga bertujuan untuk menumbuhkan semangat kesetaraan antarsiswa di seluruh daerah²²⁰, JK juga mengakui bahwa pelaksanaan UN harus diperbaiki karena masih adanya kecurangan dan kendala teknis. Hanya saja menurut JK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mampu bersinergi dengan pemerintah di berbagai daerah.²²¹</p> <p>Statement JK secara langsung bertentangan dengan putusan MA yang memenangkan gugatan citizen law suit yang diajukan para penggugat ujian nasional, MA dalam putusannya menolak kasasi yang diajukan oleh pihak tergugat (presiden, wakil presiden dll) dan dengan demikian tergugat harus memenuhi putusan berupa perbaikan kualitas guru,</p>

²¹⁶ <http://finance.detik.com/read/2013/09/24/200446/2368360/480/jk-kasih-pengusaha-kalau-gaji-buruh-langsung-naik-jadi-rp-37-juta-bulan>

²¹⁷ <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/283620-kalla--buruh-demo-karena-kurang-komunikasi>

²¹⁸ <http://news.detik.com/read/2006/04/05/113200/571022/10/demo-buruh-bagian-dari-demokrasi?nd771104bcj>,

²¹⁹ ANTARA News) 27/08/07 11:10

²²⁰ <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/26/079516867/Jusuf-Kalla-Bela-Ujian-Nasional>,

http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2953307_4202.html

²²¹ http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2953307_4202.html,

<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/14/05/05/n53xut-jk-ujian-nasional-harus-dipertahankan>, diakses 20 Juni 2014

		<p>kelengkapan sarana prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap diseluruh daerah Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan ujian nasional.²²²</p> <p>Selanjutnya terkait anggaran pendidikan, JK mengatakan pemerintah dan DPR salah dalam menjalankan anggaran pendidikan karena tidak melaksanakan amanat undang-undang untuk memenuhi anggaran minimum sebesar 20 persen²²³</p>
<p>Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan layanan kesehatan dalam jumlah bagi seluruh penduduk 2. Aksesibilitas atas layanan kesehatan baik secara keuangan geografis dan budaya 3. Kualitas layanan kesehatan yang harus sesuai dengan standar yang ditentukan 4. Kesetaraan dalam layanan 	<p>JK berkomentar terkait pelaksanaan BPJS, menurutnya pelaksanaan BPJS harus cermat karena tak menutup kemungkinan masyarakat lebih memilih menjadi sakit daripada sehat, alasannya orang sakit akan mendapatkan layanan kesehatan gratis dirumah sakit tanpa harus kerja dan bisa mendapat makan. JK juga khawatir pelaksanaan BPJS mengancam keuangan negara²²⁴</p> <p>Menurut Kalla, konsep empat sehat lima sempurna harus ditentukan sesuai dengan kebiasaan masing-masing daerah. "Seperti misalnya di Jawa Barat lalapan, di Bugis makanannya ikan, di Papua makanannya sagu," ujarnya. Kalla juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan. Sebab perkembangan kesehatan di Indonesia belum cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain.²²⁵</p>

²²² http://nasional.news.viva.co.id/news/read/110215-ma_tak_ada_putusan_penghapusan_un, diakses 20 Juni 2014

²²³ <http://www.tempo.co/read/news/2006/06/07/05578528/Jusuf-Kalla-Pemerintah-dan-DPR-Melanggar-Konstitusi>, diakses 17 Mei

2014
²²⁴ <http://jusufkalla.info/archives/2013/12/03/jk-pelaksanaan-bpis-perlu-kecermatan/>, diakses 18 mei 2014

²²⁵ Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla pada acara puncak Hari Kesehatan Nasional ke-41 di Alun-alun Benteng Pancasila, Subang, Jawa Barat, Kamis (8/12/2005), menagih janji Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari untuk menyempurnakan konsep empat sehat lima sempurna. Lihat dalam <http://news.detik.com/read/2005/12/08/113553/494561/10/menkes-diminta-sempurnakan-konsep-4-sehat-5-sempurna>, diakses 18 Juni 2014

	kesehatan	
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan hak atas hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan hukuman mati 2. Pandangan terkait penggunaan hukuman mati 	Sikap JK terkait hukuman mati terlihat tidak konsisten. Dalam kasus perkosaan dan narkoba JK sangat mendukung pelaksanaan hukuman mati. JK berpendapat gembong narkoba pantas untuk dihukum mati dan berkomentar terkait pemberian grasi pada gembong narkoba hanya akan mengurangi ketakutan para gembongan narkoba, JK juga setuju hukuman mati bagi pemerkosa, JK mengatakan ini sebagai respon atas komentar calon hakim agung Daming, namun JK mengatakan tergantung cara memperlakukannya, apabila memperlakukanya sambil menyakiti dan membunuh maka harus dihukum mati ²²⁶ . Sementara itu, dalam Kasus korupsi, pandangan Jusuf Kalla berbeda, Mohammad Jusuf Kalla menilai, hukuman bagi pelaku korupsi haruslah sesuai undang-undang. Dirinya menyebutkan, hukuman seumur hidup penjara sudah cukup mewakili perbuatan para koruptor. ²²⁷
Pandangan dan sikap tokoh terhadap pemenuhan Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan di muka hukum 2. Sikap terhadap pembaharuan KUHP-KUHAP 3. Hak Atas Bantuan Hukum 4. Sikap terhadap korupsi peradilan 	Sehubungan dengan persamaan di muka hukum, hasil penelusuran kami tidak menemukan satu pandangan dan sikap JK terkait dengan pendapat JK pada aspek persamaan di muka hukum. Tetapi dalam pemanggilan saksi pada kasus bank century dengan tersangka Budi Mulya, JK memenuhi panggilan pengadilan tipikor. Bagi beberapa kalangan tindakan JK dalam memenuhi panggilan pengadilan tipikor dianggap sebagai tindakan yang taat pada asas persamaan di depan hukum. ²²⁸ Terkait dengan bantuan hukum, hasil penelusuran kami tidak ada satu opini atau indikasi bahwa JK menolak maupun mendukung program bantuan hukum.

226

<http://news.detik.com/read/2013/01/23/143802/2150741/10/tanggapi-daming-jk-pemerkosaan-disertai-pembunuhan-harus-dihukum-mati>, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/5075-kalla_pemerintah_tak_ragu_eksekusi_mati, <http://www.youtube.com/watch?v=FFOvkB1Lq6k>, <http://news.detik.com/read/2012/10/15/142523/2062860/10/grasi-bandar-narkoba-jk-kenapa-dibatalin-hukuman-mati>, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/359438-jk--kenapa-vonis-mati-narkoba-dibatalkan>

227

<https://id.berita.yahoo.com/untuk-koruptor-jk-lebih-setuju-dihukum-seumur-hidup-015312967.html>

228

<http://www.rmol.co/read/2014/05/05/153972/SBY-Mestinya-Contoh-Boediono-dan-JK->, diakses 10 Juni 2014

Keterlibatan dalam suatu kasus hukum atau pelanggaran HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diduga atau diisukan terlibat dalam kasus hukum 2. Diduga atau diisukan terlibat dalam Pelanggaran Kode Etik 3. Diduga atau diisukan terlibat dalam pelanggaran HAM 	<p>Dalam kasus hukum, Jusuf Kalla terlibat dalam kasus korupsi pengucuran dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 Triliun rupiah. Status JK dalam kasus tersebut masih sebagai saksi.²²⁹</p> <p>Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, JK pernah diisukan terlibat dalam KKN yang berujung pada pemberhentiannya dari posisi Menteri Perdagangan. JK diressufle bersama 18 menteri lainnya termasuk Susilo Bambang Yudhoyono.²³⁰ Namun isu tersebut, belum pernah terbukti. Pada saat era Presiden Megawati Soekarnoputri, JK kembali ditunjuk sebagai Menkokesra.²³¹</p>
Sikap terhadap penegakan Hukum dan Pelanggaran HAM Masa Lalu	Pandangan dan sikap calon terkait dengan kasus pelanggaran HAM	Terkait dengan pelanggaran HAM, sepanjang penelusuran kami tidak ada pernyataan eksplisit dengan pengusutan dugaan pelanggaran HAM baik yang dilakukan di masa lalu maupun di masa kini. Namun, JK menyatakan bahwa seorang pemimpin harus menjunjung tinggi HAM, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa JK memiliki komitmen atas penegakan hukum khususnya dalam bidang HAM. ²³²
	Pandangan dan sikap calon kepada penegakan hukum	<p>Dalam penegakkan hukum , Jusuf Kalla berpendapat bahwa pemimpin dalam hal ini pejabat harus bisa menjadi teladan.²³³</p> <p>Sementara itu , Berdasarkan catatan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Pengungkapan kasus pelanggaran hak asasi manusia di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla macet. Terobosan yang ada tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena terobosan itu justru terjebak pada birokrasi yang tetap tidak berubah. Hal ini diungkapkan dalam laporan tahunan HAM 2006</p>

229

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140508_yusuf_kalla_saksi_bankcentury.shtml, diakses 10 Juni 2014

230

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/06/13/n73q18-jk-ada-18-menteri-yang-dipecat-gus-dur>, diakses 18 Juni 2014

231

<http://capres2014.org/profil/profil-capres-2014-jusuf-kalla/>, diakses 10 Juni 2014

232

<http://sumsel.tribunnews.com/2014/06/09/jusuf-kalla-sebut-pemimpin-harus-jadi-teladan-dalam-penegakan-hukum>, diakses 10

Juni 2014

233

Ibid

		<p>yang dibuat Elsam. Direktur Eksekutif Elsam Agung Putri menjelaskan, pemerintahan Yudhoyono-Kalla menghadapi masalah serius dalam hal reformasi kelembagaan.²³⁴</p> <p><u>Jusuf Kalla</u>, mengatakan bahwa penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak bisa diselesaikan pemerintah atau eksekutif. Yang menentukan bukan kami, itu pengadilan. HAM itu urusan Komnas HAM, bukan presiden yang menentukan. JK berasal Komnas HAM sudah diamanatkan undang-undang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Sehingga penyelesaiannya nanti tak lagi tugas presiden. Tapi ia berjanji akan fasilitasi pihak-pihak keluarga korban pelanggaran HAM.²³⁵</p>
Sikap terhadap Pemberantasan KKN	Tidak melakukan atau diopinikan melakukan KKN atau suap	<p>Dalam kasus hukum, Jusuf Kalla terlibat dalam kasus korupsi pengucuran dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 Triliun rupiah. Status JK dalam kasus tersebut masih sebagai saksi.²³⁶</p> <p>Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, JK pernah diisukan terlibat dalam KKN yang berujung pada pemberhentiannya dari posisi Menteri Perdagangan. JK di resusufle bersama 18 menteri lainnya termasuk Susilo Bambang Yudhoyono.²³⁷ Namun isu tersebut, belum pernah terbukti. JK menyatakan bahwa alasannya diganti karena dianggap tidak dapat bekerja sama. Pada saat era Presiden Megawati Soekarnoputri, JK kembali ditunjuk sebagai Menkokesra.²³⁸</p> <p>Berdasarkan hasil penelusuran kami, komitmen JK dalam pemberantasan korupsi tidak jauh berbeda</p>

²³⁴ lihat dalam http://www.elsam.or.id/article.php?id=642&lang=in#.U6F4CZR_vlk, Kompas, Sabtu 13 Januari 2006, diakses

18 Juni 2014

²³⁵ <http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/11/jk-pengadilan-harus-selesaikan-kasus-pelanggaran-ham>, diakses 18

Juni 2014

²³⁶ http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140508_yusuf_kalla_saksi_bankcentury.shtml, diakses 10 Juni 2014

²³⁷

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/06/13/n73q18-jk-ada-18-menteri-yang-dipecat-gus-dur>, diakses

18 Juni 2014

²³⁸ <http://capres2014.org/profil/profil-capres-2014-jusuf-kalla/>, diakses 10 Juni 2014

		dengan pasangan kandidat lainnya. JK berpendapat dalam pemberantasan korupsi bahwa KPK harus diperkuat dan KPK tidak bisa hanya dengan 60 penyidik saja dan perlu diperkuat anggarannya. ²³⁹
	Komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan Korupsi	

D. KONSISTENSI VISI MISI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN REKAM JEJAK CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN HAM

a. Visi Misi Capres Cawapres

Pasangan Capres-Cawapres	Prabowo-Hatta	Jokowi-Jusuf Kalla
Visi	Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat	terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan negara kesatuan republik Indonesia yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis dan berdaulat serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, serta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 6. Mewujudkan bangsa indonesia menjadi

²³⁹ <http://sumsel.tribunnews.com/2014/06/09/jusuf-kalla-sebut-pemimpin-harus-jadi-teladan-dalam-penegakan-hukum>, diakses 10 Juni 2014

	<p>konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD</p> <p>2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan dan mandiri</p> <p>3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak, berbudaya luhur, berkualitas tinggi, sehat, cerdas, kreatif dan terampil</p>	<p>negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional</p> <p>7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan</p>
--	---	--

b. Perbandingan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Rekam Jejak Calon

Isu	Prabowo Hatta	Jokowi Kalla
Hak Atas Pekerjaan	Membuka daya serap angkatan kerja menuju 2 juta lapangan kerja pertahun melalui perbaikan regulasi dan infrastruktur untuk industri padat karya. Membuka lahan pertanian baru dan menjadikan BUMN sebagai ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi	Menjamin pemenuhan hak buruh melalui regulasi yang berpihak pada kepentingan publik Melindungi hak dan keselamatan buruh migran Meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, yakni industri manufaktur, industri pangan, sector maritime dan pariwisata;
	Meningkatkan keharmonisan	Membangun pemberdayaan buruh

hubungan industrial dengan jalan memperbaiki kordinasi dan komunikasi antara pekerja dunia usaha dan pemerintah	dengan membangun perumahan buruh dikawasan industry
Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh	Pelarangan kebijakan alih tenaga kerja di BUMN
Meningkatkan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM serta industry kecil dan menengah	Mendukung uu sistem dan komite pengawas ketenagakerjaan, sistem pengupahan, perlindungan upah, kesehatan, keperawatan, kebidanan, perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan akan merivisi UU ketenagakerjaan, PHI, dan UU PT untuk memberikan insentif pada perusahaan yang memberikan hak kepada pekerja untuk dapat membeli saham perusahaan
Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya	Akan menjalankan dengan konsisten UU Aparatur Sipil Negara yang menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan
Melindungi dan memperjuangkan hak hak buruh termasuk buruh migran	
Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional, dan pedagang kecil;	

Hak Atas Perumahan	Mempercepat reforma agrarian untuk menjamin tanah rakyat, meningkatkan	Program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi
--------------------	--	---

	akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan serta penyediaan rumah murah bagi rakyat	
--	---	--

Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	Memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian pancasila, menjunjung tinggi sifat jujur, disiplin, patuh terhadap hukum, toleransi terhadap perbedaan suku agama dan ras.	Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga
		Membuat kebijakan memperjuangkan untuk tidak berlaku diskriminatif terhadap kelompok atau golongan tertentu dalam negara
		Tindakan khusus sementara terhadap kelompok marjinal untuk menjamin kesejahteraan dengan warga negara lainnya
		Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama

Hak Atas Pendidikan	Malaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun dan mengembangkan pendidikan jarak jauh terutama untuk daerah yang sulit terjangkau dan miskin	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia pintar
		Menginisiasi UU Wajib belajar 12 tahun bebas pungutan
		Menyediakan fasilitas pendidikan sekolah dengan kualitas yang memadai
		Memperkuat rekrutmen dan pemerataan distribusi tenaga pengajar yang berkualitas

		Meningkatkan subsidi kepada PTN untuk memperbesar akses warga miskin mendapatkan pendidikan tinggi
		Memprioritaskan pembiayaan untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
		Pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah
		Berkomitmen untuk memperjuangkan biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh warga negara
	Menyejahterakan guru salah satunya dengan menaikkan tunjangan profesi guru menjadi 4 juta per bulan	Akan mengevaluasi ujian nasional dan tidak akan memberlakukan lagi penyeragaman sistem pendidikan nasional termasuk UN
	Mengalokasikan dana perbaikan kualitas pendidikan rata-rata 150 juta per sekolah. Dan alokasi dana APBN untuk universitas negeri ataupun swasta sebesar 20 triliun selama 2015-2019	Menyelenggarakan pendidikan 12 tahun yang berkualitas dan gratis serta menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dan penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan
	Merevisi kurikulum nasional dengan memantapkan pengembangan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945	Menjamin pemenuhan hak atas kesehatan melalui regulasi yang berpihak pada kepentingan publik
	Memperbaiki kualitas dari fasilitas pendidikan diseluruh SD, SMP, SMA, serta pesantren/sekolah agama sederajat dan meningkatkan fasilitas pendidikan di Universitas swasta dan negeri	

Memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan lulusan baru serta pencari kerja yang mengikuti pelatihan pada bidang dan lembaga tertentu yang direkomendasikan negara, menyediakan fasilitas kredit bank untuk mahasiswa berprestasi serta membangun jaringan internet gratis
Mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritime dan industrim, termasuk balai pelatihan kerja

Hak Atas Kesehatan	Menjamin pelayanan kesehatan gratis melalui percepatan pelaksanaan BPJS kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi Program Indonesia sehat
		Membentuk kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, perangkat dan alat kesehatan dan tenaga kerja
	Pengembangan rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota	Menyediakan sistem perlindungan sosial bidang kesehatan yang inklusif dan menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan
	Meningkatkan peran PKK Posyandu dan Puskesmas dan mengembangkan Program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Penambahan iuran BPJS kesehatan yang berasal dari APBN dan APBD
	Menyediakan susu untuk anak-anak miskin di sekolah melalui peternakan sapi dan kambing perah	
	Mewajibkan sarjana dan dokter yang baru lulus untuk	

	mengabdikan di daerah miskin dan tertinggal
--	---

Hak untuk Hidup	Menghukum berat pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Tidak ada data terkait dengan program pasangan calon sehubungan dengan hak ini.
-----------------	---	---

Pemberantasan korupsi	Memperkuat peran KPK, polisi dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara sinergis	Membangun POLRI yang profesional dan dipercaya masyarakat
		Merevitalisasi komisi kepolisian dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan kepada kinerja kepolisian. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis
		Pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang, penegakan hukum lingkungan, pemberantasan narkoba dan psikotropika, menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, menentang kriminalisasi
		Memprioritaskan pemberantasan korupsi dan mafia peradilan. Serta penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan peradilan
		Memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih, kompeten, anti korupsi dan komitmen terhadap penegakan

	<p>hukum</p> <p>Mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga negara serta membuka ruang partisipasi dan control public kepada lembaga pemerintahan</p>
Melaksanakan pemangkasan rantai dan proses birokrasi yang berbelit-belit dan berpotensi menjadi sumber KKN di semua tingkat dan sektor pemerintahan	Membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum
Mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mencapai system birokrasi efisien dan melayani dengan system insentif dan hukuman yang efektif	Mendukung pembentukan RUU yang mendukung pemberantasan korupsi: RUU perampasan aset, RUU perlindungan saksi korban, RUU kerjasama timbal balik dan RUU pembatasan transaksi tunai
Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel, memperkuat peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan; dan penguatan peranan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara sinergis.	<p>Memberantas korupsi di sector legislasi dengan menindak tegas oknum pemerintah yang menerima suap untuk memperdagangkan kepentingan masyarakat</p> <p>Menyediakan layanan public yang bebas korupsi melalui teknologi informasi yang transparan</p>
Menggalakkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual guna melindungi 85ndustry kreatif	<p>Menyediakan forum untuk melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan menyediakan akses terhadap proses dan produk legislasi</p> <p>Membuka keterlibatan public dan media massa dalam pengawasan terhadap upaya tindak pidana korupsi maupun proses penegakan hukum terhadap tindak pidana</p>

	<p>korupsi</p> <p>Mensinergiskan kepolisian, kejakung dan KPK dan memprioritaskan penanganan kasus korupsi di 86indust penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan 86industry sumber daya alam</p> <p>Mendorong terciptanya mekanisme tranparansi pembuatan kebijakan, terutama pada kebijakan-kebijakan yang berpotensi terjadinya korupsi oleh pejabat negara</p> <p>Menjaga KPK sebagai lembaga independen yang bebea dari pengaruh politik</p> <p>Mengambil sikap zero toleran terhadap tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang</p> <p>Memperkuat satuan tugas dilingkungan POLRI dan Kejaksaan yang terlatih secara khusus dan profesioanl dalam melakukan penangann dan pencegahan terhadap kejahatan perbankan dan pencucian uang</p>
--	---

Fair Trial	Menciptakan kepastian dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu	Tidak Ada Data mengenai isu ini
------------	---	---------------------------------

Penegakan HAM	Tidak ada Data mengenai program penegakan HAM	Memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun aparat negara seperti TNI dan POLRI
		Memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum khususnya terkait anak, perempuan dan kelompok termarjinalkan

		Mengefektifkan pelaksanaan semua UU untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan
		Menuntaskan kasus pelanggaran ham masa lalu dan menghapus semua bentuk impunitas
		Penghormatan ham dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu

E. Catatan Kritis

Prabowo-Hatta

<u>Program Bidang Penegakan Hukum dan Pelanggaran HAM Masa Lalu</u>			
<u>No.</u>	<u>Rencana Program</u>	<u>Catatan Rekam Jejak</u>	<u>Catatan Kritis</u>
<u>1.</u>	Melaksanakan pemangkasan rantai dan proses birokrasi yang berbelit-belit dan berpotensi menjadi sumber KKN di semua tingkat dan sektor pemerintahan Serta peningkatan kesejahteraan bagi aparat hukum khususnya Polri	pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh Prabowo pada rezim orde baru hingga saat ini belum ada kelanjutannya Dalam rangka pemangkasan rantai dan proses birokrasi dengan resiko KKN, pasangan ini tidak menyinggung secara umum namun hanya sebatas ruang lingkup kadernya saja, dimana jika ada yang terbukti korupsi, maka akan dipecat.	Pasangan ini sangat komitmen dalam pemangkasan dan proses birokrasi yang dapat menimbulkan potensi KKN. Namun, jika diperhatikan tidak adanya korelasi antara kesejahteraan aparat hukum dengan isu fair trial serta tidak adanya kejelasan penegakan hak asasi manusia dalam program pasangan ini.
<u>2.</u>	Menerapkan program hukuman mati	Mengenai penerapan program hukuman mati, diketahui bahwa Prabowo terlibat dalam usaha membebaskan upaya Wilfrida dari ancaman	Dengan tetap mempertahankan hukuman mati yang diusung oleh pasangan calon, ini menunjukkan bahwa pasangan calon

		<p>hukuman mati. Namun, usaha yang ia lakukan tersebut terkesan terlambat.</p> <p>Hatta Rajasa tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait dengan ini</p> <p>Mengenai hukuman mati terhadap Narkoba.</p>	<p>tidak mendukung hak mendasar yang dimiliki setiap individu, yakni hak hidup.</p>
<u>3</u>	<p>Mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mencapai system birokrasi efisien dan melayani dengan system insentif dan hukuman yang efektif</p>	<p>Prabowo memang tidak pernah terlibat dalam pemerintahan dan hanya pernah menjadi pemimpin di Militer. Prabowo memiliki hubungan dekat dengan beberapa tokoh politik atau partai politik dan memiliki koneksi dengan beberapa Negara Asing.</p> <p>Hatta Rajasa memiliki atau pernah terlibat dalam pemerintahan, terakhir Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Selain itu, Hatta juga memiliki hubungan dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena pernikahan anaknya dan kedekatan Hatta kepada pemodal-pemodal asing.</p>	<p>Prabowo dalam hal ini konsisten dengan program-program yang ia bawa untuk mensejahterakan aparatur Negara dan menciptakan birokrasi sesuai dengan apa yang ia cita-citakan. Namun, dalam rekam jejaknya, Prabowo memiliki hubungan kedekatan dengan tokoh politik, partai politik dan beberapa Negara Asing.</p> <p>Selain itu, pengalaman Hatta Rajasa di bidang Pemerintahan yang sering menduduki posisi penting, dan kedekatannya dengan pemodal-pemodal asing yang harus diperhatiakn.</p>
<u>4</u>	<p>Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel,</p>	<p>Prabowo berkomitmen dengan tegas untuk memecat kader Gerindra yang terlibat korupsi yang</p>	<p>Prabowo memiliki komitmen yang cukup baik dalam memberantas korupsi dengan</p>

	<p>memperkuat peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan; dan penguatan peranan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara sinergis.</p>	<p>ia tunjukkan dalam rapat bersama kader Gerindra, selain itu Gerindra mendapatkan penghargaan dari TII dan ICA sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik.</p> <p>Prabowo dikritik tidak serius dengan program pemberantasan korupsi yang mereka usung karena memojokkan KPK dan membela Ketua Umum PPP, anggota koalisi yang juga Menteri Agama Suryadharma Ali yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013.</p> <p>Prabowo berpendapat untuk menambah penyidik KPK sebagai cara untuk memberantas korupsi. Selain itu, berjanji untuk memberikan gelar pahlawan nasional untuk soeharto jika ia terpilih menjadi Presiden.</p> <p>Prabowo pada akhirnya menikah dengan puteri Soeharto, titek dan kemudian mendapatkan posisi yang cukup tinggi di Militer.</p> <p>Mengenai Hatta Rajasa,</p>	<p>menyarankan beberapa usulan seperti penambahan penyidik KPK dan memberikan peringatan kepada kader Gerindra supaya tidak adanya korupsi. Namun, ada beberapa hal yang dikritisi seperti Prabowo memiliki jabatan di militer karena menikah dengan Puteri Soeharto dan Prabowo cenderung memojokkan KPK serta membela Ketua umum PPP Surya Dharma Ali yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dana haji.</p> <p>Namun, dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah Hatta memiliki beberapa rekam jejak, dimana namana siebut-sebut masuk dalam beberapa kasus dugaan korupsi seperti kasus daging sapi Luthfi ishaq dan PT. Indoguna, Pengangkutan hibah Kereta APi Listrik dari Jepang. Namun, ia juga memiliki beberapa pendapat terkait pemberantas korupsi seperti pemberantasan pungli dan memecat kadernya yang terlibat. Dalam hal ini, Hatta cukup tegas menyatakan komitmennya terhadap</p>
--	---	---	--

		<p>yang namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi Impor daging sapi yang dilakukan oleh Luthfi Ishaq dan PT. Indoguna. Selain itu, Hatta dituding terlibat dalam dugaan korupsi dalam kasus pengangkutan kereta rel listrik hibah dari Jepang tahun 2006-2007. Kemudian.</p> <p>Namun, Hatta mengatakan pentingnya pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan penghambat ekonomi yang membuat ongkos usaha menjadi mahal. Hatta mengatakan akan memperkuat KPK dan kepolisian untuk memberantas korupsi untuk mencegah pungli dan korupsi. Selain itu, memecat kader partainya jika ada yang terlibat korupsi.</p>	pemberantasan korupsi.
<u>5</u>	Menggalakkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual guna melindungi 90industry kreatif	Mengenai penegakkan hukum terhadap pelanggaran HAKI guna melindungi Industri Kreatif, belum ada pembahasan.	-
<u>6</u>	Menciptakan kepastian dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu	<p>Prabowo:</p> <p>Sikap Prabowo dalam penegakkan hukum yang jujur dan adil sangat diwarnai dengan conflict</p>	<p>Prabowo.</p> <p>Sikap Prabowo sudah tegas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dimana</p>

		<p>of interest dan sering disebut-sebut bertanggungjawab atas penculikan aktifis dan kudeta terhadap Presiden B.J. Habibie. Seperti dapat dilihat dari pencopotannya dari jabatan dan ia bersama tim mawar mengakui penculikan, tim mawar dihukum dengan hukuman penjara, namun ia hanya dikenakan sanksi administrative.</p> <p>Sikap tegas ia tunjukkan dengan menyatakan bahwa ia akan memecat para kadernya jika ada yang melakukan pelanggaran hukum dan terbukti bersalah.</p> <p>Terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu, Prabowo hanya berpendapat bahwa Pengadilan HAM ad hoc tidak penting karena pengadilan militer sudah menjerat pelaku pelanggaran HAM.</p> <p>Hatta Rajasa:</p> <p>Hatta memberikan pandangan partainya terkait dengan gejolak yang terjadi dalam pembahasan RUU KUHAP. Hatta mengatakan bahwa PAN berkomitmen memperkuat KPK dan</p>	<p>dibuktikannya dengan memecat kader Gerindra yang melakukan pelanggaran dan terbukti bersalah dalam ranah hukum. Namun, yang harus dilihat disini adalah, Prabowo memiliki cerita lama dalam pelanggaran HAM terkait dengan penculikan aktifis bersama tim Mawar yang pada akhirnya tim Mawar dikenakan sanksi penjara sedangkan Prabowo dikenakan sanksi administratif.</p> <p>Hatta Rajasa:</p> <p>Komitmen Hatta terhadap penegakkan hukum di Indonesia sangatlah tegas, dimana ia mengatakan bahwa PAN akan berkomitmen dalam mendukung KPK dan RUU KUHAP. Namun, Rasyid anaknya Hatta Rajasa juga pernah mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan pada kematian, akan tetapi hanya diganjar pada satu pasal saja dari 3 pasal</p>
--	--	---	---

		<p>membuatnya lebih efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi</p> <p>Pada isu ini, Hatta menyatakan komitmennya untuk memperkuat KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi²⁴⁰</p> <p>Dengan adanya kasus yang dialami oleh putera Hatta Rajasa yaitu Muhammad Rasyid Amrullah yang menabrak dua orang dalam kecelakaan mobil hingga tewas di Tol Jagorawi. Rasyid dikenakan Pasal 283, 287 serta 310 UU Lalulintas tentang kecelakaan lalu lintas. Namun, begitu di Pengadilan Rasyid hanya dikenakan Pasal 310 tentang kecelakaan lalulintas yang menyebabkan meninggal dunia. Rasyid tidak ditahan karena alasan depresi dan ia diganjar dengan hukuman percobaan selama enam bulan, kemudian bebas dan tidak dipenjara.</p>	<p>yang digugat, kemudian Rasyid hanya diganjar hukuman enam bulan percobaan kemudian bebas dan tidak dipenjara.</p>
--	--	---	--

Program Bidang Hak atas Fair Trial

<u>No.</u>	<u>Rencana Program</u>	<u>Catatan Rekam Jejak</u>	<u>Catatan Kritis</u>
<u>1.</u>	Menciptakan kepastian dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu	Prabowo Sikap Prabowo dalam penegakkan hukum yang jujur dan adil sangat diwarnai dengan conflict of interest dan sering disebut-sebut bertanggungjawab atas penculikan aktifis dan kudeta terhadap Presiden BJ. Habibie. Seperti dapat dilihat dari pencopotannya dari jabatan dan ia bersama tim mawar mengakui penculikan, tim mawar dihukum dengan hukuman penjara, namun ia hanya dikenakan sanksi administrative. Sikap tegas ia tunjukkan dengan menyatakan bahwa ia akan memecat para kadernya jika ada yang melakukan pelanggaran hukum dan terbukti bersalah. Terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu, Prabowo hanya berpendapat bahwa Pengadilan HAM ad hoc tidak penting karena pengadilan militer sudah menjerat pelaku pelanggar	Prabowo. Sikap Prabowo sudah tegas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dimana dibuktikan dengan memecat kader Gerindra yang melakukan pelanggaran dan terbukti bersalah dalam ranah hukum. Namun, yang harus dilihat disini adalah, Prabowo memiliki cerita lama dalam pelanggaran HAM terkait dengan penculikan aktifis bersama tim Mawar yang pada akhirnya tim Mawar dikenakan sanksi penjara sedangkan Prabowo dikenakan sanksi administratif.

		<p>HAM.</p> <p>Hatta Rajasa:</p> <p>Hatta memberikan pandangan partainya terkait dengan gejolak yang terjadi dalam pembahasan RUU KUHP. Hatta mengatakan bahwa PAN berkomitmen memperkuat KPK dan membuatnya lebih efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi</p> <p>Pada isu ini, Hatta menyatakan komitmennya untuk memperkuat KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi²⁴¹</p> <p>Dengan adanya kasus yang dialami oleh putera Hatta Rajasa yaitu Muhammad Rasyid Amrullah yang menabrak dua orang dalam kecelakaan mobil hingga tewas di Tol Jagorawi. Rasyid dikenakan Pasal 283, 287 serta 310 UU Lalulintas tentang kecelakaan lalu lintas. Namun, begitu di Pengadilan Rasyid hanya dikenakan Pasal 310 tentang kecelakaan lalulintas yang menyebabkan meninggal dunia. Rasyid tidak ditahan karena alasan depresi dan ia diganjar dengan hukuman percobaan</p>	<p>Hatta Rajasa:</p> <p>Komitmen Hatta terhadap penegakkan hukum di Indonesia sangatlah tegas, dimana ia mengatakan bahwa PAN akan berkomitmen dalam mendukung KPK dan RUU KUHP. Namun, Rasyid anaknya Hatta Rajasa juga pernah mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan pada kematian, akan tetapi hanya diganjar pada satu pasal saja dari 3 pasal yang digugat, kemudian Rasyid hanya diganjar hukuman enam bulan percobaan kemudian bebas dan tidak dipenjara.</p>
--	--	---	---

241

Ibid.

		selama enam bulan, kemudian bebas dan tidak dipenjarakan.	
--	--	---	--

Program Bidang Pemberantasan Korupsi			
No.	Rencana Program	Catatan Rekam Jejak	Catatan Kritis
1.	Memperkuat peran KPK, polisi dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara sinergis	Prabowo, tidak menyinggung masalah ini, namun Hatta, mengatakan untuk memperkuat KPK dan Kepolisian dalam memberantas pungli	Sebuah komitmen yang sangat luar biasa untuk memberantas korupsi yang akan dilakukan oleh pasangan ini. Namun, yang harus diperhatikan adalah Hatta Rajasa sering kali namanya dibawa pada beberapa dugaan korupsi tertentu. Sehingga perlu diperhatikan bagaimana kedepannya.
2	Melaksanakan pemangkasan rantai dan proses birokrasi yang berbelit-belit dan berpotensi menjadi sumber KKN di semua tingkat dan sektor pemerintahan	pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh Prabowo pada rezim orde baru hingga saat ini belum ada kelanjutannya Dalam rangka pemangkasan rantai dan proses birokrasi dengan resiko KKN, pasangan ini tidak menyinggung secara umum namun hanya sebatas ruang lingkup kadernya saja, dimana jika ada yang terbukti korupsi, maka akan dipecah.	Pasangan ini sangat komitmen dalam pemangkasan dan proses birokrasi yang dapat menimbulkan potensi KKN. Namun, jika diperhatikan tidak adanya korelasi antara kesejahteraan aparat hukum dengan isu fair trial serta tidak adanya kejelasan penegakan hak asasi manusia dalam program pasangan ini.
3	Mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mencapai system birokrasi efisien dan melayani dengan system insentif	Prabowo memang tidak pernah terlibat dalam	

	dan hukuman yang efektif	<p>pemerintahan dan hanya pernah menjadi pemimpin di Militer. Prabowo memiliki hubungan dekat dengan beberapa tokoh politik atau partai politik dan memiliki koneksi dengan beberapa Negara Asing.</p> <p>Hatta Rajasa memiliki atau pernah terlibat dalam pemerintahan, terakhir Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Selain itu, Hatta juga memiliki hubungan dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena pernikahan anaknya dan kedekatan Hatta kepada pemodal-pemodal asing.</p>	<p>Prabowo dalam hal ini konsisten dengan program-program yang ia bawa untuk mensejahterakan aparatur Negara dan menciptakan birokrasi sesuai dengan apa yang ia cita-citakan. Namun, dalam rekam jejaknya, Prabowo memiliki hubungan kedekatan dengan tokoh politik, partai politik dan beberapa Negara Asing.</p> <p>Selain itu, pengalaman Hatta Rajasa di bidang Pemerintahan yang sering menduduki posisi penting., dan kedekatannya dengan Presiden SBY dan pemodal-pemodal asing yang harus diperhatikan kedekatan mereka.</p>
4	Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel, memperkuat peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan; dan penguatan peranan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara sinergis.	<p>Prabowo berkomitmen dengan tegas untuk memecat kader Gerindra yang terlibat korupsi yang ia tunjukkan dalam rapat bersama kader Gerindra, selain itu Gerindra mendapatkan penghargaan dari TII dan ICA sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik.</p> <p>Prabowo dikritik tidak serius dengan program</p>	<p>Prabowo memiliki komitmen yang cukup baik dalam memberantas korupsi dengan menyarankan beberapa usulan seperti penambahan penyidik KPK dan memberikan peringatan kepada kader Gerindra supaya tidak adanya korupsi. Namun, ada beberapa hal yang dikritisi seperti Prabowo memiliki jabatan di militer karena menikah dengan</p>

		<p>pemberantasan korupsi yang mereka usung karena memojokkan KPK dan membela Ketua Umum PPP, anggota koalisi yang juga Menteri Agama Suryadharma Ali yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013.</p> <p>Prabowo berpendapat untuk menambah penyidik KPK sebagai cara untuk memberantas korupsi. Selain itu, berjanji untuk memberikan gelar pahlawan nasional untuk soeharto jika ia terpilih menjadi Presiden.</p> <p>Prabowo pada akhirnya menikah dengan puteri Soeharto, titek dan kemudian mendapatkan posisi yang cukup tinggi di Militer.</p> <p>Mengenai Hatta Rajasa, yang namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi Impor daging sapi yang dilakukan oleh Luthfi Ishaq dan PT. Indoguna. Selain itu, Hatta dituding terlibat dalam dugaan korupsi dalam kasus pengangkutan kereta rel</p>	<p>Puteri Soeharto dan Prabowo cenderung memojokkan KPK serta membela Ketua umum PPP Surya Dharma Ali yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dana haji.</p> <p>Namun, dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah Hatta memiliki beberapa rekam jejak, dimana namana siebut-sebut masuk dalam beberapa kasus dugaan korupsi seperti kasus daging sapi Luthfi ishaq dan PT. Indoguna, Pengangkutan hibah Kereta APi Listrik dari Jepang. Namun, ia juga memiliki beberapa pendapat terkait pemberantas korupsi seperti pemberantasan pungli dan memecat kadernya yang terlibat. Dalam hal ini, Hatta cukup tegas menyatakan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.</p>
--	--	---	---

		<p>listrik hibah dari Jepang tahun 2006-2007. Kemudian.</p> <p>Namun, Hatta mengatakan pentingnya pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan penghambat ekonomi yang membuat ongkos usaha menjadi mahal. Hatta mengatakan akan memperkuat KPK dan kepolisian untuk memberantas korupsi untuk mencegah pungli dan korupsi. Selain itu, memecat kader partainya jika ada yang terlibat korupsi.</p>	
5	Mengalakkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual guna melindungi 98ndustry kreatif	Mengenai penegakkan hukum terhadap pelanggaran HAKI guna melindungi Industri Kreatif, belum ada pembahasan.	-

<u>Program Bidang 98hak atas Perburuhan</u>			
<u>No.</u>	<u>Rencana Program</u>	<u>Catatan Rekam Jejak</u>	<u>Catatan Kritis</u>
1.	Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh	Prabowo: Terkait upah, prabowo pernah menyindir para	Keseriusan dan komitmen pasangan ini dalam memenuhi hak

		<p>buruh yang menaikkan upah dimana menurutnya buruh harus tahu kondisi keadaan perusahaan dan ekonomi Indonesia.</p> <p>Perusahaan kayu Prabowo yang beroperasi di Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pada Maret 2012, mereka mengadakan upaya perusahaan milik Prabowo tersebut yang memaksa karyawannya untuk mengundurkan diri dengan janji akan membayar tunggakan gaji sejak Agustus 2011-Januari 2012. “Namun setelah mereka mundur ternyata janji tersebut tidak dipenuhi.</p> <p>Prabowo juga banyak berkomentar terkait sistem Outsourcing. Prabowo mengatakan bahwa outsourcing harus dihapus karena lebih banyak merugikan pekerja. Prabowo juga menyalahkan pemerintah yang mengatakan bahwa permasalahan ini timbul karena pemerintah yang terlalu menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Lebih lanjut juga prabowo mengatakan bahwa outsourcing tidak pancasila dan tidak manusiawi. Prabowo</p>	<p>buruh sangat konsisten, dimana dibuktikan dengan keadaan perekonomian Negara sesuai dengan kondisi Negara saat ini. Namun, keduanya sama-sama menolak outsourcing dan menyindir para buruh untuk paham terhadap kondisi perekonomian dan perusahaan yang ada di Indonesia saat ini. Dalam hal ini, perusahaan harus tetap berjalan jika perekonomian Negara akan tetap terjaga. Dan menurut Hatta, aksi-aksi demo yang selama ini sering dilakukan oleh para buruh, justru menjadi penghambat perkembangan perekonomian.</p>
--	--	--	---

		<p>menyatakan dirinya calon presiden yang satu-satunya menolak sistem kerja alih daya (outsourcing)</p> <p>Hatta Rajasa:</p> <p>Isu terkait hak atas pekerjaan cukup sering disinggung oleh Hatta Rajasa. Isu pertama adalah terkait kenaikan upah buruh. Atas tuntutan ini, Hatta Rajasa mengatakan bahwa permintaan buruh tidak realistis dan membuka kemungkinan terjadinya kebangkrutan . Untuk penyelesaiannya, pemerintah, buruh dan pengusaha harus duduk bersama membahas upah buruh.</p> <p>Lebih lanjut hatta menekankan bahwa dalam situasi ekonomi indonesia sekarang penting untuk menjaga agar perusahaan tetap jalan, dan faktor-faktor seperti banyaknya demo membuat industri menjadi tidak kuat</p> <p>Kemudian terkait isu Outsourcing, Hatta menegaskan bahwa sistem itu seharusnya tidak ada dan Hatta berkomitmen untuk menghapuskan</p>	
--	--	--	--

		Outsourcing	
2	Membuka daya serap angkatan kerja menuju 2 juta lapangan kerja pertahun melalui perbaikan regulasi dan infrastruktur untuk industri padat karya. Membuka lahan pertanian baru dan menjadikan BUMN sebagai ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi	Sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai poin ini.	-
3	Meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dengan jalan memperbaiki kordinasi dan komunikasi antara pekerja dunia usaha dan pemerintah	Sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai poin ini.	-
4	Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya	Sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai poin ini.	-
5	Melindungi dan memperjuangkan hak hak buruh termasuk buruh migran	Sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai poin ini.	-
6	Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional, dan pedagang kecil;	Sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai poin ini.	-

Program Bidang Hak atas Pendidikan

<u>No.</u>	<u>Rencana Program</u>	<u>Catatan Rekam Jejak</u>	<u>Catatan Kritis</u>
<u>1.</u>	mengutamakan pada wajib belajar 12 tahun, dan menaikkan renumerasi guru dan mengalokasikan dana APBN untuk memperbaiki kualitas pendidikan.	Secara umum: garis politik pendidikan partai Gerindra yang menekankan pada program wajib belajar 12 tahun dan menolak adanya komersialisasi pendidikan. Selain itu, pada saat mencalonkan presiden bersama Megawati, Prabowo juga berkomitmen untuk menghapuskan Ujian nasional. Prabowo mencanangkan Sekolah	Prabowo sangat berkomitmen dalam pendidikan. Namun, secara sekilas, program pendidikan wajib belajar 12 tahun konsisten dengan rekam jejak dan manifesto politik partai dari calon presiden. Untuk isu Ujian Nasional, pasangan calon tidak mengagendakan penghapusan Ujian Nasional.
<u>2</u>	Menyejahterakan guru salah satunya dengan menaikkan tunjangan profesi guru menjadi 4 juta per bulan	Menengah Kejuruan yang nantinya bisa langsung kerja dilapangan.	
<u>3</u>	Mengalokasikan dana perbaikan kualitas pendidikan rata-rata 150 juta per sekolah. Dan alokasi dana APBN untuk universitas negeri ataupun swasta sebesar 20 triliun selama 2015-2019	Hatta Rajasa dalam hal ini tidak memiliki rekam jejak mengenai pendidikan, selama apa yang kami teliti.	
<u>4</u>	Merevisi kurikulum nasional dengan memantapkan pengembangan budaya bangsa yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945		
<u>5</u>	Memperbaiki kualitas dari fasilitas pendidikan diseluruh SD, SMP, SMA, serta pesantren/sekolah agama sederajat dan meningkatkan fasilitas pendidikan di Universitas swasta dan negeri		

<u>6</u>	Memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan lulusan baru serta pencari kerja yang mengikuti pelatihan pada bidang dan lembaga tertentu yang direkomendasikan negara, menyediakan fasilitas kredit bank untuk mahasiswa berprestasi serta membangun jaringan internet gratis		
<u>7</u>	Mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritime dan industrim, termasuk balai pelatihan kerja		

<u>Program Bidang Hak atas Kebebasan Beragama</u>			
<u>No.</u>	<u>Rencana Program</u>	<u>Catatan Rekam Jejak</u>	<u>Catatan Kritis</u>
<u>1.</u>	Memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian pancasila, menjunjung tinggi sifat jujur, disiplin, patuh terhadap hukum, toleransi terhadap perbedaan suku agama dan ras.	Prabowo: Jika terpilih menjadi Presiden RI, Prabowo Subianto berjanji akan menertibkan kelompok Syiah dan Ahmadiyah, karena dinilai dapat menciptakan instabilitas bangsa. Sementara dalam kesempatan yang lain, adik calon presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa Prabowo berkomitmen untuk melindungi minoritas seperti Ahmadiyah, Muslim Syiah dan Kristen di Indonesia, dalam upaya untuk	Dalam hal ini sangat jelas sekali komitmen dari Prabowo dalam menghadapi masalah Kebebasan Bearagama, Prabowo mengajak masyarakat kembali memahami dan meresapi makna kebinekaan kemudian konsekuen melaksanakannya. Menurut dia, semboyan ini sejak dulu telah mengikat suku, ras, dan etnis di Indonesia menjadi satu. Sedangkan Hatta, hanya menyarankan "dialog" sebagai wadah penyelesaian masalah.
<u>2</u>			
<u>3</u>			

		<p>mempertahankan pluralisme dan Pancasila.</p> <p>Saat ini Prabowo didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki catatan diskriminatif di Kementerian Pertanian. Berdasarkan video yang diunggah di YouTube oleh akun GerindraTV pada 14 Oktober 2013, dikatakan oleh Adik Prabowo bahwa Hashim menyebut bahwa sikap PKS yang memecat 73 karyawan Kristen di Kementerian Pertanian selama sembilan tahun sebagai tindak diskriminasi.</p> <p>Dalam kasus penolakan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli. Prabowo berpendapat, penolakan yang berdasarkan agama merupakan permasalahan serius. Prabowo mengajak masyarakat kembali memahami dan meresapi makna kebinekaan kemudian konsekuen melaksanakannya. Menurut dia, semboyan ini sejak dulu telah mengikat suku, ras, dan etnis di Indonesia menjadi satu.</p> <p>Hatta Rajasa: Kecaman keras ditujukan</p>	<p>Namun, mereka di dukung oleh Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki catatan diskriminatif di Kementerian Pertanian</p>
--	--	---	--

		Hatta Rajasa kepada ormas-ormas yang melakukan penyerangan terhadap umat beragama. Menurutnya, penyelesaian masalah ini harus mengedepankan dialog	
--	--	--	--

<u>Program Bidang Hak atas Kesehatan</u>			
<u>No.</u>	<u>Rencana Program</u>	<u>Catatan Rekam Jejak</u>	<u>Catatan Kritis</u>
<u>1.</u>	Menekankan pada percepatan pelaksanaan BPJS Kesehatan	menurut hasil penelusuran kami pasangan calon belum pernah memberikan komentar yang komprehensif sehubungan dengan isu ini.	-
<u>2</u>	Pengembangan rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota		
<u>3</u>	Meningkatkan peran PKK Posyandu dan Puskesmas dan mengembangkan Program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia		
<u>4</u>	Menyediakan susu untuk anak-anak miskin di sekolah melalui peternakan sapi dan kambing perah		
<u>5</u>	Mewajibkan sarjana dan dokter yang baru lulus untuk mengabdikan di daerah miskin dan tertinggal		

Program Untuk Mendukung Hak Perumahan

<u>No.</u>	<u>Rencana Program</u>	<u>Catatan Rekam Jejak</u>	<u>Catatan Kritis</u>
<u>1.</u>	Mempercepat reforma agrarian untuk menjamin tanah rakyat, meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan serta penyediaan rumah murah bagi rakyat	<p>Prabowo:</p> <p>Tidak mempunyai jejak rekam mengenai masalah ini.</p> <p>Hatta Rajasa:</p> <p>Pada saat Hatta Rajasa masih menjabat sebagai Menko Perekonomian, Hatta Rajasa bersama-sama dengan Menpera menginisiasi RUU Tabungan Perumahan Nasional untuk menyediakan tabungan rumah murah bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai BUMN. Hingga saat ini, RUU Tapenas masih dalam tahap pembahasan</p>	Hatta Rajasa memiliki komitmen dalam menangani masalah perumahan. namun, masalah perumahan tersebut hanya sebatas untuk Pegawai Negeri Sipil dan BUMN saja, belum sampai kemasalah kasus yang lebih spesifik seperti penggusuran rumah dan sebagainya.

Jokowi-JK

Program Untuk Mendukung Hak Perburuhan

<u>No.</u>	<u>Rencana Program</u>	<u>Catatan Rekam Jejak</u>	<u>Catatan Kritis</u>
<u>1.</u>	Menjamin pemenuhan hak buruh melalui regulasi yang berpihak pada kepentingan publik	Jokowi pernah menaikkan secara signifikan UMP DKI Jakarta tahun 2013, yaitu	Pasangan Jokowi-JK dapat mendukung program untuk mendukung hak atas perburuhan, diantaranya

<u>2</u>	Melindungi hak dan keselamatan buruh migran	44%;	<p>adalah kenaikan upah dan mekanisme penentuan upah. Namun kemerdekaan buruh untuk melakukan demonstrasi patut diwaspadai karena bisa diartikan sebagai bentuk radikalisme; Sedangkan penghapusan outsourcing cukup diragukan akan dilakukan calon ini.</p> <p>Nomor 2-5 tidak ada;</p>
<u>3</u>	Membangun pemberdayaan buruh dengan membangun perumahan buruh dikawasan industry	Namun, Jokowi cenderung memihak kaum pengusaha dengan mengabdikan penanggulangan upah minimum di Kawasan Berikat atas kenaikan upah tersebut; Setelah buruh menggugat melalui PTUN dan dimenangkan, Jokowi tidak mengajukan upaya banding dan memilih mematuhi putusan pengadilan dengan meminta perusahaan membayar upah pekerja sebagaimana seharusnya;	
<u>4</u>	Pelarangan kebijakan alih tenaga kerja di BUMN		
<u>5</u>	Mendukung uu sistem dan komite pengawas ketenagakerjaan, sistem pengupahan, perlindungan upah, kesehatan, keperawatan, kebidanan, perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan akan merevisi UU ketenagakerjaan, PHI, dan UU PT untuk memberikan insentif pada perusahaan yang memberikan hak kepada pekerja untuk dapat membeli saham perusahaan		
<u>6</u>	Akan menjalankan dengan konsisten UU Aparatur Sipil Negara yang menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan	<p>Jokowi menaikkan UMP DKI Jakarta tahun 2014, sekalipun besarnya jauh dari apa yang buruh minta, yaitu 3.7 juta.</p> <p>Jusuf Kalla saat maju sebagai calon presiden pada 2009 berjanji menghapuskan outsourcing. Namun di saat yang sama JK menyatakan pekerja outsourcing harus diutamakan oleh perusahaan. Pendapat JK lainnya, pengusaha tidak seharusnya menekan upah buruh untuk memperkecil biaya produksi. Dalam hal penentuan upah, JK</p>	

		<p>mengatakan bahwa pemerintah harus turun tangan dalam permasalahan penetapan UMP, jangan hanya menyerahkan pada pengusaha dan buruh.</p> <p>UMP 3.7 Juta, JK berpendapat bahwa permintaan upah sebesar itu bisa merugikan perusahaan dan juga buruh itu sendiri.</p> <p>Demo buruh karena kurang komunikasi antara buruh, pengusaha, dan pemda. Demo buruh merupakan bagian dari demokrasi.</p> <p>Saat menjadi wakil presiden, buruh masih dikaitkan dengan radikalisme yang dilakukan para pekerja.</p> <p>Nomor 2-5 tidak ada;</p>	
--	--	---	--

<u>Program Bidang Hak atas Fair Trial</u>			
<u>No.</u>	<u>Rencana Program</u>	<u>Catatan Rekam Jejak</u>	<u>Catatan Kritis</u>
<u>1.</u>		Jokowi mendukung hak atas bantuan hukum bagi mereka yang miskin secara ekonomi.	Dalam program “mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan”, Jokowi sama sekali tidak memasukkan pembaharuan mekanisme peradilan pidana (fair
<u>2.</u>			
<u>3.</u>			

			trial). Sekalipun Jokowi mendukung pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, namun hal itu tidak akan signifikan menciptakan peradilan yang fair (<i>fair trial</i>)
--	--	--	--

<u>Program Bidang Pemberantasan Korupsi</u>			
<u>No.</u>	<u>Rencana Program</u>	<u>Catatan Rekam Jejak</u>	<u>Catatan Kritis</u>
1.	<p>Membangun POLRI yang profesional dan dipercaya masyarakat</p> <p>Memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih, kompeten, anti korupsi dan komitmen terhadap penegakan hukum</p> <p>Merevitalisasi komisi kepolisian dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan kepada kinerja kepolisian.</p> <p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis</p> <p>Pemberantasan tindakan penyalahgunaan, perikanan liar, dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang, penegakan hukum lingkungan, pemberantasan narkoba dan psikotropika, menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, menentang kriminalisasi</p> <p>Memprioritaskan pemberantasan korupsi dan mafia peradilan. Serta penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan peradilan</p> <p>Penghormatan HAM dan penyelesaian</p>	<p>Mendukung pemberantasan korupsi yang dimulai dari mengefektifkan kinerja birokrasi yang sering melakukan pungutan liar ke masyarakat;</p> <p>Kasus korupsi pengadaan bus transjakarta hampir menjerat Jokowi karena dianggap melakukan pembiaran dengan tidak melakukan pengawasan intensif yang mengakibatkan korupsi;</p> <p>Jusuf Kalla mendukung penguatan KPK, salah satunya dengan menambah jumlah penyidikannya;</p> <p>Jusuf Kalla dikabarkan terlibat dalam kasus Century dan KKN di masa Presiden Gusdur, namun tuduhan itu tidak</p>	<p>Jokowi memiliki track record birokrat yang bersih. Namun kasus korupsi bus transjakarta (sekalipun tidak menjerat Jokowi secara langsung) dapat menunjukkan kelalaian Jokowi mengontrol kerja birokrasi di bawahnya;</p> <p>Pasangan Jokowi-JK berkomitmen menciptakan KPK yang independen dan track record bersih mereka dapat mendukung iklim positif pemberantasan korupsi;</p>

	secara berkeadilan terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu Mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga negara serta membuka ruang partisipasi dan control public kepada lembaga pemerintahan	terbukti.	
2	Membangun politik legislasi yang jelas, terbuka dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum		
3	Mendukung pembentukan RUU yang mendukung pemberantasan korupsi: RUU perampasan aset, RUU perlindungan saksi korban, RUU kerjasama timbal balik dan RUU pembatasan transaksi tunai		

<u>Program Untuk Mendukung Penegakan Hukum dan HAM</u>			
<u>No.</u>	<u>Rencana Program</u>	<u>Catatan Rekam Jejak</u>	<u>Catatan Kritis</u>
<u>1.</u>	komitmen untuk kembali membuka kasus pelanggaran HAM masa lalu apabila terpilih sebagai Presiden RI.	<p>Pendekatan Jokowi yang humanis terhadap masyarakat sepanjang menjabat sebagai walikota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta menunjukkan bahwa Jokowi mendukung program penegakkan HAM.</p> <p>JK mengeluarkan pernyataan: Setiap pemimpin harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Namun JK mengeluarkan</p>	<p>Komitmen Jokowi tegas untuk membongkar dan mengadili kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, namun komitmen dan track record JK tidak cukup kuat untuk mendukung langkah-langkah Jokowi.</p> <p>Terlihat keduanya memiliki rekam jejak yang berbeda, sehingga hal ini dimungkinkan menghambat program membongkar dan mengadili kasus</p>

		<p>pernyataan sebaliknya bahwa tanggung jawab membongkar kasus pelanggaran HAM adalah urusan Komnas HAM, bukan pemerintah atau eksekutif.</p>	<p>pelanggaran berat HAM masa lalu.</p>
<u>2</u>	<p>Penegakan Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan muatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun aparat negara seperti TNI dan POLRI; 2. Memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum khususnya terkait anak, perempuan dan kelompok termarginalkan; 3. Mengefektifkan pelaksanaan semua UU untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan; 4. Menuntaskan kasus pelanggaran ham masa lalu dan menghapus semua bentuk impunitas; 5. Penghormatan ham dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu 	<p>Selain, No 4 dan 5, tidak ada data</p>	<p>Selain, No 4 dan 5, tidak ada data</p>
<u>3</u>	<p>Program terkait dengan hak hidup</p>	<p>Pernyataan Jusuf Kalla yang masih mendukung diterapkannya hukuman mati untuk kasus perkosaan dan narkoba.</p> <p>Jokowi secara tidak langsung masih menyetujui pelaksanaan hukuman mati, akan ditembak atau digantung terserah UU</p>	<p>Tidak ada agenda khusus pasangan calon sehubungan dengan hak hidup, baik mendukung hukuman mati maupun tidak. Hal ini terkesan wajar, karena Jokowi tidak menjadikan isu ini sebagai fokus utama dalam kampanye pilpres bahkan cenderung tidak mempedulikan isu ini.</p>

		yang mengaturnya.	Tetapi, jika dilihat dari rekam jejak dan pernyataan pasangan kandidat, menunjukkan bahwa mereka akan tetap mempertahankan <i>status quo</i> dari hukuman mati.
<u>Program Untuk Mendukung Hak atas Kesehatan</u>			
<u>No.</u>	<u>Rencana Program</u>	<u>Catatan Rekam Jejak</u>	<u>Catatan Kritis</u>
1.	Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi Program Indonesia sehat	Jokowi mengeluarkan kartu Jakarta Sehat untuk menjamin akses kesehatan yang layak bagi seluruh warga miskin di DKI Jakarta;	Jokowi masih mempertahankan kartu Indonesia Sehat. Padahal sudah ada BPJS yang berlaku nasional dan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan kaya dan miskin. Dengan Jokowi lebih fokus pada Kartu Indonesia Sehat, dia seolah-olah melihat akses kesehatan bagi masyarakat miskin tidak bisa setara dengan masyarakat umum lainnya.
2	Membentuk kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, perangkat dan alat kesehatan dan tenaga kerja	Jusuf Kalla mengomentari bahwa program BPJS Kesehatan yang akan memberikan fasilitas kesehatan gratis kepada masyarakat akan membebani keuangan negara.	Perspektif pasangan calon ini atas hak atas kesehatan kedua calon ini masih diskriminatif. Selain itu, dari paparan rekam jejak calon antara Jokowi dan JK menunjukkan adanya konflik antara keduanya sehubungan dengan isu kesehatan. Hal ini akan menghambat jalannya
3	Menyediakan sistem perlindungan sosial bidang kesehatan yang inklusif dan menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan		
4	Penambahan iuran BPJS kesehatan yang berasal dari APBN dan APBD		

			program kesehatan yang diusung pasangan calon apabila mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode berikutnya.
--	--	--	---

Program Untuk Mendukung Hak atas Pendidikan			
No.	Rencana Program	Catatan Rekam Jejak	Catatan Kritis
1.	Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia pintar	Jokowi sepanjang menjadi Gubernur DKI Jakarta menerapkan Kartu Jakarta Pintar yang memberikan pendidikan gratis bagi warga Jakarta.	Jokowi belum memiliki perspektif bahwa hak atas pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara secara cuma-cuma. Pemberian kartu Indonesia Pintar malah mendiskriminasi antara anak kaya dan anak miskin. Kartu Indonesia Pintar ini menjadi bertentangan dengan program kerja Jokowi-JK sendiri.
2.	Menginisiasi UU Wajib belajar 12 tahun bebas pungutan	Dalam beberapa pernyataannya seputar isu pendidikan, Jokowi juga menilai bahwa Ujian Nasional harus dihapuskan, karena tidak UN tidak tepat dijadikan patokan kelulusan karena belum meratanya kualitas pendidikan di Indonesia.	Selain itu, pertentangan diantara Jokowi-JK sehubungan dengan isu penghapusan Ujian Nasional menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan komitmen dan keseriusan pasangan calon dalam memperbaiki sistem
3.	Menyediakan fasilitas pendidikan sekolah dengan kualitas yang memadai		
4.	Memperkuat rekrutmen dan pemerataan distribusi tenaga pengajar yang berkualitas		
5.	Meningkatkan subsidi kepada PTN untuk memperbesar akses warga miskin mendapatkan pendidikan tinggi	Jusuf Kalla berpendapat bahwa Ujian Nasional sebaiknya tidak dihapus dan bisa menjadi indikator	
6.	Memprioritaskan pembiayaan untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu		

	pengetahuan dan teknologi	gambaran kualitas pendidikan di Indonesia.	pendidikan nasional jika terpilih presiden dan wakil presiden 2014.
7.	Pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah		
8.	Berkomitmen untuk memperjuangkan biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh warga negara		
9.	Akan mengevaluasi ujian nasional dan tidak akan memberlakukan lagi penyeragaman sistem pendidikan nasional termasuk UN		
10.	Menyelenggarakan pendidikan 12 tahun yang berkualitas dan gratis serta menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dan penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan		
11.	Menjamin pemenuhan hak atas kesehatan melalui regulasi yang berpihak pada kepentingan publik		

Program Untuk Mendukung Hak Kebebasan Beragama

<u>No.</u>	<u>Rencana Program</u>	<u>Catatan Rekam Jejak</u>	<u>Catatan Kritis</u>
1.	Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga Membuat kebijakan memperjuangkan untuk tidak berlaku diskriminatif terhadap kelompok atau golongan tertentu dalam negara	Jokowi menunjuk Lurah Susan yang beragama Kristen untuk menjadi lurah di Lenteng Agung yang mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam.	Pertentangan yang signifikan dalam rekam jejak antara pasangan calon dalam hal mendukung Hak kemerdekaan beragama, akan menghambat pelaksanaan program pasangan calon apabila menang dalam pilpres 2014.
2.	Tindakan khusus sementara terhadap kelompok marjinal untuk menjamin kesejahteraan dengan warga negara lainnya	Penyelesaian Gereja Damai Kristus, Kampung Duri dilakukan secara damai oleh Jokowi. Dalam kasus ini, Jokowi langsung turun tangan mengatasi, melakukan resolusi konflik dan melakukan musyawarah dengan kedua belah	
3.	Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama		

		<p>pihak. Jokowi juga mengeluarkan Surat Izin Prinsip Ibadah.</p> <p>JK ketika masih menduduki posisi wakil presiden berpendapat bahwa SKB 3 Menteri yang dikeluarkan untuk membatasi pembangunan rumah ibadah dianggap masih diperlukan karena bertujuan untuk melindungi kaum pemeluk agama minoritas.</p> <p>Jusuf Kalla pernah pernah melakukan penyerangan terhadap sembilan gereja Protestan, empat gereja Katholik, sebuah biara, sebuah kampus teologi, sebuah asrama mahasiswa Katholik dan dua sekolah Katholik (<i>Di Makassar pada 1 Oktober 1969, para pelajar Muslim dipimpin Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyerang sembilan gereja Protestan, empat gereja Katholik, sebuah biara, sebuah kampus teologi, sebuah asrama mahasiswa Katholik dan dua sekolah Katholik. HMI Makassar saat itu dipimpin ketua umum Jusuf Kalla yang kelak menjabat wakil presiden</i></p>	
--	--	---	--

		<p><i>Indonesia pada 2004).</i> Sumber: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0213ba_ForUpload.pdf</p> <p>Semasa JK menjadi wakil presiden, JK mengancam penyerangan ahmadiyah di Kuningan Jawa Barat. Namun JK sepakat untuk meluruskan kelompok yang dianggap aliran sesat, termasuk Ahmadiyah.</p>	
--	--	--	--

<u>Program Untuk Mendukung Hak Perumahan</u>			
<u>No.</u>	<u>Rencana Program</u>	<u>Catatan Rekam Jejak</u>	<u>Catatan Kritis</u>
1.	Program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi;	<p>Jokowi menolak cara penggusuran yang dilakukan dengan cara kekerasan, baik di Solo dulu maupun di Jakarta (Waduk Pluit , Muara Angke, Kampung Baru , dan Penjaringan).</p> <p>Namun, berdasarkan temuan dari komnas HAM, ditemukan adanya indikasi pelanggaran hak warga dalam proyek normalisasi waduk pluit di Muara Baru. Empat pelanggaran hak warga dalam proyek tersebut</p>	Pasangan Jokowi-JK memiliki rekam jejak yang konsisten untuk mendukung terpenuhinya Hak Atas Perumahan.

		diantaranya: Ada intimidasi terhadap masyarakat yang digusur, Tidak ada kejelasan terkait tujuan dari proyek normalisasi, Intimidasi oknum yang membuat masyarakat tidak nyaman tinggal di Rusunawa, Kesejahteraan warga di Rusunawa semakin menurun.	
--	--	---	--